

DRS. M. CHOLIL

**B6**

# **SEJARAH OPERASI<sup>2</sup> PEMBEBASAN IRIAN-BARAT**

Cetakan ke - 2

SERI TEXT-BOOK SEJARAH ABRI

DEPARTEMEN PERTAHANAN - KEAMANAN  
PUSAT SEJARAH ABRI  
1979

DRS. M. CHOLIL

# **SEJARAH OPERASI<sup>2</sup> PEMBEBASAN IRIAN-BARAT**

Cetakan ke - 2

SERI TEXT-BOOK SEJARAH ABRI

DEPARTEMEN PERTAHANAN - KEAMANAN  
PUSAT SEJARAH ABRI  
1979

*Catutan*

Cetakan ke-2 ini tidak mengalami perbaikan isi kecuali pemakaian ejaan yang disempurnakan.

## S A M B U T A N

### WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENDJATA DJENDERAL T.N.I. M. PANGGABEAN

Dengan mengutjapkan pudji sjukur kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa, saja menjambut dengan gembira terbitnja **SERITEXT-BOOK SEDJARAH ABRI** ini.

Kiranja kita telah menjadari semuanya bahwa setiap Buku Sedjarah **ABRI** mempunjai-Tiga Fungsi. Pertama adalah fungsi edukatif-historis, yakni agar daripadanya setiap Anggota **ABRI** dapat mempelajari proses-proses dan tokoh-tokoh perdjuaan **ABRI** sedjak masa pra-Kemerdekaan, masa Kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang, sebagai bekal-pengetahuan dan bekal-kerdja jang sangat penting artinja bagi penunaian tugas kewadajiban kita semua dimasa mendatang.

Kedua adalah fungsi pewarisan setjara sosiologis, artinja ialah bahwa dengan Buku Sedjarah itu **ABRI** dapat mempunjai sarana jang lebih njata untuk dapat mewariskan kepada Generasi Muda sekarang maupun kepada generasi-generasi jang akan datang - apa jang telah diperdjuaan oleh **ABRI** pada masa-masa jang lampau. Terutama **ABRI** mempunjai kewadajiban untuk mewariskan kepada Generasi Muda, bukan hanya pengetahuan mengenai rentetan peristiwa jang terdjadi setjara kronologis, melainkan dan terutama djuga mewariskan semangat dan djiwa perdjuaan jang ada pada setiap peristiwa bersedjarah itu.

Ketiga adalah fungsi komunikatif-integratif, yakni fungsi sebagai media komunikasi dan media integrasi, baik antara Anggota **ABRI** sesama, maupun dalam hubungannya dengan Rakjat, dengan masyarakat luas.

Ini penting sekali artinja, karena sedjarah djuga mempunjai misi komunikasi dan misi integrasi, dalam arti bahwa sedjarah selain harus dapat dikenal dan diresapi baik oleh para "pelaku", maupun para "penontonnja", sedjarah djuga harus dapat mempersatukan, mengintegrasikan kedua potensi dalam masyarakat itu.

Ketiga fungsi inilah jang harus kita pegang teguh dalam setiap penulisan sedjarah, dan dalam setiap usaha Pembinaan Sedjarah Perdjuaan **ABRI**.

Sudah barang tentu Buku-buku Sedjarah jang diterbitkan dalam rangka **SERI TEXT-BOOK** ini belumlah sempurna. Djustru ini mendjadi tugas kewadajiban kita, untuk masih terus menjempurnakan dan mengembangkan nilai-nilainya.

Harapan saja tidak lain adalah, penggunaan Buku-buku Sedjarah ini sebaik-baiknya dikalangan jang luas, tidak hanja dilembaga-lembaga pendidikan ABRI - di AKABRI, SESKO-SESKO dan LEMHANNAS - tetapi sebar-luaskan pula dikalangan masjarakat.

Demikian pula, terus tingkatkan mutu SERI TEXT-BOOK SEDJARAH ABRI ini.

Djakarta, 14 September 1971.

MENTERI NEGARA/WAKIL PANGLIMA  
ANGKATAN BERSENDJATA



M. PANGGABEAN  
DJENDERAL TNI

## PENGANTAR UMUM

Gagasan bagi penjunusan Seri Text-Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini untuk pertama kalinya kami ajukan setjara resmi pada Rapat Dinas Sedjarah HANKAM/ABRI, tanggal 20 April 1968. Rapat Dinas itu dihadiri oleh Kepala Pusat Sedjarah ABRI (waktu itu Lembaga Sedjarah HANKAM), Dinas Sedjarah Angkatan Darat (pada waktu itu Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat), Dinas Sedjarah Angkatan Laut (pada waktu itu Direktorat Sedjarah dan Perpustakaan Angkatan Laut), Biro Budaya dan Sedjarah/Pusat Hubungan Masyarakat Angkatan Udara, dan Biro Sedjarah Direktorat LITBANG POLRI (pada waktu itu Pusat Sedjarah Angkatan Kepolisian). Gagasan ini kami ajukan dalam rangka penjunusan Kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI jang integral bagi semua lembaga pendidikan perwira ABRI. Gagasan tersebut diterima baik dan schema kurikulum jang kami ajukan disempurnakan sehingga mentjapai bentuk sebagaimana jang tertjantum pada semua text-book dalam seri ini.

Keputusan Rapat Dinas tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Staf HANKAM, Major Djenderal M. M. Rachmat Kartakusuma pada tanggal 9 Mei 1968 dengan surat keputusan No. : KEP/B/183/1968. Untuk lebih mematangkan persiapan-persiapan bagi pelaksanaan Projek, maka pada tanggal 21 - 22 April 1969 diselenggarakan Rapat Kerdja Kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI, jang dihadiri oleh utusan-utusan dari AKABRI, Lembaga-Lembaga Pendidikan Landjutan Perwira (seperti SEKUAL, SEKKAU dan PTIK), SESKO-SESKO dan LEMHANNAS. Bahwa Rapat Kerdja itu dianggap penting oleh pimpinan Departemen HANKAM, dibuktikan dengan kenyataan, bahwa Rapat Kerdja itu dibuka sendiri oleh Kepala Staf HANKAM jang baru, Letnan Djenderal Soemitro.

Rapat Kerdja itu menghasilkan saran-saran untuk silabus dan sekaligus isi daripada text-book jang akan disusun. Dan segera sesudah itu Projek Penulisan Text-Book Sedjarah HANKAM/ABRI dimulai dengan Surat Keputusan Kepala Staf HANKAM tanggal 10 Djuli 1969 No. : PRIN/E/4/VII/1969.

Titik tolak gagasan menjusun rentjana kurikulum Sedjarah HANKAM/ABRI jang integral, mulai dari pendidikan-pendidikan pembentukan perwira (AKABRI) sampai kepada SESKO-SESKO, dan bahkan sampai kepada LEMHANNAS, adalah dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi tradisi moril dan intelektual bagi seluruh ABRI. Ketika gagasan itu ditjetuskan, perdjuaangan untuk mentjapai integrasi ABRI sedang mentjapai tahap menentukan. Sehingga pikiran para pedjabat HANKAM pada waktu itu ditudjukan kepada usaha-usaha untuk memperkuat semangat integrasi, terutama integrasi mental.

Pada waktu itu telah pula timbul suatu masalah jang hingga kini dianggap penting, yakni masalah penggantian generasi didalam pimpinan ABRI dari generasi 1945 kepada generasi baru, generasi lulusan AKABRI. Pimpinan ABRI jang sekarang, jang berasal dari generasi 1945 menginginkan, agar

supaja nilai-nilai yang baik dari perjuangan mereka dapat disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Hal itu kiranya perlu demi kontinuitas dan stabilitas didalam pelaksanaan Perjuangan Nasional selanjutnya. Terutama dalam rangka penghormatan Dwifungsi ABRI setjara tepat.

Untuk dua tujuan tersebut, yakni tujuan memperkuat semangat integrasi ABRI dan tujuan meneruskan nilai-nilai yang berharga dari perjuangan 1945, kami anggap Sedjarah merupakan wahana yang paling effectif. Suatu kurikulum sedjarah yang integral bagi seluruh ABRI, yang disusun setjara sistematis mulai dari atas, apalagi yang diperlengkapi dengan text—booknya yang sesuai, akan dapat memberikan landasan bagi semangat perjuangan 1945 yang mudah-mudahan dapat berlangsung untuk selamanya. Dengan demikian djelas, bahwa Projek Text—Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini tidak dimaksudkan sebagai suatu usaha routine belaka, melainkan sebagai suatu usaha historis—kreatif yang dapat ikut menentukan wajah ABRI untuk masa—masa yang mendatang.

Hambatan—hambatan bagi terlaksananya Projek Text—Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini tidaklah ketjil. Pertamakali kami menjadari, bahwa projek text—book sedjarah yang disusun setjara konsepsionii dan integral sematjam ini, barulah untuk pertama kalinya ini diadakan dalam kehidupan Republik Indonesia. Untuk pendidikan umum sekalipun, belum pernah diadakan penjurusan text—book sedjarah setjara sistematis dan integral. (Baru dua tahun sesudah dilantjarkan Projek Text—Book Sedjarah HANKAM/ABRI ini, kami mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan & Kebudayaan Mashuri supaja diadakan penulisan text—book sedjarah nasional bagi pendidikan umum mulai dari Sekolah Dasar sampai kepada Perguruan Tinggi, karenakinisarananya nampak lebih tersedia berupa tenaga ahli dan dana. Usul itu beliau terima baik dan pada achir tahun 19 ) telah mulai dilaksanakan oleh Panitia Penjurusan Buku Standard Sedjarah Nasional Indonesia).

Kedua kalinya kami menjadari, bahwa tenaga—tenaga yang memiliki keahlian yang sama besarnya pada bidang sedjarah dan sekaligus pada bidang HANKAM adalah sangat langka. Diantara tenaga yang sangat sedikit djumlahnya yang kebetulan menguasai kedua bidang itu dengan tjukup, lebih sedikit lagi yang menguasai kemahiran mengarang. Sehingga dapat dibayangkan, betapa sulitnya untuk menjusun suatu team yang terdiri dari tenaga—tenaga yang mempunyai kemampuan pada tiga bidang sekaligus, yakni bidang sedjarah, bidang HANKAM dan bidang mengarang. Achirnya telah tersusun suatu team yang anggota—anggotanya sedikit—banjak memenuhi tiga sjarat tersebut lagi pula representatif bagi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Karena besarnya tanggungjawab yang harus dipikul, maka team pelaksana Projek Penulisan Text—Book Sedjarah HANKAM/ABRI itu diketuai Kepala Pusat Sedjarah ABRI (dulu Lembaga Sedjarah HANKAM) sendiri dengan kepala—kepala Dinas/Biro. Sedjarah Angkatan dan POLRI sebagai wakilnya. (Ketjuali Angkatan Darat yang karena kesulitan protokolier menundjuk seorang perwira lain).

Dalam kenyataannya, pelaksanaan Proyek itu berlangsung lebih dari 2 tahun, mulai tanggal 1 Djuli 1969 hingga kepada tanggal 1 Maret 1972. Sesungguhnya waktu itu terlalu lama untuk sesuatu crash program sematjam ini. Tetapi hal itu tak dapat dihindarkan karena semua anggota team adalah pedjabat yang tidak dibebaskan dari tugasnya, sehingga setiap saat dapat diperintahkan untuk melaksanakan tugas lain. Segalanya itu menundjukkan betapa besar kesulitan-kesulitan yang harus diatasi, sebelum 24 djudul ini dapat turun dari pers dalam bentuk buku dan dipersembahkan kepada masjarakat. Kami menjadari, bahwa hasilnja adalah djauh dari memuaskan, tetapi merupakan hasil maksimal mengingat kondisi yang njata.

Seri ini terbagi atas empat kelompok : Kelompok A mengandung buku untuk LEMHANNAS, kelompok B untuk SESKO--SESKO, kelompok C untuk lembaga--lembaga pendidikan landjutan perwira ( SUSLAPA, SEKUAL, SEKKAU, PTIK ) dan kelompok D untuk AKABRI. Sudah barangtentu pengelompokan itu disesuaikan dengan kurikulum yang setjara resmi telah diterima baik oleh semua lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Semoga para pembina pendidikan perwira ABRI dapat menggunakan text--book -- text--book ini sekaligus mengembangkannya sehingga dari waktu--kewaktu dapat dilakukan penjempurnaan dan penulisan kembali berupa edisi--edisi baru.

Djakarta, 1 Maret 1971.  
KEPALA PUSAT SEDJARAH ABRI



DRS. NUGROHO NOTOSUSANTO  
KOLONEL TIT.





## DAFTAR ISI

### PRAKATA

### PENGANTAR UMUM

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	Persoalan-persoalan Di sekitar Sengketa Irian Barat .....	1
	Usaha-usaha Penyelesaian Sengketa Irian Barat secara langsung .....	6
	Perjuangan Irian Barat di Forum Internasional .....	10
	Konfrontasi di bidang Politik dan Ekonomi .....	14
	Persiapan-persiapan dalam rangka Konfrontasi Militer ..	21
<b>BAB II</b>	<b>TRI KOMANDO RAKYAT DAN PEMBENTUKAN KOMANDO MANDALA PEMBEBASAN IRIAN BARAT</b> ..	25
	Tri Komando Rakyat .....	27
	Kekuatan Angkatan Bersenjata Belanda di Irian Barat ..	30
	Dasar-dasar Pertahanan Belanda di Irian Barat .....	34
	Pertempuran Laut Arafuru .....	37
	Konsep GKS tentang Operasi Pembebasan Irian Barat ..	40
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat .....	47
	Pembentukan Pos-Pos Komando .....	51
<b>BAB III</b>	<b>OPERASI-OPERASI INFILTRASI</b> .....	54
	Kegiatan Kelompok Gerilyawan .....	54
	Infiltrasi Intelijen Menjelang Pembentukan Komando Mandala .....	55
	Infiltrasi pada masa Komando Mandala .....	58

Kegiatan-kegiatan Tempur Unsur-unsur Laut . . . . .	60
Pembentukan Kesatuan-kesatuan Tempur Udara . . . . .	63
Operasi-operasi Infiltrasi dari Udara . . . . .	65
<b>BAB IV OPERASI JAYAWIJAYA DAN PENYERAHAN PEMERINTAHAN IRIAN BARAT . . . . .</b>	<b>73</b>
Kegiatan Diplomatik dan Militer Menjelang Operasi Jayawijaya . . . . .	73
Rencana dan Persiapan Operasi Jayawijaya . . . . .	76
Percaturan Diplomatik sampai tercapainya Persetujuan New York . . . . .	82
Kegiatan-kegiatan Operasi sesudah Persetujuan New York.	85
Peranan Unsur-unsur Militer dan Diplomasi pada Pembebasan Irian Barat . . . . .	87
<b>P E N U T U P . . . . .</b>	<b>89</b>
Daftar Perpustakaan . . . . .	93.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. PERSOALAN-PERSOALAN DI SEKITAR SENKETA IRIAN BARAT

Masalah Irian Barat sebagai pangkal sengketa antara Indonesia dan Belanda secara resmi baru timbul pada akhir tahun 1949. Pada masa itu justru sedang dilakukan usaha-usaha yang giat untuk mencarikan jalan ke luar melalui perundingan guna memecahkan sengketa politik antara kedua belah pihak, dengan perantaraan badan internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah melampaui masa-masa pasang-surut gelombang perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia semenjak Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka tekad untuk diakui sebagai bangsa yang merdeka makin mendapatkan simpati dunia. Kebulatan hati bangsa Indonesia dengan tegas telah disebutkan dalam kata-kata Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana antara lain disebutkan: "Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".<sup>1</sup>

Pengertian tentang seluruh tumpah darah Indonesia ialah keutuhan wilayah Indonesia tanpa mengecualikan salahsatu bagiannya, termasuk daerah Irian Barat. Sedangkan pihak Belanda waktu itu mempunyai pandangan lain, yakni mencoba memberi status tersendiri kepada Irian Barat, terpisah dari wilayah bekas Hindia Belanda selebihnya.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 kedua belah pihak yang bersengketa bersedia untuk berunding dalam suatu Konperensi Meja Bundar, yang dilangsungkan di kota Den Haag, Negeri Belanda. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil-wakil Republik dan Federal, berhadapan dengan delegasi Belanda. Komisi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, UNCI (United Nations Commission for Indonesia) bertindak sebagai pengawas bagi kelangsungan dan kelancaran perundingan tersebut.

Menurut paham delegasi Indonesia masalah kedaulatan Irian Barat telah tercakup dalam pengertian tentang kesediaan Pemerintah Belanda untuk menyerahkan dan mengakui kedaulatan atas seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat. Hal ini sesuai dengan pasal pertama Perjanjian Konperensi Meja Bundar yang menyebutkan tentang penyerahan kedaulatan

---

<sup>1</sup> H. Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid II, 1960, halaman 32.

Indonesia dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut lagi serta mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Baik wakil-wakil Republik maupun Federasi mempunyai pendirian yang sama tentang pengertian tidak terpisahnya wilayah Irian Barat sebagai bagian yang integral dari Indonesia.

Di pihak lain dapat diikuti jejak-jejak ke arah mana kemauan dan pendirian Pemerintah Belanda waktu itu yang jelas bertentangan dengan aspirasi-aspirasi hak menentukan nasib sendiri (self determination) Bangsa Indonesia dalam kesatuannya yang bulat. Sejak berlangsungnya Perundingan Linggarjati sebagai salahsatu usaha mengatasi sengketa politik Indonesia dengan Belanda, dan persetujuannya telah ditandatangani oleh kedua wakil perutusan pada tanggal 15 Nopember 1946, Pemerintah Belanda sudah mulai berusaha menjajagi kemungkinan penguasaan wilayah Irian Barat. Pendirian Pemerintah Belanda telah diucapkan oleh Menteri Jonkman di muka Parlemen Belanda pada tanggal 10 Desember 1946, khususnya menyangkut pasal-pasal 3 dan 4 Perjanjian Linggarjati<sup>2</sup>. Dalam hubungan ini mereka menghendaki agar "West Nieuw Guinea" dapat memperoleh kedudukan tersendiri terhadap kerajaan Belanda susunan baru dan Negara Indonesia Serikat, meskipun mungkin penduduk asli sukar untuk menyatakan pendapatnya. Juga patut dilakukan penyelidikan tentang kemungkinan pemindahan orang dalam jumlah besar, terutama tempat penampungan bagi orang Belanda di Indonesia, yang menghendaki hidup dalam susunan pemerintahan sendiri<sup>3</sup>. Jadi gagasan kemungkinan mengadakan kolonisasi khusus bagi orang-orang Belanda yang berasal dari daerah Indonesia untuk menetap dan membina Pemerintahan sendiri, telah mulai dicetuskan.

Usaha memisahkan wilayah Irian Barat dari Indonesia juga terlihat dalam Konperensi Denpasar yang diprakarsai Pemerintah Belanda, dan yang bertujuan untuk memecah-belah Indonesia dengan pembentukan Negara Indonesia Timur. Hasil Konperensi yang berlangsung pada tanggal 7 s/d 24 Desember 1946 telah ditandatangani oleh wakil-wakil daerah di Indonesia Timur kecuali Irian Barat. Tentang hal ini Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook menjelaskan bahwa Pemerintah Belanda menganggap kurang pada tempatnya penyertaan "West Nieuw Guinea" dalam Konperensi ini dengan perwakilan yang tidak sewajarnya. Pendugaan perasaan rakyat masih memerlukan waktu. Selain itu dianggapnya lebih tepat untuk tidak mengikatkan suatu daerah yang dianggapnya tidak bersifat Indonesia menjadi suatu Negara Bagian Indonesia. Daerah itu akan dijadikan suatu

---

<sup>2</sup> Robert C. Bone Jr, *The Dynamic of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, Cornell University, 1960, Ithaca, halaman 31.

<sup>3</sup> Panitia Buku Kenangan, *Komando Mandala dalam Pembebasan Irian Barat*, 1963 halaman 189.

daerah istimewa yang kemudian menggabungkan diri kepada Negara Indonesia Serikat atau Kerajaan Belanda atau Uni Indonesia - Belanda.<sup>4</sup>

Kemudian timbul perdebatan-perdebatan menanggapi keterangan van Mook yang meragukan itu; sejumlah peserta Konperensi meminta penjelasan-penjelasan. Atas desakan-desakan tersebut Pemerintah Belanda menyatakan pendirian resminya yang menyatakan bahwa sesungguhnya bukan sekali-kali pemerintah (Belanda) bermaksud mengecualikan "West Nieuw Guinea" di luar Indonesia, akan tetapi untuk menyelidiki dengan seksama cara bagaimana memasukkannya dengan layak ke dalam bingkai Negara Indonesia Serikat.<sup>5</sup> Jelaslah maksud Pemerintah Belanda ingin mendesak kepentingan sendiri dalam hal kemungkinan untuk tetap dapat mempertahankan sebagian dari wilayah bekas jajahannya. Disamping itu tidak bisa diabaikan kehendak sebagian besar peserta Konperensi Denpasar, yang terungkap dalam mosi Najamuddin, yang menghendaki Irian Barat merupakan suatu bagian Negara Indonesia Timur.<sup>6</sup>

Kehendak untuk memisahkan Irian Barat dari Wilayah Indonesia lainnya yang diselubungi dengan berbagai alasan, ternyata terungkap juga ketika Pemerintah Belanda pada tanggal 6 Pebruari 1947 memasukkan wilayah Irian Barat dalam suatu persetujuan pembentukan South Pacific Commission. Organisasi tersebut berkedudukan di Noumea, beranggotakan negara-negara yang banyak berhubungan dengan daerah-daerah yang belum berpemerintahan sendiri (non selfgoverning territories), yang terletak di Samudera Pasifik sebelah selatan Khatulistiwa. Apabila memang ada kesungguhan Pemerintah Belanda untuk memasukkan Irian Barat dalam Negara Indonesia Serikat, maka hal itu merupakan tindakan yang aneh. Semenjak itu Pemerintah Belanda telah mencoba meyakinkan pada dunia, bahwa Irian Barat seakan-akan merupakan daerah yang tidak berpemerintahan sendiri dengan penduduknya yang masih sangat terbelakang tingkat kebudayaannya.

Pendirian Pemerintah Belanda sendiri sebetulnya tidak tetap. Meskipun ada kehendak untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia, tetapi ada kenyataan-kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, yang justru menunjukkan bahwa wilayah Indonesia meliputi daerah Irian Barat. Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1948, menyebutkan dalam salahsatu pasalnya, bahwa Kerajaan Belanda meliputi wilayah-wilayah Nederland, Indonesia, Suriname dan Antillen Belanda, tanpa menyebutkan Irian Barat secara tersendiri dalam urutan tersebut, yang berarti bahwa secara emplitis Belanda me-

---

4 Panitia Buku Kenangan, *log.cit.*

5 Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 190.

6 Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 37.

ngakui bahwa Indonesia meliputi wilayah Irian Barat. Penegasan yang bernada sama diberikan dengan pernyataan Ratu Belanda pada tanggal 3 Pebruari 1948 yang menyatakan bahwa Belanda akan mengakui dengan segera kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda.<sup>7</sup>

Meskipun janji itu sendiri diingkari oleh Pemerintah Belanda, tetapi dalam kenyataan itu telah tersimpul penegasan tentang tidak terpisahnya wilayah Irian Barat dari Indonesia yang merupakan keseluruhan bekas Hindia Belanda. Pengakuan demikian juga kemudian diucapkan oleh Ketua Perutusan Belanda pada Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Desember 1948, segera setelah Aksi Militer II Belanda dilancarkan, yang mendapat kecaman dari sebagian besar pendapat dunia. Dalam pernyataan tersebut van Royen menyatakan, bahwa sejak semula pertikaian Indonesia - Belanda tidaklah mempersoalkan Indonesia akan merdeka atau tidak. Semua pihak akan setuju, apa yang dahulunya Hindia Belanda harus menjadi suatu negara yang merdeka secepat mungkin.

Demikianlah ketika perbincangan mengenai status Irian Barat sebagai acara terakhir dalam Konperensi Meja Bundar diajukan, ternyata ada perbedaan pendapat yang besar. Delegasi Belanda berpendapat bahwa Irian Barat harus mendapatkan suatu status yang khusus, karena tidak mempunyai hubungan-hubungan ethnologis, sosiologis maupun agama dengan bagian Indonesia lain. Daerahnya masih terbelakang dan tidak mempunyai hubungan ekonomis yang esensial dengan wilayah Indonesia lain. Dengan demikian Irian Barat harus berada di luar Negara Indonesia Serikat nantinya, dan mempunyai hubungan politik secara khusus dengan Kerajaan Belanda, yang akan diperintah sesuai dengan Piagam PBB dengan mengusahakan kemajuan melalui pendidikan rakyatnya dan memperkembangkan ekonominya.

Delegasi Indonesia tetap berpendapat bahwa Irian Barat harus diintegrasikan menjadi bagian Indonesia Timur di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat dengan alasan-alasan bahwa selama ini telah terjalin hubungan-hubungan ethnologis, ekonomis dan agama dengan bagian Indonesia lain. Persetujuan Linggarjati maupun Renville menetapkan bahwa kedaulatan akan diserahkan atas seluruh wilayah yang dahulunya bernama Hindia Belanda. Negara Indonesia Serikat termasuk Indonesia Timur sebagai salahsatu bagiannya dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan Piagam PBB dengan memberikan hak otonomi pada daerah-daerah secara bertahap.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, *Djalannya Revolusi Indonesia membebaskan Irian Barat*, 1963, halaman 54.

<sup>8</sup> Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 57.

Mendekati berakhirnya KMB pada tanggal 2 Nopember 1949, barulah didapat formulasi persetujuan khusus mengenai Irian Barat sebagai berikut:

- a. Disebabkan hal persesuaian antara pendirian masing-masing pihak tentang Irian Barat belum dapat dicapai, sehingga soal itu masih menjadi pokok pertikaian.
- b. Disebabkan keharusan KMB berakhir dengan hasil nyata pada tanggal 2 Nopember 1949.
- c. Mengingat faktor-faktor penting yang harus diperhatikan pada pemecahan masalah Irian Barat.
- d. Mengingat singkatnya waktu penyelidikan yang dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal-soal yang bersangkutan dengan masalah Irian Barat itu.
- e. Mengingat sukarnya tugas kewajiban yang akan dihadapi dengan segera oleh peserta Uni.
- g. Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin timbul diselesaikan dengan patut dan rukun.

Maka status-quo karesidenan Irian Barat tetap berlaku dan ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah kedudukan Kenegaraan Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dan Kerajaan Belanda.<sup>9</sup>

Dalam surat-menyurat antara kedua delegasi ditegaskan, bahwa baik Indonesia maupun Belanda mempunyai tafsiran sama mengenai kata-kata "status-quo karesidenan Irian Barat tetap berlaku", yang berarti "dengan melanjutkan kekuasaan Pemerintahan Kerajaan Belanda atas Karesidenan Irian Barat". Pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan mengapa delegasi Indonesia bersedia menandatangani persetujuan yang memuat ketentuan seperti tersebut di muka ialah karena adanya batasan waktu yang mengharuskan KMB berakhir dengan berhasil pada permulaan November 1949. Keadaan di Indonesia akan kembali menjadi eksplosif apabila belum juga tercapai hasil yang definitif pada permulaan Nopember 1949.<sup>10</sup> Sifat toleransi bangsa Indonesia yang dengan tulus ikhlas ingin menyelesaikan sengketa dengan Pemerintah Belanda dan sejauh mungkin menghindarkan jalan buntu, dapat dipakai sebagai alasan oleh Belanda untuk menggagalkan seluruh persetujuan yang telah dapat dicapai selama hampir dua setengah bulan, andaikata masalah Irian Barat tidak disisihkan.

---

<sup>9</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 192.

<sup>10</sup> TB Simatupang, *Laporan dari Banaran*, 1961, halaman 233.



Dalam perundingan-perundingan Konperensi Meja Bundar, disamping persoalan-persoalan pelik di bidang keuangan dan pertahanan-keamanan, maka persoalan Irian Barat juga merupakan salahsatu perintang utama sampai pada hari-hari terakhir. Rupanya delegasi Belanda diharuskan untuk tidak berkisar dari pendirian semula, karena adanya suara-suara bahwa Parlemen Belanda tidak akan memberikan persetujuannya apabila Irian Barat juga harus diserahkan kepada Indonesia. Sebagian dari partai-partai politik Belanda tidak akan dapat membenarkan tindakan tersebut, sehingga akan mustahil mendapat kelebihan dua-pertiga suara Parlemen Belanda sebagai persyaratan dapat disahkannya Persetujuan KMB tersebut.

Maka atas saran-saran pihak UNCI yang berusaha keras menembus kemungkinan jalan buntu, dapat dihasilkan suatu rumusan untuk sementara tetap membiarkan Irian Barat di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda dengan ketentuan sampai akhir satu tahun, penentuan status politik Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan langsung antara Indonesia dan Belanda. Meskipun dengan berat hati akhirnya delegasi Indonesia dapat menerima ketentuan-ketentuan tersebut dengan tuntutan agar dalam rumusan terakhir dengan jelas dicantumkan bahwa status Irian Barat tetap dalam keadaan sengketa.<sup>11</sup>

## 2. USAHA—USAHA PENYELESAIAN SENGKETA IRIAN BARAT SECARA LANGSUNG

Sesuai dengan bunyi KMB pula, maka kemudian dilakukan usaha-usaha untuk mencari pemecahan persoalan status Irian Barat melalui perundingan langsung antara Indonesia dan Belanda. Perundingan tersebut dilakukan dalam hubungan Uni Indonesia — Belanda, yang kedua anggotanya sama derajat kedudukannya sebagai negara merdeka, dengan mengadakan rapat Uni dua kali setiap minggu.

Dalam suatu konperensi antara Menteri-Menteri Uni kedua Negara yang diadakan pada tanggal 25 Maret 1950 sampai 1 April 1950 di Jakarta, mulailah diambil langkah-langkah pertama untuk mencoba memecahkan masalah Irian Barat. Sebagai salahsatu di antara rangkaian acara yang membicarakan mengenai Irian Barat, konperensi tersebut memutuskan untuk membentuk Komisi Gabungan dengan tugas peninjauan ke Irian Barat. Komisi ini diharapkan akan menyelesaikan laporan kepada Uni dalam waktu 3 bulan, sebagai bahan perundingan penyelesaian masalah Irian Barat pada rapat Uni berikutnya. Laporan dari Komisi Gabungan yang masuk pada bulan Agustus 1950 telah mencerminkan, bahwa pendekatan terhadap perbedaan pendapat kedua belah pihak tidak ada samasekali.

---

<sup>11</sup> TB Simatupang, *op.cit.*, halaman 246.

Masing-masing bagian komisi membuat laporan sendiri secara terpisah.

Pihak Indonesia mengajukan, bahwa Indonesia-lah yang paling beralasan kuat mengenai haknya atas Irian Barat. Tuntutan ini terutama lebih ditujukan untuk kepentingan penduduk Irian Barat sendiri. Sedangkan kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut merupakan kekuasaan kolonial, yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan Belanda sendiri dan tidak untuk kepentingan rakyat Irian Barat. Selain itu keadaan alamiah Irian Barat sebagai bagian Indonesia dapat dikuatkan dengan alasan-alasan sejarah, ekonomi, politik ataupun strategis yang menjelaskan bahwa penyempurnaan kebulatan wilayah Indonesia berarti menguatkan negara demokrasi Indonesia yang dibutuhkan oleh dunia internasional. Sebaliknya pihak Belanda mengajukan pendapat, bahwa penyerahan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia dianggap bertentangan dengan kepentingan penduduk aslinya. Alasannya ialah apabila penyerahan dilakukan demikian saja, maka hak untuk menentukan nasib sendiri penduduk asli telah diabaikan. Sekiranya mereka akar memilih Indonesia - hal mana sangat disangsikan - maka penyerahan demikian hanya didasarkan pada pernyataan dari seperempat dari jumlah penduduk yang berada di kota-kota saja, yang telah termasuk dalam jangkauan pemerintahan. Dengan demikian tidaklah dapat diwakili suara seluruh penduduk Irian Barat. Maka bangsa Papua tanpa diberi kesempatan untuk mempergunakan hak menentukan nasib sendiri, untuk selama-lamanya akan dirampas dari kemungkinan untuk mempergunakan hak tersebut dengan cara yang tak bertanggungjawab.

Dengan kata lain pemerintah Belanda menganggap bahwa hadirnya kekuasaan Belanda di wilayah itu adalah mutlak perlu, sedangkan hak menentukan nasib sendiri bagi penduduk asli akan dilangsungkan setelah seluruh penduduk Irian Barat dimungkinkan untuk ikut serta mempergunakan haknya berhubung tingkat budayanya masih terbelakang sekali. Belanda malahan menganggap juga bahwa Indonesia sendiri sebagai negara yang masih termasuk terbelakang tidak mempunyai cukup biaya dan tenaga untuk memajukan Irian Barat. Pendirian Pemerintah Belanda yang mutlak juga tercermin dalam keterangan Menteri Urusan Uni dan Seberang Lautan Belanda, Mr. van Maarseveen di Majelis Tinggi Belanda, bahwa sehabis satu tahun perundingan, Irian Barat harus tetap di bawah kerajaan Belanda, demi kepentingan penduduk Irian Barat sendiri.<sup>1,2</sup>

Sementara itu terjadi perubahan-perubahan ketatanegaraan Indonesia dari bentuk federal kembali ke bentuk *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, yang diresnukan pada tanggal 17 Agustus 1950. Menjelang masa tenggang satu tahun hampir habis, tanpa adanya perkembangan dalam pembicaraan status

---

<sup>12</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 194-195.

Irian Barat, maka Pemerintah Indonesia mengusahakan adanya perundingan, yang sebetulnya menurut rencana sudah harus dilakukan pada pertengahan Oktober 1950. Perundingan khusus mengenai Irian Barat ini dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 di Den Haag. Tetapi karena pendirian kedua belah pihak terlalu jauh, maka perundingan selalu dibayangi jalan buntu. Suatu usul yang kemudian diajukan oleh Indonesia untuk usaha penyelesaian masalah Irian Barat yang berisi tindakan penyerahan wilayah tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan Republik Indonesia, adalah dengan memberikan imbalan berupa konsesi-konsesi yang luas sekali kepada Pemerintah Belanda. Konsesi tersebut meliputi eksplotasi bahan tambang dan hasil hutan serta jaminan terhadap modal yang diusahakan Belanda terutama di bidang perdagangan, perhubungan laut dan industri.<sup>13</sup>

Tetapi usul tersebut ternyata ditolak Pemerintah Belanda, yang tetap ingin menjalankan kekuasaan sampai hak menggunakan nasib sendiri penduduk Irian Barat dapat dilaksanakan. Suatu usul balasan kemudian diajukan dengan penempatan kedaulatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia - Belanda. Usul ini jelas ditolak oleh Indonesia, karena kalau demikian Belanda hakekatnya ingin mengajak Indonesia untuk bersama-sama menjajah Irian Barat, ataupun Indonesia mengizinkan dan mengesahkan Belanda melanjutkan penjajahan di atas wilayah Indonesia,<sup>14</sup> sedangkan Uni tersebut tidak mempunyai suatu kedudukan tersendiri sebagai sebuah negara atau gabungan negara yang dapat diperlengkapi dengan kedaulatan. Pada akhir perundingan dikeluarkan pernyataan: bahwa Indonesia sebagai sebuah negara atau gabungan negara yang dapat diperlengkapi dengan kedaulatan. Pada akhir perundingan dikeluarkan pernyataan: bahwa Indonesia tetap menuntut atas Irian Barat sebagai bagian wilayah Indonesia dan bahwa status Irian Barat seperti disebutkan dalam Perjanjian KMB, mulai saat itu dilangsungkan tanpa persetujuan Indonesia.

Kemungkinan-kemungkinan penyelesaian dengan perundingan langsung masih juga diusahakan lagi, dengan pembicaraan-pembicaraan tidak resmi tentang perubahan-perubahan hubungan Uni Indonesia - Belanda untuk diganti menjadi hubungan biasa antara dua negara berdaulat mulai bulan Agustus 1951. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan resmi bulan Desember 1951 tentang pembatalan Uni, perjanjian KMB dan Irian Barat. Sementara itu ada saran yang mengusulkan tentang adanya pemerintahan bersama di Irian Barat, pihak Indonesia hanya memikul tugas-tugas administrasi, sedangkan pihak Belanda mengurus soal-soal pertahanan-keamanan dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan. Usul inipun rupanya tidak mendapat sambutan dari kedua belah pihak.

---

<sup>13</sup> George Mc Kahin, *Indonesian Politics and Nationalism*, 1953, halaman 166.

<sup>14</sup> Komisi Gabungan Bagian Komisi Indonesia, *Penyelesaian Persengketaan Irian Barat*, Scheveningen, 1950, halaman 104 - 105.

Pihak Belanda kemudian mengusulkan agar sengketa Irian Barat ini diajukan saja kepada Mahkamah Internasional di Den Haag untuk mendapatkan keputusannya. Hal ini ditolak oleh Indonesia yang berpendirian, bahwa persoalan Irian Barat bukan semata-mata soal hukum (juridis), melainkan persoalan politik. Maka tidak ada wewenang samasekali bagi Mahkamah Internasional untuk ikut mencampuri persoalannya.

Sementara status wilayah Irian Barat masih dalam persengketaan, Pemerintah Belanda telah mengambil suatu tindakan yang tidak simpatik. Pada pertengahan bulan Agustus 1952 dengan persetujuan Parlemen Belanda, wilayah Irian Barat dengan resmi dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Belanda. Hal ini dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Dasar Belanda, yang semula mencantumkan nama Indonesia dalam urutan wilayah Kerajaan Belanda, digantikan dengan "Nederlands Nieuw Guinea" pada pasal yang memuat tentang pembatasan Kerajaan tersebut<sup>15</sup>. Tentang hal ini sikap Pemerintah Belanda telah dinyatakan di muka Parlemen Belanda pada tanggal 29 Oktober 1952, bahwa Pemerintah Belanda tidak melihat manfaat apapun untuk memulai kembali perundingan dengan Indonesia mengenai status Irian Barat. Pendirian tersebut ialah bahwa tentang hak-hak kedaulatan atas wilayah berdasarkan hukum, dalam kenyataan oleh Negeri Belanda dan sama sekali tidak ada alasan baginya untuk melepaskan atau membatasinya.<sup>16</sup>

Pemerintah Indonesia sekali lagi masih mengusahakan adanya suatu kemungkinan perundingan untuk memecahkan sengketa Irian Barat. Hal ini dilakukan melalui saluran Kedutaan Besar RI di Kerajaan Belanda pada bulan September 1952. Usaha ini lebih bersifat menjajagi perkembangan sikap Pemerintah Belanda. Karena ternyata perbedaan pandangan tetap masih jauh antara kedua pihak, usaha untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dengan secara langsung kali inipun tidak membawa hasil.

Atas sikap-sikap yang keraskepala yang diperlihatkan Belanda tersebut tampak kurangnya diambil tindakan yang setimpal dari pihak Indonesia, yang telah menimbulkan pelbagai reaksi spontan di kalangan Rakyat Indonesia. Tuntutan-tuntutan diajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pemboikotan ekonomi dan perdagangan dari perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.<sup>17</sup> Bahkan ada perasaan kesal terhadap sikap pemerintah yang nampak masih terlalu lemah menghadapi persoalan Irian Barat ini. Kelemahan Pemerintah Indonesia pada waktu itu disebabkan pertimbangan karena sedang mengadakan konsolidasi Angkatan Perang dan keamanan dalam negeri.

---

<sup>15</sup> Baharuddin Lopa SH, *op.cit.*, halaman 58 dan Robert R.C. Bone, *op.cit.*, halaman 113-114.

<sup>16</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 198.

<sup>17</sup> Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 88.

Adalah menarik perhatian, bahwa tindak-balasan pertama yang diambil oleh Pemerintah Indonesia ternyata yang berhubungan dengan bidang kemiliteran, meskipun masih sangat terbatas. Sejak tanggal 21 April 1953, Misi Militer Belanda sebagai salahsatu perlengkapan Persetujuan Konperensi Meja Bundar, telah dihapuskan. Memang secara resmi karena alasan sudah tidak dibutuhkannya lagi misi tersebut, yang menjalankan tugas sebagai penasehat di bidang teknis militer. Tetapi pertimbangan-pertimbangan pertahanan-keamanan Indonesia sendiri umumnya lebih memberikan alasan-alasan untuk pengambilan tindakan tersebut. Misi tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab keterlibatan Belanda dengan pemberontakan-pemberontakan Westerling, Makasar dan Maluku Selatan.<sup>18</sup>

Sampai demikian jauh tidak terlihat pergeseran pendirian Pemerintah Belanda, mengapa Belanda ingin tetap mempertahankan Irian Barat di bawah kekuasaannya. Pada mulanya diharapkan bahwa Irian Barat dapat dipakai sebagai tempat bernaung bagi golongan Indo-Belanda sebagai tanahair baru mereka, setelah merasa tersisihkan dari lingkungan Indonesia, meskipun sejak semula diragukan apakah Irian Barat dapat memenuhi syarat tersebut. Alasan kemudian beralih pada persoalan hak menentukan nasib sendiri bagi penduduk asli Irian Barat, yang dianggapnya harus dijamin sepenuhnya meskipun tanpa menunjuk tanggal pasti kapan dilaksanakan.<sup>19</sup>

### 3. PERJUANGAN IRIAN BARAT DI FORUM INTERNASIONAL

Setelah selama tiga tahun perundingan langsung dengan Belanda mengenai sengketa Irian Barat ternyata gagal, maka dicoba dengan jalan lain. Untuk memenuhi aspirasi nasional ini masih tetap dipakai cara berunding, tetapi diusahakan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diharapkan melalui forum ini Pemerintah Belanda akan dapat diinsafkan atas sikapnya yang tidak wajar selama ini, untuk mentaati perjanjian dengan mengadakan perundingan lagi dengan Indonesia.<sup>20</sup>

Pada sidang ke-IX Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibuka pada bulan September 1954, untuk pertama kali Pemerintah Indonesia mengajukan masalah Irian Barat, dengan suatu rancangan resolusi yang berisi supaya Pemerintah-Pemerintah Belanda dan Indonesia segera mulai kembali berunding. Pendirian kedua belah pihak yang juga menjadi bahan-bahan perdebatan pada sidang umum ke-IX dan ke-XII Majelis Umum PBB tersimpul sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Information Office Republik of Indonesia, *Report on Indonesia*, 1950, halaman 5 dan R.C. Bone, *op.cit.*, halaman 90.

<sup>19</sup> DEPPEN, *Pembebasan Irian Barat, Kumpulan Pidato dan Keterangan mengenai Perjuangan Pembebasan Irian Barat 17/8/-60 - 17/8/-62*, 1962, halaman 130.

<sup>20</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi II*, 1964, halaman 212 - 213.

a. *Pihak Indonesia*

1. Irian Barat adalah merupakan bagian integral Indonesia.
2. Sesuai dengan uraian Dr. Van Royen di Dewan Keamanan PBB tahun 1948, bahwa Indonesia paling tidak terdiri atas 17 golongan ethnik dan linguistik dengan ikatan persatuan nasionalisme dan persatuan bahasa, sehingga perbedaan rasial antara penduduk Irian Barat dengan penduduk daerah lainnya tidak dapat dipakai sebagai ukuran.
3. Gerakan-gerakan kemerdekaan di Irian Barat ditekan dengan kekerasan.
4. Kekuasaan Belanda seperti juga pada masa-masa lalu tidak banyak berbuat untuk kemajuan-kemajuan ekonomi dan sosial di Irian Barat.
5. Ucapan Dr. van Mook di Konperensi Den Pasar (1946) yang mengatakan tidak ada niatan untuk mengeluarkan Nieuw Guinea Barat dari Indonesia.
6. Persetujuan-persetujuan Linggarjati dan Renville menerima pendirian dasar bahwa Nederlands Oost Indie secara keseluruhannya akan dijelmakan dalam suatu negara Indonesia yang merdeka.
7. KMB adalah suatu kompromi sementara dalam hal penundaan masalah kedaulatan.
8. Pada tahun-tahun 1950, 1951 dan 1952 Indonesia telah berusaha untuk merundingkan masalah itu, tetapi setiap kali ditolak seperti juga yang diadakan pada tahun 1954 ini dalam rangka pembubaran Uni Indonesia - Belanda.
9. Indonesia mencari jalan pemecahan secara damai dan tidak meminta PBB untuk pemecahan segera. Ia hanya minta agar diadakan perundingan kembali dengan anjuran dan dorongan PBB.

b. *Pihak Belanda.*

1. Perhatian Belanda yang terutama ialah demi kesejahteraan penduduk asli yang primitif yang membutuhkan masa perwalian selama diperlukan.
2. Belanda tidak menyetujui interpretasi Indonesia tentang penyerahan kedaulatan dalam KMB.
3. Berbagai Konperensi yang diadakan sejak tahun 1949 selalu gagal berhubung ketidak-sediaan Indonesia untuk berkompromi.
4. Belanda merasa berkewajiban memerintah di "West Nieuw Guinea" berdasarkan Piagam PBB tentang pemerintah perwalian.
5. Dalam persoalan "West Nieuw Guinea", Pemerintah Belanda berulang kali mengatakan, bahwa dibutuhkan waktu secukupnya

untuk dapat memberikan kesempatan penentuan hari depannya sendiri.<sup>21</sup>

Setelah melalui perdebatan-perdebatan, kemudian timbul amandemen yang lebih lunak. Perumusan terakhir menyebutkan bahwa PBB "menyatakan harapan" agar supaya kedua pemerintah Indonesia dan Belanda meneruskan usaha mereka guna menyelesaikan perselisihan yang ada antara kedua pihak selaras dengan azas-azas PBB. Tetapi ternyata suara mayoritas untuk persyaratan dapat diterimanya rancangan resolusi tersebut sebanyak dua pertiga dari jumlah anggota tidak dapat tercapai, meskipun di antara 60 anggota PBB sejumlah 34 suara menyatakan persetujuannya. Konstelasi kekuatan politik internasional pada waktu itu, dan belum terbentuknya secara nyata kekuatan negara-negara yang berpolitik bebas, telah disalahgunakan oleh Belanda untuk mempengaruhi pandangan sebagian negara-negara besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada masa Sidang Umum ke-X Majelis Umum PBB tahun 1955, Indonesia memperjuangkan lagi persoalan Irian Barat untuk masuk sebagai acara, yang diajukan oleh 15 negara Asia-Afrika. Perkembangan politik dalam negeri Indonesia sendiri rupanya menghasilkan perjuangan dalam bentuk yang agak berbeda, sehingga ada pendekatan-pendekatan lagi antara Indonesia dan Belanda untuk berhadapan langsung di meja perundingan. Perundingan dilakukan di Jenewa, di mana masalah Irian Barat dikaitkan dengan acara persoalan finansial ekonomi dalam rangka peninjauan kembali terhadap hubungan Indonesia - Belanda. Karena perkembangan ini maka PBB tidak mengadakan perdebatan pada Sidang Umum ke-X dan hanya mengambil resolusi yang mengharapakan agar perundingan Indonesia-Belanda tersebut dapat berhasil.<sup>22</sup>

Perundingan yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1955 ternyata hanya dapat membawa persoalan Irian Barat terbatas sebagai salahsatu acara saja, tanpa dapat dilakukan pembicaraan lebih lanjut. Keterbatasan mengenai persoalan ini telah ditentukan seperti tersebut dalam salahsatu ketentuan acara, yang telah disetujui bersama, ialah bahwa perundingan tentang beberapa persoalan mengenai Irian Barat, dengan pengertian bahwa berkenaan dengan kedaulatannya, tiap-tiap pihak mempertahankan pendiriannya masing-masing.<sup>23</sup> Kebijakanaksanaan yang diambil Pemerintah Indonesia pada waktu itu rupanya dianggap sebagai suatu tindakan yang maksimal dapat dilakukan. Paling tidak masalah Irian Barat dapat tetap diangkat sebagai masalah yang masih dipersengketakan antara kedua negara ini, yang secara implisit juga diakui oleh Belanda.

---

21 Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 128-129.

22 Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 141.

23 Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 202.

Yang jelas bahwa tidak ada perkembangan kemajuan penyelesaian masalah ini, juga sampai pada Sidang-Sidang Umum PBB pada waktu tahun-tahun berikutnya. Pada Sidang Umum ke-XI PBB diajukan lagi rancangan resolusi oleh 15 negara Asia-Afrika, yang meminta agar sidang menugaskan kepada Ketua Umum PBB untuk membentuk suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, terdiri dari 3 orang untuk membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalam perundingan dan menyelesaikan soal Irian Barat secara damai. Komisi tersebut diwajibkan memberikan laporan kepada Sidang Umum ke-XII PBB tahun 1957. Rancangan resolusi inipun kemudian mengalami kegagalan, karena tidak dapat mencapai duapertiga suara anggota PBB.

Pada pertengahan Agustus 1957 sekali lagi masalah Irian Barat diajukan sebagai acara Sidang Umum ke-XII PBB oleh 21 Negara anggotanya. Pada waktu itu Pemerintah Indonesia sudah mulai meragukan apakah benar-benar PBB merupakan tempat terbaik untuk pemecahan masalah Irian Barat, atau harus diambil jalan lain meskipun akan mengakibatkan bertambahnya ketegangan-ketegangan di Asia Tenggara.<sup>24</sup> Rancangan resolusi yang diajukan hampir sama dengan rancangan tahun yang lalu, hanya tidak menyebutkan lagi tentang Komisi Jasa-Jasa Baik, sehingga Ketua Majelis Umum PBB sendiri diminta sebagai perantara. Meskipun secara perhitungan mayoritas duapertiga telah memihak Indonesia, tetapi dalam pemungutan suara resmi rancangan resolusi tersebut tidak juga dapat mencapai duapertiga jumlah suara. Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan bahwa ia tidak akan membawa lagi persoalan Irian Barat ke muka Sidang Umum PBB. Terserah pada pihak Belanda untuk mengambil inisiatif selanjutnya, meskipun Indonesia tetap bersedia mencari penyelesaian secara damai.

Sedemikian jauh usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Indonesia selama 7 tahun untuk menyatukan wilayah kekuasaannya dengan jalan perundingan, tidak mendapat sambutan baik dari pihak Belanda. Maka timbullah suatu pemikiran baru untuk mencari cara lain dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, agar secepatnya wilayah tersebut dapat tergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka sejak Sidang Umum ke-XIII PBB tahun 1958 masalah Irian Barat tidak dicantumkan lagi dalam acara sidang. Pemerintah Indonesia lebih menitik beratkan usahanya mencari penyelesaian masalah ini, menurut cara yang pada dasarnya menggantungkan diri pada kekuatan Nasionalnya.<sup>25</sup> Penggalangan kekuatan nasional inilah yang kemudian menjelma menjadi politik konfrontasi Pembebasan Irian Barat, yang setiap tahun di-

---

<sup>24</sup> Robert C. Bone Jr., *op.cit.*, halaman 153.

<sup>25</sup> DEPPEN, *op.cit.*, halaman 133.



lakukan makin intensif di bidang politik, ekonomi dan militer. Akibat tekanan-tekanan ini kemudian Belanda mengadakan perubahan sikap, tetapi masih tetap bertentangan dengan gagasan penyatuan wilayah tersebut kepada Indonesia, ialah dalam rangka internasionalisasi dan dekolonisasi Irian Barat yang diajukannya dalam Sidang Umum ke XVI PBB tahun 1961.

Di bidang kegiatan politik International yang lain, perjuangan pembebasan Irian Barat masih terus diusahakan. Seirama dengan perkembangan negara-negara Asia-Afrika, telah diusahakan untuk menggalang kekuatan di antara negara-negara yang sedang berkembang sebagai imbang terhadap peruncingan ketegangan dunia. Aspirasi Nasional seperti halnya masalah Irian Barat lebih mendapatkan pengertian dalam forum Asia-Afrika ini. Pertemuan Persiapan Konperensi Asia-Afrika yang dihadiri oleh para Perdana Menteri Panca Negara: India, Pakistan, Sri Lanka, Birma dan Indonesia di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954 telah mengeluarkan pernyataan bersama, yang antara lain memberikan sokongan terhadap tuntutan Indonesia. Mereka menyatakan harapannya yang sungguh-sungguh agar pemerintah Belanda membuka kembali perundingan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan persetujuan yang dengan khidmat telah diadakan oleh mereka dengan Indonesia.<sup>26</sup>

Pernyataan bersama tersebut kemudian diperkuat dengan salahsatu keputusan Konperensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung tanggal 24 April 1955 sebagai suatu sikap negara-negara peserta konperensi tersebut mengenai penghapusan kolonialisme. Konperensi menyokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian Barat yang didasarkan pada persetujuan yang telah dicapai antara Indonesia dan Belanda mengenai soal ini. Selain itu Konperensi juga mendesak Pemerintah Belanda untuk secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan, untuk menepati kewajibannya seperti ditentukan dalam persetujuan tersebut di atas. Selain itu juga dinyatakan harapan agar supaya PBB mau membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian perselisihan dengan jalan damai.

#### 4. KONFRONTASI DI BIDANG POLITIK DAN EKONOMI

Suatu sikap lain yang lebih tegas dianggap sudah tiba saatnya diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai jawaban atas sikap Pemerintah Belanda selama ini mengenai masalah Irian Barat. Sudah semenjak pengajuan sengketa Irian Barat untuk keempat kalinya dalam Sidang Umum ke-XII PBB tahun 1957 masih tetap tidak berhasil untuk mendesak Pemerintah Belanda bersedia berunding secara damai, sudah dirasakan tidak akan ada jua hasilnya. Hal ini jelas disebut segera setelah menjadi kenyataan, bahwa Indonesia tidak

---

<sup>26</sup> Moh. Yamin, *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat*, Bukittinggi, 1956, halaman 63.

lagi akan mengajukan masalah Irian Barat ke depan forum PBB. Kemudian diungkapkan lagi dengan keterangan Pemerintah Indonesia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa dalam Sidang PBB yang terakhir, Pemerintah Indonesia tidak hanya berjuang untuk mencapai pemecahan terhadap masalah Irian Barat, melainkan terlebih-lebih lagi untuk menegaskan jalan lain yang terpaksa harus ditempuh oleh Indonesia sebagai akibat tidak mempunya PBB untuk memberikan bantuan kepada usaha penyelesaian sengketa Indonesia - Belanda.<sup>27</sup>

Kenyataan tentang sikap Pemerintah Belanda yang tidak bersedia merundingkan status selanjutnya wilayah Irian Barat sesuai dengan persetujuan KMB, menimbulkan kesangsian Pemerintah Indonesia tentang ketulusan iktikad pemerintah Belanda untuk tetap mentaati persetujuan tersebut. Pemasukan Irian Barat menjadi "Nederlands Nieuw Guinea" sebagai bagian dari Kerajaan Belanda memberikan alasan baginya untuk menganggap sebagai persoalan dalam negerinya saja, sehingga tertutuplah kemungkinan-kemungkinan untuk merundingkan status politiknya. Semua hal di atas menimbulkan alasan yang cukup, bahwa juga tidak ada gunanya bagi Indonesia untuk selalu berpegang teguh pada isi Persetujuan KMB.

Apabila penghapusan Misi Militer Belanda tahun 1953 merupakan pertanda yang pertama daripada reaksi Pemerintah Indonesia atas sikap Pemerintah Belanda, maka kemudian disusul dengan tindakan-tindakan yang lain. Perkembangan kemudian menunjukkan makin tegasnya pendirian Pemerintah Indonesia, ialah dengan memutuskan secara sepihak hubungan Uni Indonesia - Belanda, yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 1956. Penyempurnaan lebih lanjut ialah keputusan Pemerintah Indonesia untuk membatalkan secara keseluruhan semua persetujuan KMB secara sepihak juga. Keputusan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Pembatalan KMB, yang menegaskan bahwa terhitung mulai berlakunya pada tanggal 27 Maret 1956, hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda adalah hubungan biasa sebagai lazimnya antara negara-negara yang berdaulat penuh.<sup>28</sup>

Sementara itu Pemerintah Belanda telah menafsirkan tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah Indonesia tersebut sebagai melanggar sesuatu persetujuan seperti KMB. Persetujuan tersebut telah dimufakati bersama dengan persaksian Internasional, sebagaimana telah didaftarkan pada Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950. Tetapi pada hakekatnya tindakan Pemerintah Indonesia semata-mata adalah akibat tindakan pelanggaran yang terlebih dahulu dilakukan Pemerintah Belanda sendiri atas persetujuan KMB. Suatu perjanjian Internasional mensyarat-

---

<sup>27</sup> Kelompok Kerdja Staf Angkatan Bersendjata, *Sedjarah Singkat Perdjjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia*, 1964, halaman 50.

<sup>28</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 79.

kan selama salahsatu pihak tidak mengingkari atau merobahnya, maka pihak yang lain diharuskan untuk tetap memenuhi perjanjian itu. Tetapi apabila satu pihak yang lebih dahulu mengingkari maka pihak lainnyapun tidak lagi diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya.<sup>29</sup>

Menurut Pandangan Pemerintah Indonesia maka kedudukan dan penguasaan wilayah Irian Barat oleh Belanda merupakan tindakan sepihak terhadap Indonesia. Hal itu menyebabkan Indonesia menjadi bangsa yang belum merdeka sepenuhnya karena masih adanya penjajahan di sebagian wilayahnya. Apabila keadaan itu dibiarkan berlangsung terus, maka hal itu akan merupakan bahaya kembalinya kolonialisme ke seluruh wilayah Indonesia, dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan zamannya. Maka perjuangan untuk memusnahkan bentuk kolonialisme yang berujud penguasaan wilayah Irian Barat oleh Belanda merupakan keharusan mutlak Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Perkembangan penentuan sikap Indonesia semula masih bersifat meraba-raba menghadapi sikap Belanda dengan istilah *jalan lain* yang diartikan "tidak hanya dengan jalan berunding". Tetapi masih belum ditemukan jalan lain tersebut sebaik-baiknya. Yang jelas ialah bahwa telah timbul keinsyafan bagaimanapun juga Indonesia-lah yang harus lebih tegas. Penyelesaian masalah sengketa Irian Barat sama sekali tergantung pada Indonesia sendiri. Perjuangan pemasukan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia tidaklah terletak di Den Haag atau di PBB saja tanpa ada ketegasan dan kemampuan bertindak sendiri. Kesimpulan pendapat yang demikian ini sebaliknya merupakan tantangan bagi Indonesia seberapa jauh kekuatan dan keuletannya telah terbina untuk membebaskan sebagian dari wilayahnya.

Akhirnya ditemukan juga kunci penyelesaian masalah itu. Indonesia harus segera memperkuat dirinya dalam segala lapangan hidup kenegaraan, agar mampu menjawab setiap tantangan yang selama ini diajukan oleh Pemerintah Belanda. Lahirnya pengertian "Konfrontasi", sebagai suatu sikap dan tindak-balas untuk melayani setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak Belanda secara setimpal dalam bidangnya masing-masing terutama di bidang politik, ekonomi dan militer.

Di bidang politik, setelah kenyataan Belanda mengambil tindakan sepihak memasukkan Irian Barat menjadi salahsatu bagian Kerajaan Belanda, maka diperlukan pengambilan tindakan pembalasan yang setimpal. Setelah pembatalan Persetujuan KMB secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia, maka tepat pada ulang tahun ke-XI Kemerdekaan tahun 1956 diresmikannya *Pembentukan Provinsi Irian Barat* dengan ibukota Soasui. Provinsi tersebut meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani serta Wasile di Maluku Utara. Pada bulan September 1956

---

<sup>29</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 66.

Sultan Tidore, Zainul Abidin Sjah, telah diresmikan sebagai Gubernur yang pertama dari Provinsi tersebut, karena sampai dengan akhir abad ke-19 Irian Barat berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore.<sup>30</sup>

Pergolakan-pergolakan politik dalam negeri Indonesia, terutama dalam tahun 1957 dan 1958 sebagai akibat sistim demokrasi Liberal dengan ancaman-ancaman pertentangan dan perpecahan Bangsa, mempengaruhi juga kegiatan-kegiatan perjuangan pembebasan Irian Barat. Hal ini tidaklah berarti gairah perjuangan tersebut merosot dan hilang sama sekali. Kegiatan-kegiatan militer memang terpaksa banyak harus dikerahkan dalam menyusun kembali keamanan dalam negeri dan konsolidasi keutuhan Nasional. Pada masa-masa itu tindakan-tindakan konfrontasi lebih banyak dititik-beratkan pada bidang politik dan ekonomi, dengan tujuan untuk mengadakan tekanan terhadap Belanda agar merubah sikapnya selama ini dan bersedia berunding. Indonesia selalu membuka kesempatan dibukanya perundingan lagi, dengan syarat penyerahan kekuasaan Irian Barat untuk menghilangkan sebab pokok yang menjadi penghalang utama hubungan baik antara kedua negara.

Untuk menggagal kekuatan nasional guna mempersiapkan diri dan menunjang politik konfrontasi telah dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, sebagai suatu wadah penyaluran kehendak Rakyat Indonesia dan menghindarkan tindakan-tindakan secara sendiri-sendiri. Ketegangan suasana semakin meningkat setelah Belanda mengambil tindakan-tindakan guna memperkuat kekuatan militernya di wilayah Irian Barat, antara lain dengan mengirimkan kapal induk *Karel Doorman* ke perairan Indonesia sebelah timur. Sebagai tindak-balas maka Pemerintah Indonesia menyatakan diri memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda, yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1960.<sup>31</sup>

Tindakan-tindakan Indonesia yang meninggalkan sikap politik menunggu dan meminta pengertian lewat PBB dengan mengalihkan cara perjuangan menggunakan kekuatan sendiri, tidaklah berarti bahwa gagasan persoalan penghapusan kolonialisme tidak terus bergema. Hal ini ternyata bahwa pada Sidang Umum ke-XV PBB telah disetujui suatu resolusi yang merupakan persyaratan keharusan untuk secepat mungkin mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuk dan penjelmaannya, terkenal dengan Resolusi PBB No. 1514.

Sementara itu dalam perkembangan politik dalam negeri Belanda mulai timbul desakan-desakan yang lebih condong untuk melepaskan saja Irian Barat dari tangan Belanda.

---

<sup>30</sup> Moch. Subagio, *Mengenal Sebagian dari Tanahair Kita Irian Barat I*, Staf Peperti Djakarta, 1962, halaman 19.

<sup>31</sup> Soekarno, *op.cit.*, halaman 427.

Gambaran untuk mendapatkan keuntungan dengan penguasaan Irian Barat nampaknya makin menipis, kecuali kemungkinan di bidang perimbangan dan demikian pula maksud untuk membuat sebagai daerah kolonisasi untuk menampung orang-orang yang menyingkir dari Indonesia. Penguasaan wilayah tersebut oleh Belanda sendirian dalam bentuk apapun, akan memaksanya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran berjumlah besar yang bersifat spekulatif.<sup>32</sup> Lebih-lebih dengan sikap Indonesia yang makin tegas dengan tindakan-tindakan politik, ekonomi dan kesiap-siagaan militer, menyebabkan Belanda makin tidak tenteram kedudukannya di Irian Barat. Dalam bayangan kekecewaan ini pulalah maka Pemerintah Belanda pernah mengadakan pembicaraan khusus dengan Pemerintah Australia, tentang kemungkinan Irian Barat disatukan dengan Federasi Melanesia.<sup>33</sup>

Apabila selama ini Pemerintah Belanda selalu menolak pengajuan masalah Irian Barat di forum PBB, karena semata-mata dianggapnya sebagai persoalan dalam negeri mulailah terjadi pergolakan sikap. Pada Sidang Umum ke-XVI PBB tahun 1961 justru Pemerintah Belanda mengajukan masalah ini, meskipun masih tetap dalam penempatan persoalan yang berbeda, malahan makin jauh dari pengertian Indonesia. Belanda beranggapan bahwa pendudukannya di Irian Barat karena daerah tersebut belum ber-pemerintahan sendiri (non-self governing territory) dan nantinya akan menyerahkan penentuan nasib sendiri (self determination) kepada penduduknya. Kesediaan Belanda untuk mengakhiri kekuasaannya di wilayah tersebut segera setelah hak menentukan nasib sendiri tersebut terjamin dengan bantuan PBB untuk terlaksananya tujuan itu.<sup>34</sup> Pada hakekatnya tindakan tersebut merupakan usaha untuk menginternasionalisasikan persoalan Irian Barat dan PBB akan diserahkan kekuasaan oleh Belanda untuk melangsungkan hak menentukan nasib Rakyat Irian Barat.

Jalan pemikiran Belanda tersebut jelas bertentangan dengan pendirian Indonesia, yang tegas-tegas menyatakan bahwa masalah penentuan nasib sendiri Rakyat Irian Barat sudah dilaksanakan bersama-sama rakyat Indonesia yang lain sebagai satu bangsa (nation) dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selain itu Belanda rupanya bermaksud memencilkan Indonesia dalam usahanya untuk mencoba mencari jalan ke luar dari kesulitan sebagai akibat penguasaan wilayah itu tanpa kehilangan muka. Ini ternyata dari cara pengajuan masalah ini samasekali tidak menyinggung pihak Indonesia serta latar-belakang sejarah, seolah-olah tidak ada persengketaan pendapat antara kedua

---

<sup>32</sup> Seksi Penerangan KOTI PEMIRBAR, Berita-Berita Penting Sepekan, No. 1 Tahun I, halaman 2-3.

<sup>33</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 208.

<sup>34</sup> *Mimbar Penerangan*, Madjalah Deppen Thn. XVI, No. 12 Desember 1961, halaman 1080 - 1081.

negara. Dengan demikian Belanda berusaha untuk muncul di PBB sebagai Negara yang mengusahakan dekolonisasi dengan iktikad yang tulus dan tangan yang bersih. Maka seandainya usul rancangan Belanda diterima oleh PBB, persoalan Irian Barat tetap akan menjadi masalah tegang yang malahan makin meruncing, berhubung masalah pokok menjadi sumber ketegangannya sendiri tidak ikut terpecahkan. Indonesia menganggap usul rancangan Belanda tersebut kehilangan dasar moralnya dan bersifat anti Indonesia, dengan sejauh mungkin menghindari penyerahan kekuasaan wilayah Irian Barat kepada Indonesia.

Suatu alasan Belanda mengapa tidak bersedia mengadakan perundingan langsung dengan Indonesia, ialah karena sikap Indonesia yang telah memutuskan hubungan diplomatik dan hanya bersedia merundingkan masalah penyelesaian Irian Barat atas dasar penyerahan kekuasaan wilayah tersebut kepada Indonesia. Tetapi apabila iktikad yang tulus menjadi latar-belakangnya, masih ada jalan lain yang dapat ditempuh. Hal ini dapat dilaksanakan misalnya dengan perantaraan pihak ketiga. Bagaimanapun juga Indonesia tetap lebih menginginkan untuk menyelesaikan masalah sengketa Irian Barat dengan jalan damai melalui perundingan. Sedangkan mengenai hak menentukan nasib sendiri, terlihat adanya sesuatu yang dipaksakan sifatnya. Pada bulan September 1960 Pemerintah Belanda mengajukan suatu rancangan undang-undang tentang perobahan sebagian dari pemerintahannya di Irian Barat. Rancangan undang-undang tersebut adalah mengenai pembentukan "Dewan Papua", beranggotakan 48 orang yang diangkat dan sebagian besar terdiri dari warganegara Belanda.<sup>35</sup>

Dalam Sidang Umum ke-XVI PBB 1961 kemudian diajukan suatu rancangan resolusi dari negara-negara Afrika kelompok Brazzaville, sebagai usaha jalan ke luar atas perdebatan-perdebatan yang terjadi dengan munculnya usul rancangan Belanda di atas. Isinya ialah meminta agar Pemerintah-Pemerintah Belanda dan Indonesia mengadakan perundingan kembali mengenai persoalan Irian Barat yang dikuasai Belanda, untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan penempatan wilayah tersebut sementara di bawah pengawasan PBB. Ini dilakukan jika perundingan-perundingan kedua pihak mengenai masalah sengketa itu tidak juga mendapatkan penyelesaian sampai tanggal 1 Maret 1962. Pemungutan suara yang dilakukan tidak berhasil mencapai mayoritas duapertiga suara. Kemudian segera disusul dengan pengajuan rancangan resolusi dari India, yang lebih menyokong tuntutan Indonesia ialah mendesak kedua pihak untuk membuka kembali perundingan bilateral dengan pengawasan Ketua Sidang Umum, tanpa menyebut tentang self-determination, internasionalisasi dan limit waktu. Yang terakhir inipun tidak berhasil mencapai mayoritas duapertiga suara. Dengan perkembangan di atas maka Belanda tidak jadi mengajukan usul rancangan resolusinya sendiri. Rupanya di-

---

<sup>35</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 208.

sadari bahwa apabila diadakan pemungutan suara tidak akan berhasil juga. Maka usaha dan maksud Belanda untuk mencoba menginternasionalisasikan Irian Barat tanpa mengikutsertakan Indonesia, akhirnya menemui kegagalan.

Selain tindakan-tindakan di bidang politik, maka tindakan-tindakan yang dilakukan di bidang ekonomi telah sangat menekan dan banyak merugikan kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Semenjak kegagalan pertama dalam usaha Indonesia mengadakan perundingan langsung dengan Belanda, pada akhir tahun 1950 sudah mulai ada suara-suara yang menghendaki agar dilakukan gerakan pemboikotan ekonomi dan perdagangan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Juga Badan Perjuangan Irian Barat yang berpusat di Makassar mengumumkan aksi pemboikotan Nasional terhadap Belanda, dengan jalan tidak mau melayani keperluan sehari-hari dari warganegara Belanda. Hal ini mengakibatkan para pengusaha Belanda menekan Pemerintahnya untuk menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia. Mereka mengirim surat kepada Pemerintah Belanda tentang kegelisahan mereka di Indonesia berhubung dengan masalah Irian Barat. Diramalkan bahwa apabila tidak tercapai persetujuan yang memuaskan Indonesia, maka pasti akan terjadi luapan perasaan yang akan merugikan kepentingan perusahaan dan perdagangan Belanda di Indonesia. Bahwa kepentingan ekonomi Belanda yang sudah tertanam di Indonesia sebetulnya cukup besar, ternyata dari pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan van der Werf & Hubrecht di Amsterdam. Ia mengajukan agar Pemerintah Belanda mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia saja, karena kepentingan Belanda di Indonesia yang bernilai beribu juta gulden lebih berharga daripada tetap mengukuh wilayah Irian Barat. Tetapi Pemerintah Belanda masih tidak mau menghiraukan pernyataan-pernyataan ini. Pemerintah Belanda juga menolak ketika ditawarkan konsesi-konsesi Indonesia yang akan diberikan secara khusus dalam rencana eksploitasi daerah Irian Barat, asalkan Belanda bersedia menyerahkan Irian Barat.

Dalam rangka tindakan ekonomi ini juga dilakukan pembatalan hubungan Uni Indonesia - Belanda dan perjanjian-perjanjian yang menyangkut keuangan-ekonomi, dengan membatalkan hutang-hutang Indonesia kepada Belanda sebesar 3.661 juta gulden. Jumlah tersebut merupakan pembebasan dari semua pengeluaran-pengeluaran Belanda di Indonesia, termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan justru untuk menindas perjuangan kemerdekaan selama tahun 1945 - 1949. Penegasan lebih lanjut dilakukan dengan pembatalan keseluruhan persetujuan KMB.

Reaksi atas kegagalan rancangan resolusi tentang masalah Irian Barat pada Sidang Umum ke-XII PBB tahun 1957 sangat tajam, baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari Rakyatnya. Pemogokan-pemogokan umum dilancarkan selama 24 jam pada tanggal 2 Desember 1957 terhadap semua perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian disusul dengan tindakan-

tindakan untuk menempatkan semua kegiatan perusahaan Belanda di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia. Pengesahan terhadap tindakan ini diwujudkan dalam suatu bentuk *Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda*, ialah Undang-Undang No. 86 tahun 1958. Isinya antara lain mengatur tentang hak ganti-rugi kepada pemilik perusahaan-perusahaan Belanda. Suatu Panitia yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia akan melakukan penaksiran dan penetapan besarnya jumlah ganti-rugi tersebut. Apabila dalam hal-hal tertentu dirasakan adanya keputusan panitia yang kurang memuaskan, maka dapat dilakukan pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung. Instansi inilah yang akan mengambil keputusan terakhir.

Selain itu juga telah diambil tindakan untuk melarang perusahaan penerbangan Belanda KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij) mengadakan aktivitas di Indonesia, larangan peredaran publikasi dan media berita Belanda dan tindakan untuk mempercepat pengeluaran warganegara Belanda yang tidak bermata-pencaharian tetap atau tidak diperlukan lagi dari Indonesia. Disamping itu telah diatur juga mengenai pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang bermodal campuran Belanda - Asing lain, menjadi modal campuran Indonesia - Asing lain. Hal ini perlu diambil untuk menutup samasekali kemungkinan pemindahan laba perusahaan mengalir ke Negeri Belanda. Semua ini dituangkan dalam keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia nomor 485/M.P./1959 tertanggal 17 September 1959.

Seluruh modal Belanda yang telah di-nasionalisasi meliputi sejumlah kurang lebih 700 perusahaan dengan nilai 1.500 juta dollar Amerika.<sup>36</sup> Usaha memindahkan pasaran bursa tembakau dari Negeri Belanda ke Bremen (Jerman Barat), bertujuan untuk memutuskan samasekali keuntungan-keuntungan ekonomis yang mungkin didapat Belanda dalam hubungan perdagangan dunia dengan Indonesia. Untuk lebih memperketat tindakan konfrontasi di bidang ekonomi ini juga, maka telah dilakukan nasionalisasi milik warganegara Belanda yang tidak bergerak dan terdapat di wilayah Indonesia.

## 5. PERSIAPAN-PERSIAPAN DALAM RANGKA KONFRONTASI MILITER

Pencentuan sikap dan ketetapan hati Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tuntutan rakyat Indonesia atas wilayah Irian Barat dengan berlandaskan kekuatan sendiri makin mendapat bentuknya. Hal ini tidak lepas dari tantangan untuk menambah kekuatan fisik khusus di bidang militer. Sistem pertahanan-keamanan nasional berupa Perlawanan Rakyat

---

<sup>36</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 207.



Semesta dengan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang luas untuk pengerahan Rakyat Indonesia secara massal. Pada dasarnya sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara menjadi tanggungjawab dari setiap warga negara Indonesia. Maka *Front Nasional Pembebasan Irian Barat* yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 1959 merupakan salahsatu pelaksana pembela keutuhan wilayah Indonesia, khususnya bertujuan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Usaha ini kemudian ditingkatkan dalam wadah yang lebih luas dengan dibentuknya organisasi tatalaksana *Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional* pada tanggal 13 Maret 1961. Dalam organisasi tersebut urusan Irian Barat menjadi salahsatu bagian khusus Pembebasan Irian Barat, yang menyebutkan tentang tugas dan kewajibannya ialah :

- a. Menyusun dan membina potensi Nasional untuk pembebasan Irian Barat.
- b. Merencanakan aksi-aksi dan tindakan-tindakan untuk membebaskan Irian Barat.<sup>37</sup>

Di bidang fisik mulailah dipersiapkan rencana untuk mengirimkan pemuda-pemuda Indonesia ke daratan Irian Barat, terutama mereka yang memang berasal dari sana. Tujuan dan kewajiban para pemuda tersebut ialah: menentang setiap kekuasaan asing yang dilakukan dengan kekerasan dan mempersiapkan kantong-kantong gerilya sebagai inti kekuasaan de facto Republik Indonesia.<sup>38</sup> Hal ini merupakan tindak-balas Indonesia terhadap Belanda, karena selama -tahun-tahun 1950-1960 Belanda selalu menekan penduduk Irian Barat yang ternyata memihak dan setuju menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Mereka ini diusir ke luar dari daratan Irian Barat dan sebaliknya Belanda memasukkan orang-orang yang anti Indonesia sekaligus untuk memperkuat kedudukannya. Suatu penambahan kekuatan pertahanan dan kepolisian Belanda sejumlah 10.000 anggota telah dilakukan dan dipersiapkan untuk menghalang-halangi masuknya orang-orang Indonesia yang berasal dari perbatasan daerah Irian Barat, ialah kepulauan-kepulauan Kei, Aru, Seram Timur dan Gag yang sudah sejak lama banyak mengadakan hubungan tradisionil dengan daratan Irian Barat.<sup>39</sup>

Masalah Irian Barat sebagai tuntutan wajar dalam pembulatan wilayah nasional Indonesia makin mendapatkan pengertian dan dukungan sebagian besar Bangsa-Bangsa di dunia terutama dari negara-negara Asia-Afrika dan negara-negara Sosialis. Mereka secara langsung ataupun tidak,

---

<sup>37</sup> Penguasa Perang Tertinggi, Himpunan Lembaran Penguasa Perang Tertinggi, halaman 323.

<sup>38</sup> A.H. Nasution, *Menuju Tentara Rakjat*, Djakarta, halaman 146.

<sup>39</sup> A.H. Nasution, *Mengamankan Pandji-pandji Revolusi*, Djakarta, 1964, halaman 40.

telah memberi bantuan yang nyata dalam pelaksanaan konfrontasi antara lain dengan jalan melarang pesawat-pesawat militer Belanda yang membawa bantuan dan perlengkapan perang untuk mendarat di wilayahnya, sehingga Belanda terpaksa mengirimbkannya lewat negara-negara Amerika Latin.<sup>40</sup> Juga negara-negara yang semula bersikap pasif mulai merubah pendiriannya yang menguntungkan Indonesia. Misalnya Pemerintah Jepang yang telah membatalkan kunjungan muhibah kapal-induk Belanda *Karel Doorman* ke Jepang, sedangkan Malaya dan Singapura menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan sukarelawan-sukarelawan ke Indonesia.

Pada akhir tahun 1960 Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H. Nasution, mengadakan kunjungan ke Uni Sovyet untuk menanda tangani persetujuan pembelian senjata atas dasar kredit jangka panjang yang tidak begitu memberatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembelian senjata tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia yang pernah dilakukan dengan luar negeri.<sup>41</sup> Karena letak geografis Irian Barat sebagai suatu pulau tersendiri yang terpisah dari pulau-pulau Indonesia lainnya, maka penambahan kekuatan militer Indonesia banyak dipergunakan untuk kebutuhan armada laut dan udara. Tujuan yang nyata hendak dicapai Indonesia ialah potensil yang disusun atas kekuatan yang diperhitungkan akan mampu pada suatu waktu membebaskan Irian Barat secara fisik militer. Maka diperlukan pembentukan kekuatan yang melebihi kekuatan Militer Belanda sendiri. Sekaligus hal ini juga ditujukan terutama untuk meyakinkan sekali lagi kepada Belanda akan kesungguhan dan keteguhan tekad bangsa Indonesia, sampai kepada konsekwensi-konsekwensi kekerasan senjatapun akan ditempuh apabila perlu dan keadaan mengharuskannya. Penyusunan kekuatan militer ini berfungsi sedemikian rupa, sehingga dapat menekan Belanda secara terus-menerus agar bersedia secara damai menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia. Tetapi Belanda masih belum juga menginsyafi kenyataan ini, malahan melakukan tindakan-tindakan provokatif dengan cara memperkuat pertahanan di Irian Barat yang ditingkatkan dengan mendatangkan kapal-induk *Karel Doorman* dengan formasi siap tempur ke daerah Pasifik dalam rangka mempertahankan kedudukannya di Irian Barat.

Dicobanya juga untuk mengajak negara-negara lain seperti Jerman Barat dan Amerika untuk membentuk usaha perekonomian di Irian Barat bersama-sama Belanda. Diharapkan dengan adanya ikatan ekonomi di wilayah yang dalam sengketa ini akan mudah diikuti dengan kerjasama di bidang pertahanan, dengan alasan untuk melindungi keselamatan obyek-

---

<sup>40</sup> DEPPEN, *op.cit.*, halaman 315.

<sup>41</sup> A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional dibidang Bersendjata*, Djakarta, 1966, halaman 182.

obyek ekonominya.<sup>42</sup> Disamping tindakannya mengajukan masalah dekolonisasi dan internasionalisasi Irian Barat lewat PBB, Belanda juga meningkatkan kekuatan militernya: mereka telah mempersiapkan bantuan militernya di Irian Barat. Kekuatan armada lautnya yang akan dikirim ke daerah Pasifik ternyata telah lama dipersiapkan di Laut Karibia, berupa kapal-induk *Karel Doorman*, 2 buah kapal perusak dan 2 buah kapalselam. Pada tanggal 27 Maret 1961 bantuan tersebut telah berangkat dari pantai barat Amerika. Dengan demikian diharapkan oleh Belanda dapat memperpanjang waktu keunggulan militernya di Irian Barat.

Menurut pemikirannya, meskipun kekuatan militer Indonesia akan menjadi bertambah besar dengan didapatnya bantuan-bantuan perlengkapan perang, tetapi Indonesia masih membutuhkan waktu. Angkatan Perang Indonesia dianggap tidak atau belum dapat memelihara dan mempergunakan senjata-senjata itu karena belum mempunyai kemampuan teknis. Persetujuan pembelian senjata yang baru ditanda-tangani pada bulan Januari 1961 masih membutuhkan waktu untuk pengangkutan dan pendidikan serta latihan bagi tenaga-tenaga yang akan memelihara dan mempergunakan senjata-senjata tersebut. Selain itu masih juga harus dibangun pangkalan-pangkalan udara, terutama di daerah-daerah dekat perbatasan. Maka tokoh-tokoh politik dan militer Belanda dapat menyimpulkan, bahwa Indonesia sampai akhir tahun 1962 belum akan selesai mengadakan persiapannya untuk menyusun Angkatan Perang dan belum akan selesai membangun pangkalan-pangkalan udaranya di Indonesia bagian timur. Tekad bulat Indonesia yang menyatakan, bahwa Irian Barat pada akhir tahun 1962 akan dapat direbut oleh Angkatan Perangnya dianggap tidak masuk akal.<sup>43</sup> Ternyata perhitungan tersebut meleset, karena Indonesia dapat mempersiapkannya dalam waktu yang lebih singkat.

---

<sup>42</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 76-77.

<sup>43</sup> A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional dibidang Bersenjata*, halaman 182.

BAB II  
TRI KOMANDO RAKYAT  
DAN PEMBENTUKAN KOMANDO MANDALA  
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

1. KOMANDO RAKYAT

Semenjak diajukannya gagasan Belanda pada tahun 1961 untuk melakukan dekolonisasi dan internasionalisasi Irian Barat dalam forum PBB tanpa mengajak serta Indonesia untuk merundingkannya lebih dahulu, menyebabkan ketegangan makin meningkat. Padahal Indonesia-lah yang pertama-tama mempunyai kepentingan Nasional atas wilayah itu. Dengan demikian terlihatlah, bahwa perubahan pandangan pihak Belanda secara prinsipil tetap tidak ada. Hal ini semakin menjadi jelas dengan usahanya lebih lanjut untuk melegalisasi Rencana Undang-Undang Dewan Papua sebagai suatu lembaga Pemerintahan dengan dalih penentuan nasib sendiri. Pada tanggal 5 April 1961 Belanda melantik Dewan Papua dengan perlengkapan bendera dan lagu Kebangsaan Papua. Hal ini nantinya akan menjurus kepada pembentukan suatu "Negara Papua".<sup>44</sup> Meskipun usaha internasionalisasi Irian Barat dapat digagalkan oleh Indonesia, tetapi Belanda tidak merubah sikapnya dan tetap hendak melaksanakan konsepsinya tentang "hak menentukan nasib sendiri" rakyat Irian Barat.

Tindakan Belanda yang sejauh itu telah menimbulkan puncak amarah Indonesia. Tuntutan Indonesia untuk penyatuan wilayah tanahairnya yang selama ini diperjuangkan dengan tekun dan tetap membuka kesempatan berunding, tetap tidak mendapatkan pengertian dengan sewajarnya. Dengan rencana pembentukan Negara Papua ini bukan lagi persoalan penyerahan atas wilayah Irian Barat yang selama lebih dari sepuluh tahun dikaburkan oleh Belanda, tetapi beralih ke soal menempatkan kedaulatan Irian Barat di luar RI. Sekarang hak Indonesia yang berupa kedaulatan atas wilayah Indonesia tersebut telah dinodai begitu saja.

Mutlaknya tuntutan Pembebasan Irian Barat dalam kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia juga terlihat dengan dicantumkannya perjuangan Pembebasan Irian Barat menjadi salahsatu di antara Tri Program Kabinet Kerja tahun 1960. Melihat kenyataan sikap Belanda yang tetap bersikeras, mutlak adanya perencanaan yang lebih konkrit sebagai pedoman pelaksanaan Pembebasan Irian Barat yang didasarkan pada kekuatan fisik-militer. Maka pada tanggal 12 April 1961 Menteri Keamanan Nasional/Kepala Staf Angkatan Darat memberitahukan kepada Gabungan Kepala Staf (GKS), bahwa Presiden / Panglima Tertinggi telah memerintahkan

---

<sup>44</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 86.

GKS untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Irian Barat. Dengan demikian jelaslah, bahwa pada awal tahun diucapkan Trikora (19 Desember 1961) telah ada suatu kepastian mengenai tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka Pembebasan Irian Barat dengan jalan Konfrontasi.<sup>45</sup> Penggalangan kekuatan fisik-militer berlangsung terus, sehingga pada ulangtahun ke-XVI Proklamasi tanggal 17 Agustus 1961, Republik Indonesia telah merasa kuat dalam konfrontasi dengan Belanda di segala bidang. Tantangan Belanda di bidang politik, sosial dan ekonomi dibalas dengan tantangan pula di masing-masing bidangnya. Bahkan tantangan di bidang militer juga akan dihadapi dengan cara militer pula.<sup>46</sup>

Segera setelah berhasil menggagalkan Belanda untuk meng-internasionalisasikan masalah Irian Barat di forum PBB, maka Pemerintah Indonesia bertekad bulat untuk menggagalkan tindakan Belanda selanjutnya membentuk Negara Papua. Konfrontasi harus diperhebat dan ditingkatkan, sehingga Irian Barat harus sudah dapat dibebaskan dalam tahun 1962. Pemerintah Belanda kemudian memaksakan untuk mempercepat gagasan self determination tidak melalui Dewan Papua, tetapi dengan cara membentuk Komite Nasional Papua. Komite tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1961 yang terdiri dari anggota Dewan Papua yang lebih kurang berjumlah 20 orang ditambah dengan anggota lainnya, sehingga meliputi 80 orang. Komite Nasional Papua ini kemudian menyampaikan pernyataan (manifes) kepada Dewan Papua yang berisi :

- a. Menentukan Bendera Pusaka.
- b. Lagu Kebangsaan Papua.
- c. Mengganti nama West Nieuw Guinea menjadi Papua Barat.
- d. Nama Bangsa adalah Papua.
- e. Mengusulkan bendera dikibarkan pada tanggal 1 Nopember 1961.

Sidang Dewan Papua telah menyetujui Manifest Komite Nasional Papua, kecuali tentang pengibaran Bendera Papua tanggal 1 November 1961 masih menunggu keputusan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memutuskan tentang pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1961.<sup>47</sup>

Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan-tindakan tegas di antaranya dengan jalan membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional (DEPERTAN) yang bertugas untuk merumuskan cara bagaimana untuk mengintegrasikan seluruh potensi nasional dalam Pembebasan Irian Barat. DEPERTAN tersebut diresmikan pada tanggal 11 Desember 1961 dengan

---

<sup>45</sup> *Sedjarah Singkat Perjuangan Bersenjata Bangsa Indonesia*, halaman 151.

<sup>46</sup> Soekarno, *op.cit.*, halaman 472.

<sup>47</sup> Departemen Angkatan Darat, *Tinjauan Situasi Irian Barat*, Djakarta, 1961 halaman 119.

Keputusan Presiden No. 618/Keppres Tahun 1961. Pertimbangan yang dicantumkan ialah bahwa: berhubung dengan memuncaknya ketegangan antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kolonial Belanda dalam pembebasan Irian Barat Tanah Air Indonesia dan untuk kebulatan tindak, perlu membentuk Dewan Pertahanan Nasional.<sup>48</sup>

DEPERTAN diwakili oleh 14 anggota dari pejabat-pejabat tertinggi militer maupun sipil dari badan-badan legislatif dan eksekutif serta wakil Irian Barat yang diketuai oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, Menteri Pertama dan Menteri Keamanan Nasional dan dilengkapi dengan suatu Staf Sekretariat.

Dalam sidang DEPERTAN tanggal 14 Desember 1961 telah ditetapkan pembentukan suatu Komando Tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Barat. KOTI terdiri atas Panglima Besar dengan dibantu oleh Ketiga Kepala Staf/Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebagai Panglima Besar KOTI ialah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.<sup>49</sup> Dengan pembentukan KOTI Pembebasan Irian Barat (KOTI PEMIRBAR) diharapkan adanya kesatuan Komando yang memungkinkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembebasan Irian Barat dijalankan dengan bulat dan berencana. DEPERTAN ini pulalah yang menghasilkan konsepsi yang terkenal dengan Tri Komando Rakyat, yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

### TRI KOMANDO RAKYAT

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu Kolonialisme Belanda.

Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada Rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan TRI KOMANDO sebagai berikut :

1. Gagalkanlah pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.

<sup>48</sup> Himpunan Penguasa Perang Tertinggi, halman 1101-1102.

<sup>49</sup> *Ibid*, termuat sebagai Keppres No. 620 tahun 1961.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 1961  
Presiden/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia

SOEKARNO

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia  
/Panglima Besar Komando Tertinggi  
Pembebasan Irian Barat<sup>50</sup>

Menurut struktur materi, maka Tri Komando Rakyat (Trikorra) merupakan suatu perintah kepada Rakyat Indonesia untuk melaksanakan perjuangan Pembebasan Irian Barat secara resmi. Melihat pertumbuhan perkembangan dari tuntutan pembersihan wilayah Indonesia sebagai penjelasan cita-cita Bangsa Indonesia, maka perintah ini hakekatnya berasal dari rakyat Indonesia sendiri. Perintah tersebut disalurkan lewat jenjang pejabat kenegaraan Indonesia, yang dalam hal-hal penting dan bersifat Nasional diberikan langsung oleh Pimpinan Negara Tertinggi ialah Presiden/Panglima Tertinggi. Perintah tersebut lebih merupakan penyaluran naluri Bangsa Indonesia, mengingat pengalaman yang telah memperkaya Bangsa Indonesia dalam masa panjang perjuangan memperoleh kembali kemerdekaannya, khususnya menghadapi siasat-siasat penjajah Belanda.<sup>51</sup>

Menurut isinya, maka terdapat 2 perintah yang ditujukan :

1. Kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk bersiap-siaga membebaskan Irian Barat, yang pelaksanaannya setiap waktu akan diberikan.
2. Kepada Rakyat Indonesia untuk mengadakan persiapan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dengan jalan menggagalkan usaha pembentukan Negara Papua yang akan dilaksanakan oleh Belanda.

Menarik perhatian adalah suasana hubungan kenegaraan yang diakibatkan oleh permakluman Trikorra. Isinya tidak mengandung pernyataan perang secara resmi dan bukan merupakan tujuan utama untuk mengadakan suatu perang terbuka. Tetapi kemungkinan sampai ke taraf tersebut

---

<sup>50</sup> Foto Copy Teks Tri Komando Rakjat, vide Pembebasan Irian Barat, halaman 221.

<sup>51</sup> Pembebasan Irian Barat tidak tergantung pada pengaruh sentimen perorangan, vide Robert C. Bone Jr, *op.cit.*, halaman 38 - 39.

tetap ada melihat perkembangannya, apabila belum terdapat perubahan pandangan Belanda. Yang jelas adalah sejak diputuskannya hubungan diplomatik kedua negara, maka berarti hubungan antara Indonesia dan Belanda sudah tidak ada lagi. Hal ini telah ditingkatkan lagi dengan berlakunya Trikora ialah sudah tidak dalam suasana damai. Keadaan yang demikian rupanya memang sengaja ditumbuhkan, sehingga dapat diharapkan memaksa Belanda untuk merubah pendirian dan kesediaan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.<sup>52</sup> Bukan suasana damai dan juga bukan merupakan perang, ini ternyata akhirnya menemui sasaran dengan adanya Persetujuan New York pada pertengahan Agustus 1962.

Pelaksanaan tehnis dari Trikora sebetulnya ialah pengembalian keadaan yang selama 12 tahun sejak tahun 1950 telah dilakukan oleh Belanda, sehingga mengakibatkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan dan kekuasaan Republik Indonesia tidak dalam keadaan wajar lagi. Kenyataan adanya kekuasaan de-facto Belanda yang dipaksakan berlaku di sana harus dikembalikan menjadi kekuasaan de-facto Republik Indonesia. Maka untuk ini diorganisasi sukarelawan-sukarelawan dengan penguasaan pengetahuan militer secukupnya, sebab usaha memasukkan mereka ke daratan Irian Barat sebagai pelaksanaan pengembalian kekuasaan de-facto Republik Indonesia tentunya akan mendapat rintangan dan gangguan yang bersifat kekerasan militer.

Dalam keadaan yang demikian inilah maka Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditugaskan untuk mengantarkan sukarelawan-sukarelawan Indonesia guna menjamin mereka mampu menegakkan kekuasaan Negara. Dalam rangka menghadapi kekuatan militer Belanda, maka ABRI disiapkan untuk pada waktunya diperintahkan melaksanakan pembebasan Irian Barat dengan kekuatan fisik militer penuh. Maka taraf-taraf yang diperkirakan akan terjadi dengan pelaksanaan Trikora adalah:<sup>53</sup>

- Taraf I : Membangun Angkatan Bersenjata lebih kuat daripada kekuatan Belanda di Irian Barat agar supaya Belanda secara sukarela akan menyerahkan hak mutlak Indonesia atas wilayah Irian Barat. Ternyata Belanda masih juga belum mau mengerti. Maka dilanjutkan dengan,
- Taraf II : Mulai didaratkannya pasukan sukarelawan melalui lautan dan udara dalam rangka membentuk kantong-kantong daerah kekuasaan de-facto Republik Indonesia. Apabila dalam hal ini belum juga ada perubahan keadaan, maka ditempuh,
- Taraf III : ABRI yang telah disiapkan penuh untuk mengadakan penyerbuan militer fisik dan frontal.

---

<sup>52</sup> A.H. Nasution, *Menuju Tentara Rakjat*, halaman 146.

<sup>53</sup> A.H. Nasution, *Mengamankan Pandji-pandji Revolusi*, Djakarta, 1964, halaman 129.



Secara psikologis pengambilan waktu dan tempat yang tepat memang sengaja dilakukan untuk memberikan dorongan semangat yang maksimal dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dituangkan dalam Trikora. Apabila pada tanggal 19 Desember 1948 Pemerintah Belanda mencoba menghapuskan samasekali daerah kekuasaan Republik Indonesia yang tertinggal pada masa itu dengan titik kekuasaan terakhir di Yogyakarta, maka Trikora merupakan titik awal usaha penguasaan fisik daerah Kolonial Belanda di Irian Barat sebagai imbalan serbuan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 tersebut.

Tindakan lebih lanjut dari KOTI Pembebasan Irian Barat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dicantumkan dalam Trikora ialah dengan pembentukan suatu Komando Pelaksana Utama. Organisasi ini diresmikan dengan nama: Komando Mandala (KOLA) yang mempunyai daerah kekuasaan meliputi wilayah yang terbentang antara bujur 115 derajat timur hingga 141 derajat timur dan meliputi Kodam XIII/Merdeka, Kodam XIV/Hasanuddin, Kodam XV/Pattimura, Kodam XVI/Udayana, Kodamar V, Kodamar VI, Korud II dan Korud IV.<sup>54</sup> Pusat kedudukan Komando Mandala ialah kota Makassar, Sulawesi Selatan .

## 2. KEKUATAN ANGKATAN BERSENJATA BELANDA DI IRIAN BARAT

Penambahan unsur-unsur kekuatan Belanda di wilayah Irian Barat berkembang dengan pesatnya, sejalan dengan makin tegasnya tuntutan Indonesia untuk memasukkan wilayah tersebut ke dalam kekuasaannya. Pada dasarnya sesuai dengan geo-strategi Irian Barat sendiri, maka Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat. Sampai tahun 1950 unsur-unsur pertahanan Irian Barat seluruhnya terdiri dari :

- a. Koninklijke Marine (KM)
- b. Corps Mariniers (CM)
- c. Militaire Luchtvaart Dienst (MLD).

Keadaan ini mulai berangsur berubah sejak tahun 1958; kekuatan militer Belanda kemudian ditambah dengan kesatuan-kesatuan dari Koninklijke Landmacht (KL/Angkatan Darat Belanda) dan Militaire Luchtvaart (ML/Angkatan Udara Belanda).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 101.

<sup>55</sup> Lampiran B dari Penelaahan Staf Gabungan Kepala-kepala Staf, sebagai lampiran A dari Case Study Mengenai Kegiatan-kegiatan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat (stensilan), halaman 1-2.

Komando tertinggi seluruh Angkatan Perang Belanda di Irian Barat dipegang oleh Laksamana Muda P.J. Platerink, yang pada bulan Agustus 1961 diserahkan kepada Laksamana Muda L.E. Reesers. Komando Tertinggi ini membawahkan satuan-satuan Komando Angkatan Darat dan Angkatan Laut Belanda di Irian Barat, sedangkan satuan Komando Angkatan Udara dipegang langsung oleh Komando Tertinggi. Markas Besar Umum (Algemene Hoofdkwartier) Angkatan Perang Belanda di Irian Barat berada di Hollandia (sekarang Jayapura) yang juga merupakan pusat pemerintahan. Sedangkan Markas Besar Operasional (Operationeel Hoofdkwartier) berada di Biak, termasuk kedudukan Komando dari ketiga Angkatan Perang.

Perkiraan kemampuan Belanda di Irian Barat telah disusun oleh Gabungan Kepala Staf (GKS) dalam rangka pelaksanaan instruksi Panglima Tertinggi Republik Indonesia untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Militer Indonesia ke wilayah Irian Barat.

Secara garis besar kekuatan Angkatan Bersenjata Belanda pada akhir tahun 1961 adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. *Angkatan Darat Belanda (KL)* terdiri dari:
  1. 1 Brigade Infanteri berasal dari Resimen Infanteri "Oranje Gelderland" dengan 3 Batalyon.
  2. 1 detasemen penangkis serangan udara kurang lebih 500 orang.
  3. Brigade Papua yang diperkirakan pada akhir tahun 1961 baru terbentuk 1 batalyon.
- b. *Angkatan Laut Belanda (KM)* terdiri dari:
  1. Kekuatan Maritim berupa: 1 perusak, 3 kawal perusak, 10 LST, 2 kapal survey yang sewaktu-waktu dapat membantu untuk maksud-maksud pertahanan umumnya.
  2. Corps Mariniers (CM) berupa 1 brigade terdiri dari 3 Batalyon.
  3. Marine Luchtvaart Dienst (MLD) berupa: skwadron pesawat penempur buru firefly, 1 flight dari 3 pesawat Catalina (Amfibi), 1/2 skwadron pesawatintai Martin Mariner, 1 unit dari 2 pesawat pembom anti kapalselam Neptune, yang akan ditambah menjadi 6 buah.
- c. *Angkatan Udara Belanda (ML)* terdiri dari :
  1. 1 skwadron pesawat buru-sergap Hawker Hunter MK VI dengan 6 pesawat yang sudah siap tugas operasi.
  2. 1 flight pesawat helikopterintai.
  3. 1/2 skwadron pesawat angkut Dakota.

---

<sup>56</sup> *Ibid*: lihat juga Departemen Angkatan Darat, *op.cit.*, halaman 73.

1. *Kepolisian Belanda* terdiri dari :

1. *Algemeene Politie*, jumlah kekuatannya diperkirakan sebanyak 1.700 orang. Pos-pos detasemen-nya terdapat di tempat-tempat sampai tingkatan kecamatan (*onder district*).
2. *Mobiele Politie*. Dibentuk dalam regu-regu dengan susunan tempur infanteri. Tugasnya di daerah-daerah yang tidak/belum aman seperti di daerah *Vogelkop*, kepulauan Raja Empat dan di pantai selatan.

Susunan pertahanan Belanda di wilayah Irian Barat nampaknya disesuaikan dengan keadaan medan serta kemampuan-kemampuan Belanda sendiri untuk dapat menyediakan tenaga-tenaga yang diperlukan bagi pertahanan daerah jajahannya tersebut. Mengingat kemungkinan ancaman-ancaman penyerangan fisik yang makin nyata dari Indonesia, maka Belanda telah berusaha memperkuat pertahanan tersebut dengan kesatuan-kesatuan Angkatan Darat Belanda yang terdiri dari wajib militer (*dienst-plichtigen*) berumur antara 18-20 tahun untuk dinas selama paling pendek 1½ tahun.

Sejak bulan Agustus 1961 di wilayah ini telah mulai ditempatkan 2 buah pesawat terbang *Neptune* di perairan Irian Barat. Tugas khususnya ialah menyelidiki kebenaran berita-berita tentang adanya kapal-kapal selam Indonesia yang melakukan kegiatan-kegiatan di pantai-pantai Irian Barat, sambil menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Dalam waktu-waktu mendatang apabila diperlukan segera akan dilengkapi dengan 6 buah pesawat. Pemesanan pesawat jenis ini sebanyak 10 buah sedang dilakukan di Amerika Serikat.

Skwadron pesawat buru-sergap *Hawker Hunter* telah diperlengkapi menjadi skwadron penuh, dipusatkan di lapangan terbang Boroku (*Biak*), 6 buah di antaranya sudah siap untuk tugas operasi. Sedangkan *early warning system* mereka menggunakan radar dari jenis yang besar daya jangkauannya, sudah siap dipasang di pulau *Noomfoor*. Lapangan pencarian sasarannya ditujukan ke pulau-pulau *Morotai* dan *Jailolo* di *Halmahera Utara*. Daerah-daerah ini mereka perkirakan menjadi pangkalan-pangkalan Indonesia, yang dapat menyerang langsung ke pusat-pusat pertahanan Belanda di *Biak* tanpa diketahui dan terlihat oleh pos-pos pengintai dan pendengarannya di kepulauan Raja Empat. *Early warning system* di bagian Selatan dilakukan oleh pos-pos yang diperkuat dengan kegiatan-kegiatan patroli sepanjang pantai. Disamping ini dibantu juga oleh radar yang berada pada kapal-kapal perang dan survey yang bergerak mobil di sepanjang perairan selatan.<sup>57</sup>

Kapal-kapal perang Belanda ditempatkan di Irian Barat secara bergiliran (*aflos-system*). Pada waktu-waktu jadwal penggantian tiba maka akan terdapat

---

<sup>57</sup> Departemen Angkatan Darat, *op.cit.*, halaman 92.

jumlah-jumlah kapal perang yang lebih besar dari susunan tempur yang sejawarnya. Hal demikian seperti terjadi pada bulan April 1961, di perairan Irian Barat terdapat 2 kapal perusak dan 3 kapal kawal perusak. Penggantian-penggantian ini berlaku setiap sebulan sekali.

Jumlah unsur-unsur militer Belanda yang ditempatkan di Irian Barat baru merupakan sebagian kecil dari kekuatan militer seluruhnya yang dimiliki. Maka selalu dapat saja terjadi apabila keadaan memaksa, Belanda akan dapat menggerakkan balabantuannya ke Irian Barat.

Bala-bantuan tersebut diperkirakan berupa:

- a. Kekuatan Darat: Belanda mampu mengirimkan 1 divisi pasukan darat terdiri atas pasukan-pasukan infanteri dan marinier .
- b. Kekuatan Maritim: 1 Kapal Induk, 1 penjelajah, 4 perusak, 2 kapal selam.
- c. Kekuatan Udara: beberapa skwadron tempur dan pembom, pesawat-pesawat udara yang merupakan pelengkap dari kapal induk tersebut.<sup>58</sup>

Penyaluran bala bantuan berupa manusia dan perlengkapan-perengkapan militer yang harus didatangkan dari Negeri Belanda merupakan persoalan pelik bagi Belanda, lebih-lebih setelah menghadapi ancaman yang semakin nyata, dari Indonesia. Menghadapi keadaan yang demikian ini perlu diperhatikan tentang kemungkinan yang ada dengan campur-tangannya beberapa negara dalam pertikaian bersenjata tersebut. Terutama dari negara-negara yang menyokong Belanda dalam perdebatan-perdebatan masalah Irian Barat di sidang Majelis Umum PBB. Campur tangan yang nyata dengan pengiriman pasukan-pasukan bersenjata secara resmi untuk terang-terangan membantu Belanda mungkin tidak akan terjadi. Meskipun demikian tidaklah meniadakan kemungkinan pengiriman semacam korps sukarela yang berasal dari Australia. Sedangkan Armada Ketujuh Amerika Serikat masih tidak tegas selama tidak adanya campurtangan asing lain dalam pertikaian bersenjata tersebut.

Selain itu Indonesia harus juga memperhitungkan tentang kemungkinan peminjaman kepulauan-kepulauan Kokos, Christmas, Singapura dan fasilitas-fasilitas penerbangan di Kalimantan Utara serta Pilipina oleh Belanda untuk keperluan perbekalan dan perawatan alat-alat perangnya dalam kegiatan-kegiatan penyerangan ke wilayah-wilayah pusat pertahanan Indonesia sendiri.

Untuk memperkecil kemampuan Indonesia melakukan ancaman-ancaman ke Irian Barat, maka Belanda tentu akan mempergiat aksi-aksi subversifnya dalam wilayah Indonesia.

Kemampuan pengiriman balabantuan Belanda nampak akan menemui

---

<sup>58</sup> Lampiran B dari Penelaahan Staf GKS dalam Case Study, halaman 5 - 6.

hambatan-hambatan. Garis logistik yang panjang antara Negeri Belanda dan Irian Barat yang memerlukan waktu 1 bulan perjalanan untuk hubungan laut merupakan salahsatu faktor penghambat. Juga perbandingan antara volume angkutan yang dibutuhkan dengan ruangan yang tersedia pada transport laut maupun udara yang terbatas, kecuali bila diadakan usaha-usaha yang intensif untuk memecahkannya dengan konvoi laut atau udara. Selain itu pengurangan kemampuan militer Belanda di Eropa harus disesuaikan dahulu dengan perkembangan politik di benua tersebut dalam rangka perang dingin dengan persetujuan pimpinan organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO = North Atlantic Treaty Organisation).<sup>59</sup>

### 3. DASAR-DASAR PERTAHANAN BELANDA DI IRIAN BARAT

Keadaan medan Irian Barat yang sulit dan hampir-hampir tidak dapat dilalui via darat untuk menghubungkan kedudukan-kedudukan yang satu dengan yang lain, menyebabkan Belanda membuat sistem pertahanan yang sesuai ialah yang disebut sistem "strongpoint". Strongpoint tersebut merupakan titik-titik kuat pertahanan yang tersebar di sepanjang pantai Irian Barat. Masing-masing strongpoint tersebut mempunyai tugas pendengaran dan pengintaian dalam jarak radius tertentu bagi pusat pertahanan yang terletak di belakang. Selain itu strongpoint juga bertugas untuk beberapa waktu mampu menahan kegiatan serangan kita, agar dapat memberikan waktu secukupnya bagi pengiriman bantuan dari daerah belakang, baik berupa tenaga pemukul dari pesawat terbang maupun tenaga tempur berupa pasukan darat (KL) ataupun pasukan korps komando (CM). Patroli darat juga didasarkan pada sistem di atas, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh pasukan-pasukan darat, patroli dilaksanakan melalui laut dan udara. Disamping itu masih ada pula diadakan patroli-patroli kecil oleh polisi.

Penyaluran bantuan tersebut dapat melalui laut maupun udara dengan mempergunakan saluran-saluran dan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Mengingat jenis penyaluran yang tercepat ialah melalui udara, maka lapangan-lapangan terbang merupakan matarantai yang terpenting yang selama ini dipakai juga untuk perhubungan sipil. Di beberapa tempat juga ada lapangan-lapangan pendaratan air, laut dan sungai untuk pesawat-pesawat amfibi dan kapal-kapal pendarat air. Cara tersebut di atas merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh, berhubung penyaluran bantuan melalui darat samasekali tidak mungkin. Jalinan jalan-jalan darat hanya terdapat di sekitar Hollandia (Jayapura), Biak, Manokwari, Sorong, Kaimana dan Merauke, terbatas untuk menghubungkan kepentingan-kepentingan pemerintahan setempat dan obyek-obyek ekonomis. Seluruhnya meliputi jarak sekitar 350 kilometer.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> *op.cit.*, halaman 6.

<sup>60</sup> Lampiran A dari Penelaahan Staf GKS dalam Case Study, halaman 2.

Menghadapi kemungkinan penyerangan Indonesia, maka Belanda telah memperkirakan serangan tersebut dari arah selatan. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut Belanda membagi daerah pertahanan menjadi 3 bagian, ialah:<sup>61</sup>

- a. *Lini pertama*, meliputi seluruh wilayah sebelah selatan pegunungan yang membujur sepanjang Irian Barat, termasuk kepulauan yang berada di pantai selatan. Daerah pertahanan ini berada di bawah tanggungjawab KL (Angkatan Darat Belanda) yang mempunyai nilai tempur defensif cukup baik. Pendidikan mereka dititik-beratkan kepada pertempuran melawan pasukan-pasukan pendarat (beach battler). Pada sisi pantai selatan ini wilayah pertahanannya meliputi daerah Sorong sampai Merauke, dengan strongpoints di Sorong, Fak-Fak, Kaimana, Merauke, Tanah Merah dan Misool.
- b. *Lini kedua*, meliputi daerah sebelah utara pegunungan yang membujur sepanjang Irian Barat, dengan kepulauan yang berada di sekitarnya, tidak termasuk kepulauan Biak. Strongpoints terdapat di kota-kota Manokwari, Middelburg dan Hollandia. Corps Mariniers yang mulai ditarik dari tugas penjagaan pantai selatan mulai akhir tahun 1960, bertanggungjawab atas daerah pertahanan ini. Mulai saat tersebut secara berangsur-angsur tanggung jawab pertahanan darat diserahkan kepada KL. Dengan demikian maka Corps Mariniers ditugaskan sebagai pasukan cadangan strategis, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk maksud-maksud defensif maupun ofensif.
- c. *Lini ketiga*, meliputi daerah kepulauan Biak. Daerah ini merupakan pusat pertahanan dan perbekalan Belanda di Irian Barat yang mengatur penyaluran balabantuan untuk daerah-daerah strong points yang membutuhkannya. Daerah pertahanan terakhir ini juga menjadi tanggungjawab Corps Mariniers. Mereka ini merupakan kesatuan militer Belanda yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi suatu kesatuan modern dengan unit kapal-kapal perangnya. Peralatan dan perlengkapannya telah disesuaikan dengan tugas yang sebenarnya di Eropa dalam hubungan NATO.

Kapal-kapal perang Belanda bertugas mengawasi perairan pantai selatan sampai kepulauan Raja Empat di ujung barat secara terus-menerus dan mobil sifatnya. Penggantian diatur dari Biak, yang juga mengatur pengamanan perairan pantai utara. Selain itu ada kapal-kapal kecil sejenis LST (Landing Ship Tank) yang dipakai oleh kesatuan-kesatuan setempat untuk

---

<sup>61</sup> Lampiran B, *op.cit.*, halaman 3; lihat juga Departemen Angkatan Darat, *op.cit.*, halaman 93-94.

pengamanan daerah-daerahnya masing-masing. Kapal-kapal kecil ini sekaligus dapat juga dipergunakan untuk keperluan transport bahan-bakar dan bahan-makanan, yang dalam keadaan kekurangan volume angkutan dibantu oleh perusahaan pelayaran Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).

Pesawat-pesawat militer umumnya dipusatkan di lapangan terbang Boruku dan Mokmer di Biak. Dalam rangka pengamanan wilayah secara tetap ditempatkan 2 atau 3 buah pesawat Firefly di pulau Jefman atau di seberang pulau tersebut ialah pulau Salawati (Semata). Begitu pula kota-kota Kokas dan Kokenau disinggahi pesawat-pesawat tersebut meskipun tidak sesering di Jefman/Salawati.<sup>62</sup>

Pesawat-pesawat transport Dakota Militer Belanda kadang-kadang bermalam juga di Jefman untuk keperluan logistik. Pada waktu-waktu latihan gabungan antar Angkatan Perang Belanda, juga pesawat Hawker Hunter dan Firefly melakukan kegiatan-kegiatan penerbangan di daerah Sorong tersebut.

Mobiele Politie Belanda bertugas membantu kesatuan-kesatuan setempat untuk memperkuat penjagaan pada daerah tanggungjawab masing-masing. Pusat-pusat mereka di kepulauan Raja Empat, Fak-Fak dan Merauke. Mereka ini giat melakukan patroli-patroli dengan kesatuan KL.

Melihat pembagian-pembagian lini/garis pertahanan dengan susunan 3 daerah pertahanannya, maka ternyata Daerah Pertahanan III dengan pusat Biak merupakan kedudukan yang strategis menguasai keseluruhan daerah pertahanan Belanda di Irian Barat. Atas dasar konsep pertahanan, Belanda memusatkan kekuatan militernya di Biak yang merupakan cadangan strategis. Komando pertahanan keseluruhannya dikendalikan dari Hollandia dan dipegang langsung oleh Angkatan Laut Belanda (KM), mengingat aspek keperluan maritim yang menonjol.

Sedangkan warning-system Belanda diatur sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Pesawat terbang Neptune (P2V7), bertugas mengadakan patroli sepanjang pantai, dengan pangkalan-pangkalan tolak Sorong, Kaimana dan Biak.
- b. Kapal-kapal jenis fregat, perusak dan kapal selam bertugas di perairan pantai utara yang disiapkan dengan kedudukan di Biak untuk sewaktu-waktu dapat membantu patroli pesawat Neptune.
- c. Kapal-kapal fregat, perusak dan kapal selam bertugas di perairan pantai barat dan selatan yang disiapkan dengan kedudukan di Sorong atau Kaimana sewaktu-waktu dapat membantu pesawat Neptune.

---

<sup>62</sup> Departemen Angkatan Darat, *op.cit.*, halaman 95.

<sup>63</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 118.

- d. Pesawat-pesawat terbang jenis Hawker Hunter berkedudukan di Biak sebagai kesatuan .buru-sergap yang siap sewaktu-waktu dibutuhkan.
- e. Setasiun-setasiun radar yang ditempatkan di berbagai tempat kedudukan yang dilalui oleh kapal-kapal atau pesawat-pesawat udara. Jarak radar dari daratan ini diperpanjang dengan radar patroli Neptune, fregat dan perusak.

Sistem logistik diatur dengan Hollandia, Sorong dan Biak sebagai tempat-tempat supply depot utama, penambahan kekuatan militer dilakukan melalui laut dan udara. Manokwari merupakan pangkalan untuk reparasi kapal-kapal Angkatan Laut Belanda, sedangkan Biak dan Sorong merupakan pangkalan-pangkalan operasi dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara Belanda. Secara teoritis, maka sistem pertahanan nampak kuat dan ketat dan sukar ditembus. Tetapi ternyata kemudian bahwa jaring-jaring pertahanan tersebut dapat diterobos dengan infiltrasi-infiltrasi laut dan udara dengan memanfaatkan keadaan medan setempat.

#### 4. PERTEMPURAN LAUT ARAFURU

Suasana tegang makin meruncing antara Indonesia dan Belanda mengenai pertikaian Irian Barat yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan perundingan, kemudian mengarah kepada persiapan-persiapan antara kedua pihak menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbenturan fisik. Baik Belanda maupun Indonesia berjaga-jaga dengan mengerahkan sebagian besar dari kemampuan tempurnya. Semuanya ini dipusatkan di daerah sekitar Irian Barat. Meskipun secara resmi pernyataan perang antara kedua negara belum pernah dipermaklumkan, tetapi kenyataannya perbenturan bersenjata bisa saja terjadi secara terbuka pada setiap waktu dan tempat. Hal ini kemudian benar-benar terjadi pada tanggal 15 Januari 1962 dalam peristiwa yang terkenal dengan pertempuran Laut Arafuru.<sup>64</sup>

Pada waktu itu kesatuan-kesatuan Angkatan Laut Indonesia melakukan tugas-tugas patroli yang intensif terutama di perairan yang berbatasan dengan daerah pendudukan Belanda di Irian Barat dengan kesatuan-kesatuan patroli cepat (fast patroll units). Di wilayah Komando Daerah Maritim VI Maluku, Irian Barat, ditugaskan kapal-kapal jenis MTB (Motor Torpedo Boat) Jaguar sebanyak 3 buah, masing-masing adalah KRI *Macan Tutul* berkedudukan sebagai Komando Kesatuan di bawah Kapten Wiratno sebagai Komandan Kesatuan, KRI *Macan Kumbang* dan KRI *Harimau*. Masing-masing dilengkapi dengan mitralyur berkaliber 20 mm dan 40 mm sedang mengadakan patroli di perairan sekitar pulau Aru.

<sup>64</sup> Press Release PENAL No. 24/62 tanggal 30 Djanuari 1962, vide Baharuddin Lopa SH, *op.cit.*, halaman 111-115.



Dalam rangka perjalanan dinas ke daerah-daerah maritim Indonesia Timur untuk mengetahui kesiap-siagaan tempur kekuatan laut Indonesia, maka suatu team inspeksi yang terdiri dari pejabat penting Markas Besar Angkatan Laut sedang berada di kapal-kapal patroli tersebut. Mereka ini ialah Deputy KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) Komodor Laut Jos Sudarso (Laksamana Muda Anumerta) dan Kolonel Laut R. Sudomo yang menjabat Direktur Operasi dan Latihan Taktis AL (sekarang Laksamana/Wapangab), masing-masing di kapal Komando KRI *Macan Tutul* dan KRI *Harimau*.

Serangan Belanda dimulai pada malam hari sekitar pukul 21.15 waktu setempat (Zone Time I). Kesatuan patroli tersebut berada pada posisi 4 derajat 39 menit lintang selatan dan 135 derajat 2 menit bujur timur, yang menurut perhitungan resmi termasuk dalam wilayah perairan Indonesia, dengan haluan 239 atau arah barat - barat - daya. Tiba-tiba tampak 2 buah pesawat terbang melintasi kesatuan patroli tersebut dengan lampu-lampu yang dipadamkan pada tinggi 3.000 kaki, yang kemudian mengadakan penerbangan rendah berkeliling. Kedua kapal terbang tersebut dikenali sebagai pesawat pembom Neptune bermotor 2 dan pesawat pemburu Firefly bermotor 1. Pada radar kesatuan patroli tersebut dapat ditangkap getaran-gerakan dari 2 kapal laut yang cepat bergerak, masing-masing di belakang dan lambung kanan belakang pada jarak kurang lebih 10 km. Kedua kapal tersebut dikenali masing-masing adalah jenis perusak Province Class dan diduga adalah HRMS *Utrecht*, sedang yang lain adalah jenis fregat yang diduga adalah *Evertsen*.

Dari kedua kapal laut tersebut kemudian ditembakkan peluru-peluru suar (flares) yang menerangi sekitar tempat tersebut dalam usahanya untuk mengetahui secara tepat kedudukan kesatuan patroli. Sesaat kemudian berjatuhlah semburan-semburan air yang amat tinggi di sekitar kapal-kapal MTB, yang menandakan bahwa Belanda mulai menembaki kapal-kapal patroli tersebut dengan meriam-meriam dari jenis kaliber 12 cm. Pesawat-pesawat terbang itu kemudian menjatuhkan pula peluru-peluru suar dari udara tepat di atas kelompok satuan patroli, sehingga musuh makin jelas dapat menentukan posisi sasarannya.

Suatu pelanggaran jelas sudah dilakukan oleh Belanda yang telah berani membuka suatu serangan, justru ketika mereka berada di perairan Indonesia. Dalam situasi yang begitu gawat, di mana kekuatan Belanda jauh melebihi kemampuan balas ketiga kapal patroli tersebut, maka dengan cepat dan tegas Komodor Jos Sudarso segera mengambil-alih pimpinan Komando Patroli. Tembakan-tembakan balasan segera diperintahkan. Suatu pesan-tempur (battle message) disampaikan lewat perhubungan radio yang berbunyi sebagai berikut :

”Kobarkan semangat pertempuran”.

Sementara itu Belanda masih memperhebat tembakan-tembakan meriamnya.

Saat-saat yang kiritis dalam pertempuran Laut Arafuru ini mencapai

puncaknya, ketika ternyata kekuatan laut dan udara Belanda berusaha untuk mengurung ketiga kapal kesatuan patroli. Komodor Jos Sudarso sebagai pimpinan Komando Kesatuan segera mengambil tindakan seperlunya untuk menghindarkan kehancuran ketiga kapal tersebut. Diambilah suatu taktik tertentu dengan mengadakan gerakan-gerakan sedemikian rupa, sehingga musuh terpaksa harus mengalihkan sasaran dengan memusatkan perhatian pada Kapal Komando KRI *Macan Tutul* saja. Dengan demikian kedua kapal yang lain KRI *Macan Kumbang* dan KRI *Harimau* mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari incaran tembakan-tembakan meriam musuh. Muslihat ini ternyata berhasil. Tanpa mengenal bahaya yang mengancam hancurnya kapal itu sendiri, maka KRI *Macan Tutul* tetap bertahan dengan melakukan tembakan-tembakan pembalasan. Tembakan-tembakan meriam musuh lalu dicurahkan dengan memusatkan sasarannya kepada KRI *Macan Tutul*.

Pertempuran Laut Arafuru tersebut sebetulnya berlangsung sangat singkat ialah dalam waktu 20 menit, tetapi dengan intensitas yang tinggi. Seluruh peristiwa itu terjadi dengan semangat yang pantang menyerah sampai detik-detik penghabisan pada diri prajurit-prajurit kita. Pada pukul 21.15 waktu setempat KRI *Macan Tutul* tampak mulai terbakar akibat tembakan-tembakan yang bertubi-tubi, kemudian disusul dengan suatu ledakan yang mungkin disebabkan karena sebuah peluru tepat (*voltreffer*).

Dalam keadaan yang demikian rupa Belanda masih belum puas. Kapal musuh kemudian mengarahkan lampu sorot pada KRI *Macan Tutul*, disusul dengan tembakan-tembakan salvo cepat yang bertubi-tubi dengan senjata jarak dekat berkaliber 40 mm. KRI *Macan Tutul* akhirnya hilang, tenggelam ke bawah permukaan air.

Tembakan-tembakan musuh kemudian dialihkan ke arah kedua kapal patroli yang lain secara membabi-buta. Setelah tidak dapat menemui sasarannya, akhirnya tembakan-tembakan tersebut dihentikan pada pukul 21.55 dengan posisi kapal musuh pada 25 mil sebelah utara timurlaut kepulauan Aru.<sup>65</sup>

Lepas dari hasil-hasil pertempuran itu sendiri, dengan terjadinya perbenturan bersenjata secara fisik di Laut Arafuru ini membuktikan sejelas-jelasnya tentang sejauh mana kuatnya kedua pihak yang terlibat dalam mempertahankan pendirian masing-masing. Selain itu dapat disaksikan juga betapa tingginya semangat tempur yang telah dimiliki Angkatan Perang Republik Indonesia, yang telah mampu mempertahankan kehormatan Tanahairnya melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah terjadinya pertempuran Laut Arafuru ini, maka secara langsung Indonesia mendapatkan keyakinan tentang betapa keharusan untuk menghadapi Belanda secara militer. Hal demikian pada mulanya belum begitu mendapatkan perhatian

---

<sup>65</sup> *Ibid*

yang mendalam baik dari Pemerintah sendiri, maupun dari tiap-tiap Angkatan, ternyata dari tidak adanya bantuan yang dapat segera diberikan, baik dari Angkatan Laut sendiri maupun dari Angkatan-Angkatan yang lain, karena masing-masing sedang dalam keadaan menyusun kekuatan.<sup>66</sup>

## 5. KONSEP GKS TENTANG OPERASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Seperti pernah disebut terdahulu, dalam salahsatu sidang Gabungan Kepala Staf pada tanggal 12 April 1961, Menteri Keamanan Nasional/KSAD memberitahukan adanya Perintah Presiden/PANGTI, supaya GKS mengadakan rencana Operasi Gabungan Irian Barat. Rencana Operasi ini akan dituangkan dalam suatu penelaahan staf mengenai usaha "B" (Operasi Militer) dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sebelumnya itu telah dilakukan kegiatan-kegiatan infiltrasi spontan secara perseorangan atau dalam kelompok-kelompok kecil dari Kepulauan Maluku menuju Irian Barat.<sup>67</sup> Infiltrasi semacam ini biasa disebut sebagai usaha "A". Kemudian untuk menampung hasrat rakyat yang meluap-luap, maka penyusupan-penyusupan tersebut ditampung dan disalurkan dengan SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) I sebagai penanggung-jawab kegiatan-kegiatan itu, Koordinasi usaha-usaha pembebasan Irian Barat ini ternyata juga disarankan oleh GKS kepada pemerintah untuk penyempurnaan dan kelancaran tugas-tugas tersebut.

Pembuatan Rencana Gabungan Operasi Irian Barat diserahkan kepada para wakil dari masing-masing Kepala Staf di GKS khususnya mengenai soal-soal Irian Barat, bersama-sama dengan para ketua Panitia Tetap Operasi, Intelijen dan Logistik dari GKS. Mereka membentuk suatu Panitia Penyusun Rencana Operasi Gabungan Irian Barat yang diketuai oleh Deputy II KSAD Mayor Jenderal Soeharto (sekarang Presiden Republik Indonesia), Letkol Udara Penerbang R.I.S. Wirjosaputro, Asisten I KSAU, Direktur Operasi A/B MBAU Letkol Udara Penerbang Sri Muljono Herlambang dan Direktur Operasi MBAL Letkol (Pelaut) Sudomo. Panitia ini mengadakan rapat pertama pada tanggal 13 Juli 1961. Suatu konsep penelaahan Staf mengenai Irian Barat yang dipimpin oleh Kepala Staf CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat) Kolonel Achmad Wiranatakusumah telah disampaikan dalam sidang dan diterima sebagai "kertas" kerja. Pada tanggal 20 Juni 1961 dalam rapat Panitia berikutnya dikemukakan oleh Ketua Rapat bahwa Pemerintah telah minta agar telaahan staf yang sedang disiapkan harus sudah siap sebelum tanggal 1 Juli 1961. Rapat tersebut juga menyatakan bahwa pada tingkatan GKS pada waktu itu belum dapat disusun suatu rencana perang (*plan de campagne*) yang benar-benar terperinci, karena Pemerintah belum juga

---

<sup>66</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 99.

<sup>67</sup> *Vidya Yudha*, *Madjalah Bulanan Pussemad*, No. 6 Th. II/1969, halaman 74.

memberikan ketentuan-ketentuan pokok yang diperlukan untuk dipakai sebagai petunjuk perencanaan (*planning directives*) seperti obyek-obyek strategis apa sajakah yang jadi sasaran operasi tersebut.

Maka diputuskan dalam rapat tersebut mengenai penyusunan suatu "penelaahan staf" mengenai usaha "B" (Operasi Militer) dalam rangka pembebasan Irian Barat, yang dimaksudkan guna dapat membantu Pemerintah untuk membuat ketentuan-ketentuan pokok agar kemudian bisa dipakai sebagai petunjuk perencanaan GKS. Selain itu GKS juga menyadari bahwa pekerjaan penelaahan tersebut sebetulnya tugas dari suatu badan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu suatu Dewan Pertahanan Nasional, Dewan semacam inilah yang berwenang menggariskan pengertian-pengertian yang lebih luas tentang aspek-aspek ekonomi, kemungkinan-kemungkinan intervensi dan persekutuan-persekutuan dengan negara-negara lain, yang dalam penelaahan-penelaahan GKS ini hanya dibatasi dalam segi-segi tehnik militer saja. Hal inilah yang kemudian mendorong pembentukan Dewan Pertahanan Nasional pada akhir tahun 1961.

Sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan Pemerintah, maka pada tanggal 30 Juni 1960 telah dikirim kepada Presiden/PANGTI (Panglima Tertinggi) suatu telaahan staf mengenai usaha "B" (Operasi Militer) dalam rangka pembebasan Irian Barat.<sup>68</sup> Dalam uraian telaahan staf tersebut diberikan penggambaran-penggambaran sejauh mungkin mengenai kemungkinan-kemungkinan mengenai operasi militer Pembebasan Irian Barat. Kemungkinan-kemungkinan tentang bantuan dari sekutu-sekutu Belanda belum dimasukkan karena masih dipertimbangkan. Jadi hanya dipertimbangkan kekuatan militer Belanda yang ada di Irian Barat saja, yang dapat ditambah dengan bala-bantuan dari Negeri Belanda sendiri, diperkirakan akan datang setelah 1 (satu) bulan terjadinya clash pertama antara Indonesia dengan Belanda. Keadaan politik dan ekonomi dalam negeri dianggap tidak memburuk dan kebutuhan-kebutuhan peralatan bagi pengembangan ketiga Angkatan dianggap dapat dipenuhi tanpa adanya rintangan dan pembatasan-pembatasan.

Ada tiga kemungkinan usaha pembebasan Irian Barat melalui operasi militer yang dikemukakan yaitu :

- a. *Operasi B-1*, dengan merebut dan mempertahankan seluruh Irian Barat dalam waktu secepat-cepatnya dengan tujuan memperoleh kekuasaan de-facto atas seluruh wilayah tersebut.
- b. *Operasi B-2*, dengan merebut dan mempertahankan suatu bagian di daerah Irian Barat dengan tujuan menimbulkan suasana politik yang menguntungkan kita, serta mendapatkan basis yang lebih depan untuk merebut seluruh wilayah Irian Barat.

---

<sup>68</sup> Uraian lengkap lihat: Komando Mandala Pemirbar, Laporan Komando Bidang G-2 (operasi) Mandala Pembebasan Irian Barat, Lampiran D (stensilan).

- c. *Operasi B-3*, dengan merebut dan mempertahankan seluruh wilayah Irian Barat atau suatu sasaran terbatas/bagian tertentu dalam wilayah tersebut oleh pasukan-pasukan yang didaratkan dengan taktik infiltrasi.

Di antara ketiga kemungkinan Operasi Militer tersebut, maka Operasi B-1 dianggap paling baik apabila dilaksanakan, tetapi membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan memakan waktu. Diperkirakan paling sedikit dua divisi infanteri dengan kekuatan laut dan udara yang lazim dapat memberikan bantuan secukupnya bagi gerakan-gerakan pasukan tersebut. Keunggulan di laut dan di udara merupakan syarat mutlak untuk melindungi pangkalan-pangkalan depan, garis komunikasi, logistik dan daerah-daerah yang cukup dengan fasilitas-fasilitas (*base facilities*) yang cukup kuat.<sup>69</sup> Dalam persyaratan yang demikian, maka diperkirakan pengembangan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, baru dapat mendekati kebutuhan-kebutuhan tersebut kurang lebih pada akhir tahun 1963. Keuntungan yang dapat ditarik dengan dilaksanakannya Operasi B-1 diperkirakan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu yang relatif pendek (kurang lebih satu bulan), kita sudah dapat merebut/menduduki dan menghancurkan kekuatan militer Belanda di Irian Barat.
- b. Bantuan militer yang akan datang dari Negeri Belanda tidak diberi waktu cukup untuk datang dengan sempurna.
- c. Belanda akan kehilangan pangkalan-pangkalan operasionilnya yang dapat dipakai untuk mengganggu daerah-daerah pedalaman kita, dengan kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dan Udaranya.

Segi kerugian dari pada pelaksanaan Operasi B-1 ini ialah bahwa :

- a. Kita harus masih menunggu pengembangan Angkatan-angkatan sampai akhir 1963.
- b. Seluruh anggaran belanja Negara harus dikerahkan untuk pembiayaan operasi ini.
- c. Pembangunan negara secara keseluruhan akan terdesak atau tertunda karenanya.

Untuk pelaksanaan Operasi B-2 dibutuhkan satu divisi infanteri lengkap dengan unsur-unsur bantuan tempur dan bantuan administrasi yang mampu menyerang dan mempertahankan sasaran-sasaran terbatas dalam jangka waktu 1 tahun. Keunggulan laut dan udara tetap merupakan syarat mutlak berhasilnya operasi ini, sedangkan bantuan-bantuan taktis dan logistik bagi kesatuan-kesatuan darat tidak sebesar yang dibutuhkan seperti untuk keperluan Operasi B-1. Karena daerah-daerah terbatas yang harus direbut dan dipertahankan diperkirakan untuk ini 1 tahun lamanya, maka ini berarti

---

<sup>69</sup> *op.cit.*, halaman 4.

pembiayaan yang diperlukan jadi jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan biaya untuk Operasi B-1. Melihat kemampuan-kemampuan ketiga Angkatan, maka ternyata bahwa hanya AD yang dapat melaksanakan Operasi B-2 pada akhir tahun 1962, sedangkan AL dan AU pada waktu itu baru mencapai 60% dan 70% dari syarat kemampuan yang dibutuhkan untuk memungkinkan berhasilnya operasi itu.

Maka keuntungan-keuntungan yang diperkirakan dapat ditarik dari operasi ini ialah bahwa :

- a. Apabila operasi ini berhasil, akan dilaksanakan kekuasaan de-facto atas sebagian dari daerah Irian Barat.
- b. Kita akan mempunyai pangkalan yang lebih depan untuk melancarkan operasi selanjutnya.

Sedangkan kerugian-kerugian yang diperkirakan kemungkinan-kemungkinannya ialah bahwa :

- a. Musuh mendapatkan kesempatan untuk memperkuat kedudukannya dengan memperoleh bantuan kekuatan militer dari Negeri Belanda.
- b. Selain itu mereka mempunyai basis di daerah-daerah Irian Barat.
- c. Kesempatan lebih besar bagi mereka untuk kemungkinan merusak dan menghantam komunikasi antara kepulauan kita, yang akan merusak ekonomi dan pembangunan Indonesia umumnya.

Karena besarnya anggaran belanja, maka semua kegiatan pembangunan akan berhenti dan semua kekuatan sementara diarahkan untuk pelaksanaan operasi tersebut, yang berarti penambahan anggaran belanja Negara. Keunggulan-keunggulan di laut dan di udara yang sudah diciptakan, diperkirakan tidak akan dipergunakan secara maksimal, karena daerah-daerah yang diduduki hanya berupa sasaran-sasaran terbatas saja. Dan semua persiapan pembangunan ketiga Angkatan tersebut baru selesai pada akhir tahun 1963.

Bagi pelaksanaan Operasi B-3 kebutuhan-kebutuhan operasional hampir sama dengan Operasi B-1 dan Operasi B-2, hanya dikurangi bantuan-bantuan taktis dan administratif untuk kesatuan-kesatuan yang mengadakan operasi. Di lain pihak dibutuhkan komando sebesar 2 atau 3 brigade AL dan AU berfungsi untuk mendaratkan secara diam-diam (*silent landing*) dropping pasukan-pasukan di daerah musuh dan selanjutnya menjamin kelangsungan dari bantuan logistik untuk pasukan di darat. Keuntungan-keuntungan dengan dilaksanakannya Operasi B-3 diperkirakan ialah hanya waktu persiapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi B-3 ini lebih pendek.

Kerugian-kerugiannya ialah :

- a. Bahwa Operasi B-3 ini sedikit sekali dapat dikendalikan dan diperhitungkan secara pasti kemenangan-kemenangan yang akan dicapai.
- b. Apabila Belanda mengetahui persiapan pelaksanaan operasi ini,

kemungkinan besar akan timbul perang terbuka (open war), sedangkan kesiapan di bidang militer kita belum selesai untuk beralih kepada Operasi B-1 dan B-2.

- c. Maka Belanda akan lebih leluasa melancarkan pemboman ke pedalaman Indonesia, sehingga dapat merusak ataupun menghambat kegiatan pembangunan kita.
- d. Kegagalan Operasi B-3 akan berakibat kegagalan total dari Operasi B seluruhnya.
- e. Inisiatif di segala bidang akan beralih ke tangan musuh, dan ini akan menimbulkan efek yang lebih jelek terhadap masyarakat.<sup>70</sup>

Dengan uraian-uraian perbandingan antara ketiga jenis rencana Operasi tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 1962 belum dapat dilaksanakan salahsatu operasi tersebut di atas yang mempunyai kemungkinan akan membawa hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Operasi B-1 diperkirakan dapat dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 1963. Kemungkinan besar operasi ini berhasil karena pengembangan-pengembangan Angkatan sudah mendekati persyaratan kebutuhannya, tetapi apabila dilaksanakan pada akhir tahun 1962 tentu akan memberikan kemungkinan berhasil yang semakin kecil. Dan berhasilnya Operasi B-2 tidaklah berarti bahwa hasil tersebut menentukan sifatnya. Demikian juga dengan Operasi B-3 yang walaupun dilaksanakan, tetapi sangat besar akibatnya, karena keuntungan daripada operasi ini tidak memuaskan bila dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang akan diderita.

Maka GKS telah menyarankan dilaksanakannya Operasi B-1 dengan cara merebut dan mempertahankan seluruh wilayah Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan tujuan memperoleh kekuasaan de-facto seluruh wilayah Irian Barat.

Dengan terbentuknya Komando Mandala pada awal tahun 1962, maka penelaahan dari GKS dipakai sebagai bahan utama dalam pembuatan rencana-rencana operasi yang akan dilaksanakan di Irian Barat. Berhubung dengan mendesaknya waktu karena situasi percaturan politik dunia dalam rangka sengketa Irian Barat, maka telah dikeluarkan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi ABRI No. 1 Tahun 1962. Selain pembentukan organisasi Staf dan Komando Mandala, juga telah dibuat suatu bimbingan perencanaan yang merupakan perencanaan pelaksanaan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No. 1 Tahun 1962 tersebut yang bertugas menciptakan dalam waktu sesingkat-singkatnya secara de-facto daerah-daerah bebas atau mendudukkan kembali kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Irian Barat. Untuk pengarahannya daripada pengenalan situasi Irian Barat dipakai bahan-bahan dari Perkiraan Intelijen bagi kondisi-kondisi kekuatan

---

<sup>70</sup> Penelaahan Staf GKS, *op.cit.*, halaman 27.

Belanda, sedangkan kekuatan sendiri dipakai bahan telaahan Staf GKS. Sedangkan perkembangan-perkembangan kemajuan perjuangan di bidang diplomasi didapatkan dari Staf Operasi Pembebasan Irian Barat.

Pelaksanaan dari Bimbingan Perencanaan tersebut meliputi dan menyangkut tugas-tugas umum Komando Mandala secara keseluruhan dan tugas-tugas khusus yang telah digariskan untuk tiap-tiap komponen, yaitu AD Mandala, AL Mandala, AU Mandala, Komando Pertahanan Udara Gabungan (KOHANUDGAB) dan Angkatan Tugas Gabungan. Pelaksanaan tugas-tugas umum berupa konsep kampanye Irian Barat, di mana Komando Mandala Pembebasan Irian Barat secara berangsur-angsur harus menduduki bagian-bagian dari wilayah Irian Barat. Dengan demikian memungkinkan dapat berjalannya Pemerintahan Daerah Republik Indonesia di daerah-daerah yang telah diduduki tersebut.

Kampanye-kampanye tersebut dijalankan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut :

a. *Tahap infiltrasi.*

Tahap ini direncanakan bahwa sampai akhir tahun 1962 dilakukan dengan jalan infiltrasi dalam jangka waktu 10 bulan, diharapkan sebanyak 10 kompi inti Angkatan yang harus telah berhasil masuk dan membentuk kantong-kantong daerah bebas Republik Indonesia di Irian Barat. Tujuan gerakan-gerakan ini ialah untuk menciptakan dan mempertahankan daerah-daerah bebas tersebut dan selain itu dapat mengikat kekuatan-kekuatan Belanda setempat. Dengan demikian kekuatan musuh tercerai-berai.

b. *Tahap Eksploitasi.*

Tahap ini diperkirakan paling lambat harus dapat dilaksanakan pada awal tahun 1963 dengan pertimbangan apabila perjuangan di bidang diplomasi menang, mengharapakan tahap perjuangan itu selesai dilaksanakan. Hal ini juga tidak bisa lepas dari hasil persiapan yang dapat dicapai dengan pelaksanaan tahap infiltrasi. Secara fisik tahap eksploitasi berjalan dengan gerakan-gerakan yang terang-terangan oleh operasi-operasi militer secara besar-besaran untuk merebut dan menduduki pulau Biak sebagai pusat pertahanan strategis Belanda di Irian Barat. Tujuan daripada tahap eksploitasi ini ialah melumpuhkan inti kekuatan militer musuh sedemikian rupa, sehingga seluruh wilayah Irian Barat dapat dikembalikan pada kekuasaan Republik Indonesia.

c. *Tahap terakhir ialah Konsolidasi.*

Ialah mengadakan konsolidasi kekuasaan Republik Indonesia di seluruh wilayah Provinsi Irian Barat. Tugas-tugas khusus bagi komponen-komponen kekuatan yang tergabung dalam Komando Mandala terbagi-bagi juga sesuai dengan jadwal tahap-tahap.



infiltrasi, eksploitasi dan konsolidasi yang pada garis besarnya bersamaan, ialah merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi infiltrasi di mana tiap komponen darat, laut dan udara saling memberikan unsur-unsur bantuan.

Dalam persiapan tahap eksploitasi inilah tiap-tiap komponen harus menyelenggarakan dan menyiapkan pembinaan manusia, materiil dan pasukan yang diperlukan untuk fase eksploitasi.

1. Untuk AD Mandala dalam hal ini dibutuhkan kekuatan sebesar 2 divisi infanteri dan unsur-unsur bantuan (1 divisi cadangan).
2. Komponen Mandala yang lain merencanakan dan menyiapkan pembinaan materiil dan kesatuan-kesatuan AL, AU, kesatuan-kesatuan pertahanan udara yang masih akan ditentukan besarnya yang diperlukan untuk fase eksploitasi oleh Panglima Mandala.

Dalam hal menghadapi kemungkinan agresi musuh, setiap komponen supaya :

1. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan usaha-usaha pertahanan darat, laut dan udara aktif di daerah komunikasi masing-masing sesuai dengan petunjuk-petunjuk Panglima Mandala.
2. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan usaha-usaha pembangunan pangkalan-pangkalan darat, laut dan udara dalam wilayah sesuai dengan petunjuk-petunjuk strategis Panglima Mandala.
3. Merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan usaha-usaha konsolidasi di kantong-kantong yang telah dibebaskan sebagai hasil dari operasi-operasi dalam fase infiltrasi.

AD Mandala memimpin kampanye operasi militer gabungan, gerakan militer terang-terangan merebut dan menduduki pulau Biak sesuai petunjuk-petunjuk Panglima Mandala. Sedangkan AL Mandala, AU Mandala dan KOHANUDGAB bertugas menyiapkan penyelenggaraan usaha-usaha operasi laut gabungan dan operasi udara gabungan dalam rangka perebutan Pulau Biak tersebut. Kemudian merencanakan persiapan penyelenggaraan pemerintahan militer/sipil di daerah-daerah yang dikuasai bagi AD Mandala; AL Mandala serta AU Mandala menyiapkan penyelenggaraan operasi-operasi laut dan udara untuk menjamin keamanan antar-laut dan antar-udara, di seluruh daerah tempur dan daerah komunikasinya.

Untuk fase terakhir ialah konsolidasi, maka tiap komponen Mandala:

1. Merencanakan dan menyiapkan kesatuan-kesatuan yang nantinya akan ditempatkan di Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari unsur-unsur pasukan Republik Indonesia yang dapat membantu menjamin keamanan di wilayah Provinsi tersebut.

2. Menyiapkan diri untuk menerima perintah-perintah selanjutnya dari Panglima Mandala.

Bimbingan perencanaan dari Panglima ini tertanggal 6 Pebruari 1962 dengan penjelasan-penjelasan, bahwa tentang angkatan-tugas gabungan baru akan dibentuk dan ditentukan tugas-tugasnya secara tersendiri. Instruksi koordinasi memberikan ancar-ancar jadwal waktu mulai dan akhir pelaksanaan setiap fase sebagai berikut :

- a. Awal 1962 fase infiltrasi dimulai, persiapan-persiapan untuk fase-fase selanjutnya.
- b. Akhir tahun 1962 persiapan untuk fase eksploitasi, harus sudah selesai secara minimal.
- c. Awal 1963 fase eksploitasi dimulai bila dikehendaki oleh politik. Meneruskan fase infiltrasi jika diperlukan oleh Panglima Mandala dan persiapan-persiapan untuk fase terakhir.
- d. Akhir 1963 selesai fase eksploitasi bila harus dilancarkan, fase terakhir dimulai.

Panglima Mandala meminta laporan tiap bulan atas segala persiapan-persiapan penyelenggaraan tugas-tugas komponen Mandala. Untuk kelengkapan Staf Gabungan Mandala maka Panglima Mandala pada tanggal 28 Januari 1962 menunjuk Kolonel Infanteri A. Tahir sebagai Kepala Staf Gabungan Mandala dengan personil inti Komponen Mandala Kolonel (P) Sudomo sebagai Panglima AL Mandala, Kolonel Penerbang Udara Leo Wattimena sebagai Panglima AU Mandala, dan Panglima Mandala merangkap sebagai Panglima AD Mandala. Sedangkan Panglima KOHANUDGAB dirangkap oleh Panglima AU Mandala. Markas Besar Komando Mandala yang mula-mula berkedudukan di Jakarta dengan menumpang di Markas Besar CADUAD, kemudian pada tanggal 12 Maret 1962 sesuai dengan ketetapan Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Barat, dipindahkan ke Makassar. Jarak yang cukup jauh antara Markas Besar KOTI dengan daerah operasi Irian Barat menimbulkan kebutuhan adanya pos-pos komando antara.

## 6. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOMANDO MANDALA PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Setelah Pengumuman Tri Komando Rakyat yang secara resmi dicanangkan pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, maka segera dilakukan perumusan mengenai kelanjutan langkah-langkah pelaksanaan yang akan diambil guna mewujudkan perintah-perintah yang tercantum di dalamnya. Suatu Komando pelaksanaan utama yang mempunyai wilayah medan dengan wewenang tertentu perlu dibentuk, yang meliputi semua matra dengan tugas menyelenggarakan operasi-operasi militer untuk perjuangan merebut wilayah Irian Barat.

Suatu musyawarah Dewan Pertahanan Nasional telah berlangsung di Bogor pada tanggal 31 Desember 1961, untuk memberikan pandangan-pandangan terakhir tentang perumusan pembentukan komando pelaksana utama tersebut, yang dihadiri juga oleh pejabat-pejabat tertinggi ABRI serta staf operasi Pembebasan Irian Barat.<sup>71</sup> Maka akhirnya tanggal 2 Januari 1962 dikeluarkan suatu keputusan Presiden selaku Panglima Tertinggi/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat No. 1 Tahun 1962 mengenai pembentukan suatu komando Mandala yang bersifat gabungan dan meliputi wilayah Indonesia bagian Timur dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan Trikora dan Perintah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, menyelenggarakan pada waktunya operasi-operasi militer dalam perjuangan merebut Irian Barat, yang diduduki Belanda.
2. Memimpin dan mempergunakan baik segala pasukan bersenjata maupun segala macam barisan perlawanan rakyat dan lain-lain unsur potensi nasional. Ditentukan juga bahwa dalam menunaikan tugas untuk kepentingan kesatuan tindakan dalam daerah operasi Irian Barat, maka Komando Mandala tersebut didampingi oleh Staf Pemerintah Daerah Provinsi Irian Barat bentuk baru.

Sebagai petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas Komando Mandala, telah dikeluarkan instruksi Presiden/PANGTI ABRI/Panglima Besar KOTI PEMIRBAR No. 10 Tahun 1962, yang memuat dua tugas sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang politik dan supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de-facto diciptakan daerah-daerah bebas dan/atau didudukkan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan istilah "Mandala" ialah suatu bagian wilayah gelanggang perang yang di dalamnya meliputi bagian-bagian daratan, lautan dan udara yang diperlukan untuk operasi-operasi militer berhubungan dengan tugas operasi-operasi tersebut. Suatu daerah Mandala ditentukan oleh Panglima Tertinggi ABRI atas saran dari Gabungan Kepala Staf, yang

---

<sup>71</sup> Baharuddin Lopa SH, *op.cit.*, halaman 193.

<sup>72</sup> Lampiran B dari Case Study, halaman 3.

biasanya menetapkan sesuatu daerah seluas diperlukan untuk keperluan penempatan, pendudukan dan administrasi dari pasukan-pasukan yang ditempatkan di dalamnya. Dimensi-dimensi kewenangan yang cukup lebar dan dalam diperlukan untuk menjamin keleluasaan ruang-gerak operasi-operasi darat, laut dan udara serta pengamanan penyelenggaraan garis-garis perhubungan.

Dalam rangka pengertian di atas, maka Komando Mandala Pembebasan Irian Barat merupakan sesuatu kekuatan gabungan di bawah seorang Panglima Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara, merupakan komponen-komponen yang ditugaskan membantu dalam Komando Mandala tersebut.

Komando Mandala bertanggungjawab kepada Panglima Tertinggi/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, yang menetapkan struktur kekuatan komando yang harus diberikan oleh tiap-tiap Angkatan. Masing-masing Angkatan bertanggungjawab tentang administrasi dan bantuan kekuatan tersebut, yang sepenuhnya berada dalam kendali operasional Panglima Mandala. Pemindahan dalam kekuatan tersebut berdasarkan wewenang yang diatur oleh Panglima Tertinggi/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Panglima Mandala disamping bertanggungjawab dalam bidang operasional dan strategis juga mempunyai wewenang dan tanggungjawab koordinasi bantuan administrasi dan logistik terhadap pasukan-pasukan tiap Angkatan yang diperlukan untuk mengadakan kesiapan militer yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Suatu Staf Gabungan yang terdiri dari anggota-anggota komponen Angkatan berada di bawah Panglima Mandala, terdiri dari Kepala Staf Komando Mandala serta Wakil Satu dan Wakil Dua Panglima/Komando Mandala. Pada garis Komando, Panglima Mandala membawahi Angkatan Darat Mandala (ADLA), Angkatan Laut Mandala (ALLA) dan Angkatan Udara Mandala (AULA), Komando Pertahanan Udara Gabungan (KOHANUDGAB) dan Pasukan Gabungan Mandala. Tugas dari tiap-tiap Panglima Angkatan Mandala adalah memberi dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi pada Panglima Mandala dalam hal penggunaan yang wajar dari pasukannya. Mereka ini bertanggungjawab tentang administrasi ke dalam, latihan-latihan taktis dalam Angkatan masing-masing, fungsi-fungsi logistik dan penggunaan taktik pasukan masing-masing Angkatan sesuai dengan Rencana Panglima Mandala. Panglima Angkatan Mandala bertugas meminta dan mengusulkan kesatuan-kesatuan tertentu yang diperlukan untuk tugas khusus dalam rangka keperluan operasional Panglima Mandala.

Komando Mandala berkedudukan langsung di bawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang dirangkap oleh Presiden, sedangkan WAMPA (Wakil Menteri Pertama) Menteri Pertahanan Keamanan/KASAB (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) menjabat sebagai Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 101.

Staf Komando Tertinggi yang dibantu oleh Gabungan Kepala Staf merupakan badan tetap yang mendampingi PANGTI dan wakilnya dalam menggariskan kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam rangka pembebasan Irian Barat. Kepala Staf KOTI dipegang oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat.

Pada tanggal 11 Januari 1962 ditetapkan Panglima Mandala ialah Brigadir Jenderal Soeharto yang sekaligus dinaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal dan dibantu oleh dua Wakil Panglima dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebagai Wakil Satu Panglima Mandala ditetapkan Kolonel (P) Subono dan sebagai Wakil Dua Panglima Mandala diangkat Kolonel (U) Penerbang Leo Wattimena, yang masing-masing dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor.

Suatu Staf Gabungan Mandala kemudian dibentuk yang berfungsi membantu Panglima Mandala dalam melaksanakan fungsi-fungsi Komandonya.

Staf Gabungan ini berkewajiban :

1. Melaporkan kepada Panglima tentang bagaimana keputusan-keputusannya yang telah dituangkan dalam rencana-rencana, perintah-perintah serta petunjuk-petunjuk pelaksanaannya.
2. Mencari dan melengkapkan segala keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Komandan.
3. Mengolah perincian dan rencana, menuangkan keputusannya menjadi rencana-rencana dan perintah-perintah.
4. Meneruskan kepada Komandan-komandan dari Komponen Angkatan atau anggota-anggota Staf lain yang membutuhkan.
5. Kewajiban Staf ialah secara terus-menerus mengadakan penelitian, mempelajari keadaan situasi, memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk diperintahkan Komandan dan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan masadepan.

Dari segi organisasi Staf Gabungan Mandala, maka Kepala Staf Mandala berada langsung di bawah Panglima dengan dua Wakil sebagai pembantu masing-masing di bidang Operasi dan Administrasi. Sebuah Sekretariat bekerja langsung di bawah pengawasan Kepala Staf, bertanggung-jawab atas kelancaran administrasi. Staf Gabungan Mandala terdiri dari dua bagian, yakni: Staf Umum dan Staf Khusus.

Staf Umum terdiri dari :

- a. Gabungan 1 (G-1) - Intelijen
- b. Gabungan 2 (G-2) - Operasi
- c. Gabungan 3 (G-3) - Kepegawaian/Administrasi
- d. Gabungan 4 (G-4) - Logistik
- e. Gabungan 5 (G-5) - Teritorial & Perlawanan Rakyat
- f. Gabungan 6 (G-6) - Perhubungan.

Staf Khusus meliputi beberapa Perwira Staf yang terdiri dari :

- a. Inspektur Jenderal
- b. Ajudan Jenderal
- c. Perwira Kesehatan
- d. Perwira Hukum.
- e. Komando Kompi Markas
- f. Perwira Polisi Militer
- g. Perwira Penerangan dan Pendidikan (ke dalam)
- h. Perwira Penerangan Rakyat (ke luar).
- i. Perwira Keuangan
- y. Perwira Angkutan dan
- k. Perwira Rohani.<sup>74</sup>

Staf Umum bertindak dalam bidang koordinasi operasional, sedang Staf Khusus bertindak dalam bidang koordinasi pembinaan.

Selain Staf Gabungan tersebut terdapat kelompok khusus ialah Penasehat Politik, yang mempunyai tugas tersendiri. Kewajibannya dapat dikatakan sebagai perwira penghubung dan penasehat soal-soal politik. Di dalam kelompok ini dapat ditentukan penasehat Panglima dan Staf mengenai persoalan hubungan luar negeri. Meskipun erat sekali hubungannya dengan Staf tetapi kegiatannya tetap berdiri sendiri.

Tugas Panglima Mandala dapat ditetapkan dalam suatu rencana perang yang telah disetujui, atau dapat juga dinyatakan dengan suatu instruksi atau perintah lain dari Presiden/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Barat. Tugas tersebut biasanya banyak sekali diserahkan kepada kebijaksanaan Panglima Mandala, dengan jalan diajak berunding dahulu sebelum rencana-rencana tersebut diumumkan. Ia dapat dipanggil untuk membuat saran-saran dan menyiapkan rencana-rencana yang bersangkutan dengan tugasnya. Sedangkan Kepala Staf ialah pembantu umum dan penasehat Panglima Mandala yang mengatur pembagian tugas dari semua bagian dan staf. Ia mempunyai hubungan langsung setiap waktu dengan Panglima dan menjamin bahwa kebijaksanaan dan petunjuk-petunjuk dari Panglima dilaksanakan oleh Staf.

## 7. PEMBENTUKAN POS-POS KOMANDO

Sesuai dengan fungsi staf Komando Mandala dalam kesatuan operasi maka diatur kedudukan pos-pos komando yang biasa dibagi dalam tiga tingkatan, sesuai dengan keperluan-keperluan untuk tugas dan operasi yang akan dihadapi. Tujuan dari pos-pos komando ini ialah agar Panglima

---

<sup>74</sup> Lampiran C dari Case Study mengenai Kegiatan-kegiatan Komando Mandala, *op.cit.*, halaman 3.

Mandala dapat mengendalikan operasi maupun administrasi sebaik-baiknya. Pembagian tingkatan pos-pos komando ialah Pos Komando Belakang, Pos Komando Utama dan Pos Komando Taktis/Pos Komando Depan.<sup>75</sup> Karena segi komunikasi sangat penting nilainya untuk pimpinan operasi-operasi, maka letak-letak Posko diusahakan agar memudahkan dalam hal komunikasi antar kesatuan-kesatuan maupun dengan komando atasannya. Suatu pos komando harus berada pada suatu tempat yang cukup jauh ke depan untuk memudahkan kunjungan sewaktu-waktu dari Panglima dan stafnya. Dalam hal ini Panglima harus seringkali melakukan kunjungan-kunjungan tersebut, agar dengan mata-kepala sendiri dapat mengetahui situasi serta perkembangan-perkembangan rencana operasinya. Selain itu dapat membantu pengaruh ke-siap-siagaan prajurit dalam lingkungan Komandonya. Juga harus bisa diusahakan agar Posko kesatuan yang besar jumlahnya tidak boleh terlalu jauh ke depan dari garis batas daerah musuh, sehingga mudah terlihat apabila pertempuran-pertempuran berlangsung. Maka dalam menetapkan suatu tempat untuk dijadikan pos komando harus dipikirkan baik-baik dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan penempatan pasukan, rencana-rencana operasi yang sedang dan akan dilancarkan serta ruangan yang cukup mempunyai daerah bagi perlindungan maupun keamanan umumnya (terugwal-basis).

Posko belakang merupakan bagian dari Staf Komando dengan tugas dan fungsinya yang dititik-beratkan kepada soal-soal administrasi sehingga dapat menyelenggarakan suatu bantuan administrasi sedemikian rupa untuk memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan operasi yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan. Posko Utama yang meliputi bidang-bidang Intel, Operasi, Personil, Logistik, Teritorial dan Perhubungan membuat perencanaan, baik taktis maupun strategis. Di Posko Depan ditempatkan suatu staf taktis kecil tetapi lincah dengan tenaga-tenaga Staf Mandala yang benar-benar diperlukan sekali untuk membantu Panglima. Sebaliknya dengan Posko Utama, maka Posko Depan ini tidak membuat rencana-rencana operasi, melainkan semua kegiatan semata-mata ditujukan untuk mengendalikan, mengawasi serta mengkoordinasikan semua rencana dan instruksi yang telah dikehuarkan oleh Posko Utama. Sifat lincah dari Posko Depan ialah dalam hal ke-wenangannya untuk mengambil tindakan-tindakan sendiri menurut perkembangan operasi yang sedang berlaku, perlu segera dilakukan Posko pada intinya terdiri dari Panglima Mandala yang hanya sewaktu-waktu saja hadir di sana, Wakil-wakil Panglima Mandala yang bertugas secara bergilir. Sedangkan Kelompok Taktis merupakan pelaksana yang terdiri dari unsur-unsur intelijen, operasi, logistik, perhubungan, pembantu administrasi dan kelompok detasemen. Dari segi keamanan, Posko Depan selain dibantu oleh unsur-

---

<sup>75</sup> Lampiran K dari Case Study mengenai Kegiatan-kegiatan Komando Mandala Siaga, *op. cit.*, halaman 1-2

unsur keamanan sendiri juga dibantu oleh Komando-Komando Daerah Angkatan Darat, Laut dan Udara setempat.

Tugas Posko Depan ialah :

- a. Langsung memimpin operasi-operasi yang berlaku saat itu, sesuai dengan petunjuk-petunjuk operasi yang telah dibuat oleh Posko utama.
- b. Dalam keadaan situasi operasi berubah, dapat memberikan perintah modifikasi atas jalannya operasi-operasi, akan tetapi sejauh mungkin tetap dalam garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk operasi.
- c. Mengendalikan rentetan-rentetan tindakan-tindakan taktis dalam rangka batas rencana strategis yang telah dibuat oleh Posko Utama.

Laporan-laporan yang telah diterima dari kesatuan-kesatuan yang langsung dikendalikan ataupun dari komponen-komponen yang berada di Posko Depan kemudian dikirim dalam bentuk laporan-laporan situasi melalui hubungan radio ke Posko Utama. Semua kegiatan baik dari lawan maupun pasukan sendiri juga diteruskan ke Posko Depan, yang dibuat setiap 2 hari sekali. Laporan yang memerlukan tindakan kelanjutan dari Panglima Mandala segera diterima di Posko Depan dilaporkan ke Posko Utama, yang apabila dianggap perlu diteruskan ke Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.



## BAB III

### OPERASI-OPERASI INFILTRASI

#### 1. KEGIATAN KELOMPOK GERILYAWAN

Gugusan pulau Irian Barat yang pada masa-masa sampai akhir tahun 1961 masih dikuasai Belanda, terletak di ujung Timur dari rangkaian kepulauan Indonesia. Kelompok-kelompok kepulauan yang berada di sekitar dan di sekeliling perairan Irian Barat agak mempermudah pendekatan-pendekatan secara fisik yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Indonesia baik sebagai sukarelawan maupun berstatus militer. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan infiltrasi perseorangan maupun kelompok-kelompok di bawah koordinasi Komando Mandala dalam usaha-usaha penyusunan kekuatan gerilya ke daratan Irian Barat.

Antara tahun-tahun 1950 - 1959 Indonesia masih mengikhtirakan penyelesaian damai sengketa Irian Barat dengan Belanda lewat forum PBB, tetapi tak ada sambutan layak terutama dari pihak Belanda sendiri. Sejalan dengan pencabutan kembali persoalan Irian Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB oleh Indonesia yang bertekad mencari penyelesaian langsung dengan Belanda sendiri, maka luapan hasrat rakyat untuk memasukkan kembali Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia makin terasa mendesak. Sukarelawan-sukarelawan terbentuk di mana-mana dan usaha-usaha penyeberangan serta pendaratan ke daratan Irian Barat sudah mulai direncanakan, jauh sebelum pemakluman Trikora dan pembentukan KOLA, baik usaha-usaha perseorangan maupun berbentuk kelompok-kelompok kecil. Pos-pos konsentrasi pemberangkatan penyusupan tersebut mulai diatur, terbagi atas tiga tempat, ialah utara di pulau Gebe, tengah di Kepulauan Gorong dan selatan di Kepulauan Aru. Penampungan-penampungan penyaluran kegiatan-kegiatan infiltrasi ini dilakukan dengan koordinasi SUAD I.<sup>76</sup>

Pada tanggal 9 Nopember 1960 telah bertolak rombongan pertama dengan nama PG (Pasukan Gerilya) 100 sejumlah 29 orang dari Buru menuju Teluk Etna (Kaimana). Mereka ini dipimpin oleh Letnan Antaribana, tetapi kemudian tidak diketahui berita perkembangan berikutnya. Kemudian menyusul kelompok kedua pada tahun berikutnya, yang bergerak pada tanggal 14 September 1961 dengan nama PG-200, kekuatan pasukan sebesar 39 orang, dipimpin oleh Letnan Djamaludin Nasution. Tujuan pendaratan di Kepulauan Raja Empat, mereka inipun tidak ada berita perkembangan selanjutnya.

<sup>76</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 121.

## 2. INFILTRASI INTELIJEN MENJELANG PEMBENTUKAN KOMANDO MANDALA

Aktivitas penyusupan ke daratan Irian Barat makin diintensifkan, dengan pembentukan Pos Komando baru di Amahai dan yang kemudian dipindahkan ke Ambon, di bawah pimpinan Brigade Infanteri 2. Perengkapan-perengkapan tempur makin baik seperti alat-alat radio untuk jaringan perhubungan, perahu-perahu karet, motor-motor tempel type Johnson & Mercury. Kemudian juga tersedia speedboat dari fiberglass. Pos-pos konsentrasi mendapat perubahan-perubahan nama sesuai dengan istilah-istilah kode militer seperti di selatan/Aru dengan nama Pos 101 atau Hanggada, di tengah dengan nama Pos 102 atau Kapi Jembawan dan di utara dengan nama Pos 103 atau Hanila.

### a. *Kegiatan infiltrasi dari Pos 103 Hanila.*

Pada tanggal 18 Maret 1961 telah berangkat dua peleton dan kelompok Komando KOMPI 191261 atau disebut juga PG 300 di bawah pimpinan Letnan Nana, berangkat dari pulau Gebe ke pulau Waigeo pada pukul 15.15 waktu setempat. Tapi di tengah pelayaran tersebut mereka ketahuan oleh patroli pesawat Neptune Belanda, sehingga arah perahu terpaksa dibelokkan ke pulau Gag yang terletak di sebelah Barat Pulau Waigeo. Musuh selalu mengincar kedudukan kelompok ini di pulau Gag. Setiap hari dilakukan patroli pesawat-pesawat udara dan dua buah kapal perang mereka ditempatkan di selatan pulau tersebut. Dengan demikian kedudukan-kedudukan pasukan PG 300 makin dipencilkan, baik dari darat, laut maupun udara. Dengan perbekalan yang sangat terbatas mereka harus menghadapi sendirian serbuan dan serangan musuh dari ketiga jurusan tersebut. Keadaan makin tegang ketika pada tanggal 25 Maret 1962 terjadi kontak senjata antara kapal perang Belanda dengan pesawat terbang AU yang mengakibatkan terbakarnya kapal Belanda tersebut, dengan beberapa korban luka dan mati. Usaha musuh untuk memencilkan pasukan Indonesia belum bisa dipatahkan, mereka kemudian mendaratkan pasukan-pasukan meriamnya di pulau Gag pada tanggal 26 Maret 1962. Akibatnya terjadi pertempuran-pertempuran sengit. Belanda kemudian mengadakan gerakan-gerakan pembersihan, yang dimulai pada tanggal 28 Maret 1962. Perlawanan dari Pasukan PG - 300 tetap dilakukan, sementara itu disusun perlawanan dengan taktik gerilya di daerah pedalaman.

Keadaan makin kritis, ketika pada tanggal 7 April 1962 Belanda mulai menggunakan mortir-mortir dalam rangka peningkatan pembersihan kedudukan PG-300. Kemudian disusul dengan pemboman-pemboman dari udara terhadap kedudukan-kedudukan pasukan-pasukan tersebut pada tanggal 9 dan 10 April 1962 sebanyak 14 buah bom. Pada tanggal 11 April diulangi lagi kegiatan-kegiatan pemboman musuh dari udara dengan tembakan-tembakan mitralyur serta roket pesawat terbang. Namun demikian pasukan-pasukan gerilya tetap dapat bertahan dan ternyata juga mendapat sambutan positif

dari penduduk setempat. Mereka ini bahkan turut memperkuat pasukan PG dengan penggabungan diri secara sukarela sejumlah 29 orang.

Setelah hampir satu bulan terjadi perlawanan bersenjata di pulau Gag tersebut, maka pada tanggal 15 April 1962 pasukan Marine Belanda sekali lagi mengadakan pembersihan secara besar-besaran. Tetapi justru pada kesempatan tersebut mereka kalah siasat, karena sementara itu pasukan-pasukan gerilya dapat menyusup dari daerah pedalaman dan bergerak mendekati pantai. Dalam usaha penerobosan tersebut sekaligus jatuh korban 12 orang musuh yang mati maupun yang luka-luka.

Sementara itu pada tanggal 20 Maret 1962 dua peleton dari kompi 191260 PG-300 di bawah Sersan Mayor Boy Thomas telah berangkat dari pulau Yu menuju Tanjung Dalpele di pulau Waigeo. Di tengah jalan mereka juga ketahuan pesawat patroli Neptune Belanda. Maka terpaksa mencari perlindungan di pulau Bala-bala selama 2 jam untuk menghindarinya. Akhirnya pasukan tersebut dapat juga meneruskan perjalanan dan mendarat di tempat tujuan semula dengan selamat.

Gerakan-gerakan penyusupan lain lewat pos utara ini yang tercatat ialah terjadi pada tanggal 15 Juli 1962 dengan penyusupan oleh pasukan PG-500 di bawah pimpinan Jonkey Hobert Rumontoy. Pasukan ini berkekuatan 87 orang dan berangkat dari pulau Gebe di ujung timur Halmahera melalui Waigeo. Mereka ini menggunakan 4 buah perahu berukuran antara 2 hingga 4 ton yang dilengkapi dengan outboard motor berkekuatan 50 PK. Di pulau Waigeo tersebut mereka bertemu dengan rombongan lain yang bertugas sebagai team penerangan sebanyak 1 regu, yang terkenal dengan nama Rombongan Herlina. Keduanya kemudian bergabung untuk mengadakan penyusupan bersama-sama di daratan Irian Barat. Mereka ini kemudian memasuki teluk Arugu di sebelah barat laut Sorong. Pasukan gerilyawan 500 kemudian memasuki Sansapor pada tanggal 17 Juli 1962. Kegiatan yang telah dilakukan di daerah tersebut ialah usaha menurunkan Bendera Belanda dan diganti dengan Bendera Merah Putih dengan jalan menyobek bagian yang berwarna biru. Kemudian pada tanggal 18 Juli dilakukan penghancuran instalasi radio Belanda di daerah tersebut sehingga mengakibatkan hubungan radio Belanda yang ke luar terputus dan menjadi lumpuh karenanya.

Pada malam harinya terjadi kontak senjata dengan pasukan Belanda yang mengakibatkan jatuhnya korban-korban 2 orang. Mereka meneruskan perlawanan di daerah Kepala Burung dengan berkali-kali mengalami pertempuran menghadapi kekuatan Belanda, antara lain di Weru, Baturumah dan Wenari, antara tanggal 6 dan 15 Agustus 1962. Rencana semula untuk merebut seluruh wilayah Kepala Burung kemudian dihentikan dengan adanya perintah "Cease fire" dan mengadakan konsolidasi pasukan ini, serta tetap tinggal di tempat kedudukan masing-masing.

Pasukan PG-500 pimpinan Rumontoy ini sebelumnya telah dipelopori

oleh pasukan PG-400 sebanyak 200 orang, sedangkan regu Team Penerangan melakukan kegiatan-kegiatan penutup dari Pos 103/Hanila dengan penyeberangan ke daratan Irian Barat pada tanggal 12 Agustus 1962.

b. *Kegiatan infiltrasi dari Pos 102/Kapi Jembawan*

Satuan-satuan yang dikirim lewat Pos 102 ialah bertujuan untuk mendapatkan informasi-intormasi intelijen, berpusat di pulau Gorong/Seram. Kegiatan mereka ini berbentuk team pengintai yang dilaksanakan berkali-kali, yakni :

1. Team Pengintai Ke-I berangkat pada tanggal 13 Maret 1962 menuju pantai Teluk Patipi dengan tugas menyebarkan pamflet-pamflet untuk mengairahkan semangat perjuangan rakyat setempat. Team tersebut kembali ke Pos pada tanggal 19 Maret 1962 dengan membawa serta adik Raja Patipi sebagai utusan Kepala Masyarakat Patipi untuk menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
2. Team Pengintai Ke-II telah berlayar pula tanggal 13 Maret 1962. Tetapi kurang beruntung karena harus kembali setelah mencapai setengah perjalanan. Mereka terlalu lelah ditambah mabuk laut, karena jarak yang ditempuh berjarak 140 mil, sedangkan peralatannya sebagai sarana pengangkutan hanya perahu jenis kolekole yang sangat sederhana.
3. Team Pengintai Ke-III berangkat pada tanggal 6 Mei 1962 dengan mencoba route melalui Bula di ujung timur pulau Seram dengan mencari informasi di pulau Misool. Meskipun dengan susah payah, mereka berhasil mencapai sasaran dan kembali dengan selamat ke Wahai di Seram Utara. Sejalan dengan pembentukan Komando Mandala, maka tugas-tugas mencari informasi dengan infiltrasi ini diteruskan oleh Kompi Batalyon 530/R, juga oleh Detasemen Pelopor Brigade Mobil.

c. *Kegiatan infiltrasi dari Pos 101 Hanggodo*

Dari pos selatan ini yang dipusatkan di kepulauan Aru telah terjadi kegiatan-kegiatan infiltrasi pada tanggal 23 Maret 1962 dengan 3 perahu yang membawa pasukan PG-600 di bawah pimpinan Maksun dan sespasukan dari Kompi R/XV dipimpin oleh Letnan Nussy, masing-masing dari daerah Ujir dan Karwi menuju arah sungai Jera. Jumlahnya adalah 31 orang di antara mereka ini 24 orang di bawah pimpinan Octavianus Marani, dapat mendarat dengan selamat. Tetapi induk pasukan terpaksa kembali, karena terlihat oleh pesawat patroli Neptune. Induk pasukan tersebut akhirnya dapat kembali dengan selamat, tetapi 7 orang yang berada di atas kapal tongkang mendapat tembakan-tembakan dari udara sehingga sekarang dianggap hilang. Ini terjadi di antara Teluk Etna dan kepulauan Watu Belah.

Pasukan Kompi R/XV sekali mencoba mengadakan infiltrasi pada tanggal 21 April 1962 tetapi mengalami kegagalan karena cuaca dan laut yang sangat buruk. Kompi ini kemudian ditarik ke Wahai untuk tugas menghadapi kegiatan-kegiatan di pulau Misool.

Semua gerakan-gerakan infiltrasi tersebut didasarkan atas Petunjuk Operasi No. 01 tertanggal 24 Pebruari 1962 Nomor POPS 01/SR/2/62 dengan tugas sasarannya ialah: Dengan jalan terang-terangan mengadakan operasi-operasi infiltrasi untuk menciptakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya secara de-facto daerah-daerah bebas untuk mendudukkan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di daerah-daerah Sorong, Fak-Fak, Kaimana dan sekitarnya. Basis-basis operasi tiap-tiap Angkatan ditentukan :

- (1). Untuk ADLA di kepulauan Aru (Uju), Geser dan Gebe
- (2). Untuk ALLA di kepulauan Ambon, Elat (kepulauan Kai) dan Ternate
- (3). Untuk AULA di Letfuan, Amahai, Ambon dan Morotai.

Pelaksanaannya ialah dengan infiltrasi pasukan sebanyak 10 kompi berangsur-angsur sampai akhir tahun 1962 harus sudah dapat didaratkan pada sasaran-sasaran yang ditentukan.

### 3. INFILTRASI PADA MASA KOMANDO MANDALA

Kenyataan menunjukkan, bahwa perlawanan dari kekuatan pasukan-pasukan Belanda di Irian Barat cukup tangguh, sehingga perlu dikeluarkan lagi Petunjuk Operasi POPS/02/SR/3/62 Maret 1962. Sasarannya tetap seperti POPS-01 dengan tugas lebih mempergiat usaha-usaha infiltrasi dan mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi serangan balas. Pasukan-pasukan langsung didatangkan dari garis belakang dan setelah istirahat beberapa jam sampai maximum beberapa hari, kemudian didrop dari udara atau dipusatkan di Pos-pos 101, 102, 103 dan Wahai. Mereka kemudian disusupkan secara besar-besaran ke masing-masing sasaran.

#### a. *Dari Pos Wahai*

Setelah mengalami kegagalan mendarat dari Pos 101 maka pada tanggal 9 Agustus 1962 berhasillah akhirnya sejumlah 90 orang Kompi Raiders Kodam XV menyeberangi laut Sioh di bawah Letnan Satu Nussy dari Wahai menuju ke Misool dengan hasil yang bagus. Kemudian disusul percobaan yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus 1962 dengan 46 orang, tetapi terpaksa kembali lagi karena bertemu dengan kapal perusak musuh. Kemudian disusul dengan usaha pendaratan tanggal 12 Agustus 1962 oleh speedboat Adio yang dikawal oleh 5 buah kapal MTB. Mereka ini digerakkan berdasarkan Perintah Operasi Badarbesi, sebagai pelaksanaan Petunjuk Operasi POPS 02 No. PO-06 tertanggal 18 Juni 1962.

Pertempuran-pertempuran laut yang sengit terjadi pada tanggal 11 Agustus 1962 antara kapal MTB tersebut dengan kekuatan musuh yang terdiri dari 1 kapal perusak, 1 fregat, 1 kapal selam dan sebuah pesawat Neptune. Tanpa menghiraukan musuh, maka salahsatu perahu yang ditumpangi pasukan Raiders ini berhasil menyusup sendirian menuju sasaran. Mereka dikejar dan ditembak tetapi berhasil mendarat dengan selamat. Setelah selesai tugasnya maka perahu tersebut kena peluru voltreffer sehingga hancur berantakan. Kelima buah MTB ALRI dapat pulang kembali ke pangkalannya dengan selamat.

*b. Infiltrasi lewat laut melalui Pos 102*

Setelah lima kali mengalami kegagalan-kegagalan baik oleh pasukan-pasukan Kompi Batalyon 503/R maupun oleh Detasemen Pelopor Brigade Mobile, maka pada tanggal 13 Mei 1962 sebanyak 20 orang Detasemen Pelopor Brimob dapat kembali sampai sasaran. Tetapi mereka ini tertangkap oleh Angkatan Laut Belanda sebelum sempat mendarat. Hal ini karena 2 (dua) perahu pendaratnya terpaksa ditarik pulang oleh perahu ketiga karena rusak motor tempelnya, sedangkan dari jauh telah nampak kapal perang musuh. Yang lain ialah karena 3 buah perahu kole-kole diantar pulang oleh arus meskipun jarak sasaran tinggal 3 mil lagi.

Tanpa mengenal putus asa, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1962 sebanyak 63 orang terdiri dari 53 orang Menpor Brimob dan 10 orang Sukarelawan dapat berhasil menginjakkan kaki di pantai Rumbati dekat Patipi. Perahu-perahu yang membawa mereka dapat kembali semua dengan selamat sedangkan pesawat-pesawat terbang Neptune yang akan menyerang perahu-perahu tersebut terhalang oleh bantuan pesawat Mig 17 AURI yang membelanya. Dari pos ini juga dipersiapkan satu batalyon lengkap ialah Yon 516 Brawijaya disamping Detasemen Pelopor Brimob, sedang Kompi dari Yon 530/R dijadikan Para untuk selanjutnya bertugas di Operasi Naga dan Operasi Jayawijaya.

*c. Dari Pos 101*

Pos Selatan (Pos 101) telah diperluas sampai di Tual dan dipersiapkan oleh Batalyon 521/Brawijaya. Mereka direncanakan akan mendarat di daerah Kaimana dengan Perintah Operasi Badar Lumut atau yang terkenal dengan nama PO-05 tertanggal 18 Juni 1962. Pelaksanaan infiltrasi ini mendapat halangan hingga tidak berhasil sama sekali, karena di laut sekitar Kaimana selalu tampak kapal-kapal perang Belanda yang beroperasi dan mengadakan patroli dengan ketatnya. Sedangkan dari Pos 103 yang juga telah diperluas sampai Patani dan Jailolo sudah dipersiapkan oleh Batalyon 515/Brawijaya dengan kawalan MTB seperti pada PO Badar Besi. Tetapi penyusupan dari pos inipun tanpa hasil.

Perintah Operasi Lumba-lumba, sebagai rangkaian operasi-operasi laut dalam rangka penyusupan pasukan dan gerilyawan ke daratan Irian Barat

telah dilakukan, kali ini dengan menggunakan kapal-kapal selam. PO Lumba-lumba yang disebut PO-07 tertanggal 25 Juni 1962 dengan sasaran mendekati dan langsung mendaratkan pasukan di sekitar Kotabaru sebanyak 45 orang gerilyawan di bawah Letnan Satu Dolf Latumahina, telah diantar dengan 3 buah kapal selam sebagai pelaksanaan dari Operasi Lumba-lumba ini. Sebuah kapal selam ialah KRI *Candrasa* sempat mendaratkan sebagian dari pasukan tersebut di sekitar Tanah Merah, Kotabaru. Sedangkan yang dua buah lainnya tidak sempat melakukan tugasnya karena selalu ada kontak dengan pesawat-pesawat Neptune maupun kapal perusak dan fregat Belanda kemudian disusul dengan adanya perintah Panglima Mandala untuk menghentikan permusuhan yang disesuaikan dengan Persetujuan New York antara Pemerintah Belanda dan Indonesia. Ketiga kapal selam tersebut kemudian dapat pulang kembali ke pangkalan dengan selamat.

#### 4. KEGIATAN-KEGIATAN TEMPUR UNSUR-UNSUR LAUT

Sesuai dengan tahap infiltrasi yang dikendalikan oleh komponen ADLA, maka tugas-tugas satuan Angkatan Laut ialah :

- a. Patroli Perang (War patrol) di perairan perbatasan wilayah Irian Barat untuk mengimbangi aktivitas musuh
- b. Pengintaian (reconnaissance)
- c. Pengembangan dan konsolidasi pangkalan-pangkalan depan bagi persiapan operasi militer besar yang terletak di perbatasan Irian Barat.

Untuk keperluan tugas-tugas tersebut di atas, maka satuan-satuan Angkatan Laut telah dikendalikan oleh Komando Depan AL Mandala (KOPANALLA) yang dalam tugasnya terdiri atas:

- Angkatan Tugas (AT) - 11 terdiri dari Kapal selam KRI *Nanggala*
- AT - 12 terdiri dari kapal fregat KRI *Surapati* dan KRI *Imam Bonjol*.
- AT - 13 terdiri dari kapal selam KRI *Todak* dan KRI *Bubara*.
- AT - 14 terdiri dari salvage/tender KRI *Rekata*
- AT - 15 terdiri dari kapal baruselam KRI *Layang* dan KRI *Lumajang*.
- AT - 16 terdiri dari kapal penyapu ranjau KRI *Pulau Rengat* dan KRI *Roma* serta KRI *Pulau Rangsang*.
- AT - 17 terdiri dari kapal korvet KRI *Pattimura* dan kapal tanker KRI *Bunyu*.<sup>77</sup>

Operasi-operasi Kapalselam meliputi :

- a. Operasi Antareja, berlangsung antara tanggal 28 Pebruari hingga tanggal 2 Mei 1962, dengan unsur KRI *Nanggala*. Tugasnya

---

<sup>77</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 143.

ialah pengintaian kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Irian Barat dengan mengadakan patroli perang ke wilayah perairan musuh, pengintaian dan penyerangan kapal-kapal perang musuh bila keadaan menguntungkan. Laporan-laporan kegiatan Angkatan Laut Belanda serta lokasi kapal perangnya selalu dikirimkan untuk mengetahui posisi kapal-kapal perang musuh setiap waktu diperlukan.

- b. Operasi Aluguro, dengan unsur-unsur dari kesatuan kapalselam KKS KRI *Wijayadanu*, KRI *Hendrajala*, KRI *Bramasta*, KRI *Pasopati*, KRI *Cundomani* dan KRI *Aluguro*. Tugasnya ialah menenggelamkan kapalkapal perang dan niaga musuh sepanjang pantai utara Irian Barat. Kegiatan-kegiatan ini merupakan operasi khusus di luar Komando Operasi Jayawijaya langsung di bawah KSAL yang merupakan Cadangan Strategis. Maksudnya ialah untuk mengamankan operasi amfibi yang akan dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan Operasi Jayawijaya, dari kemungkinan bahaya serangan mendadak khusus yang datang dari utara. Juga bertugas untuk mencegah dan menghancurkan samasekali kapal-kapal perang Belanda yang akan melarikan diri ke utara. Kesatuan kapal selam tersebut ditempatkan dalam rayon-rayon pencegahan di sepanjang pantai utara Irian Barat di luar daerah kegiatan kesatuan-kesatuan operasi Jayawijaya. Operasi ini berlangsung dari 28 Juli hingga 26 Agustus 1962, tetapi ditarik kembali pada tanggal 15 Agustus 1962 karena tercapainya persetujuan New York.<sup>78</sup> Walaupun dalam operasi ini terjadi kontak-kontak dengan kapal musuh, tetapi tidak sampai terjadi kontak-kontak senjata.
- c. Operasi Cakra, dimaksudkan untuk memperoleh keunggulan di laut sebagai persiapan operasi amfibi.

Pelaksanaannya dibagi atas :

Operasi "Cakra I", pada tanggal 20 Juli hingga 29 Juli 1962.

Unsur-unsur yang dipergunakan ialah :

- 503 KRI *Nagabanda* - antara Kotabaru - Biak
- 504 KRI *Trisula* - sekitar Biak - Japen
- 505 KRI *Candrasa* - antara Noemfor - Manokwari
- 506 KRI *Nagarangsang* - Sorong dan sekitarnya.

Tugasnya ialah pengintaian di kota-kota pelabuhan penting Irian Barat dengan jalan pemburuan bebas (free hunting) dan perang perbatasan (border clash).<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Seksi Buku Panitia HUT Sewindu Komando Djenis Kapalselam, *Sewindu Komando Djenis Kapalselam*, Surabaya, 1967, halaman 84.

<sup>79</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 151.



Sesuai dengan penugasannya keempat kapal selam tersebut masing-masing ditempatkan di muka pelabuhan-pelabuhan Kota-baru, Biak, Manokwari dan Sorong. Pengintaian-pengintaian dilakukan secara teliti dan rahasia. Perubahan-perubahan baru segera dilaporkan sehingga pimpinan selalu mendapatkan data-data musuh yang terbaru. Hal ini perlu sekali dalam suatu operasi amfibi agar pasukan yang akan didaratkan nanti tidak dihadapkan kepada kemungkinan-kemungkinan yang belum diketahui sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, KRI *Nagabanda* disergap oleh pesawat Neptune dan 2 kapal perusak musuh di utara Kotabaru dan ditembaki dengan 62 buah bom laut.<sup>80</sup> Kejadian ini merupakan kontak pertamakali dari kapal selam Indonesia dengan kapal-kapal perang Belanda. Karena sifat-sifat tugasnya yang rahasia, maka serangan ini memang harus di-elakkan, agar Belanda tidak memperoleh bukti beradanya kapal-selam Indonesia di perairan yang dikuasai Belanda. Maksudnya agar rahasia pendaratan di daerah itu tetap terjaga. Berkat ketangkasan komandan dan awak kapalnya dengan cara mengadakan manuver menghindari ledakan-ledakan bom laut, maka KRI *Nagabanda* berhasil lolos tanpa meninggalkan jejak.

- d. Operasi Cakra II pada tanggal 15 Agustus 1962. Unsur-unsur yang dipergunakan ialah: KRI *Trisula*, KRI *Candrasa*, dan KRI *Nagarangsang*. Tugasnya ialah mendaratkan Team Khusus RPKAD di Tanah Merah, suatu daerah pantai dekat lapangan terbang Sentani di Kotabaru. Operasi ini merupakan tahap kedua dari operasi amfibi sesudah tahap pengintaian. Pendaratan pasukan-pasukan khusus tersebut dengan tugas sabotase obyek-obyek vital untuk melumpuhkan pertahanan Belanda, agar pasukan-pasukan yang akan didaratkan nantinya pada Operasi Jayawijaya tidak banyak menemui perlawanan. Selain itu juga menyiapkan agar pada waktunya pendaratan, rakyat setempat mau ikut mengangkat senjata melawan Belanda. Team khusus RPKAD untuk tugas sabotase akan didaratkan dengan KRI *Trisula* dan KRI *Nagarangsang*, sedangkan Team Khusus RPKAD untuk tugas pemerintahan sipil oleh KRI *Candrasa*.

Tetapi sementara Operasi Cakra II dimulai, persetujuan New York ditandatangani, sehingga KRI *Trisula* dan KRI *Nagarangsang* dipanggil pulang. Sedangkan KRI *Candrasa* tetap me-

---

<sup>80</sup> Seksi Buku Panitia Sewindu Kodjenkasel, *Loc.cit.*

laksanakan tugasnya untuk menjaga kemungkinan apabila Belanda memungkiri janji dalam persetujuan New York, maka di Irian Barat sudah ada pemerintahan bayangan.<sup>81</sup>

Penjagaan-penjagaan musuh sangat kuat dengan patroli-patroli anti kapal selam oleh kapal-kapal perusak dan pesawat-pesawat terbang Neptune. Meskipun demikian, pada tanggal 21 Agustus 1962 saat kritis telah dilewati, maka KRI *Candrasa* berhasil juga mendaratkan semua Team Khusus dengan selamat yang diangkutnya ke Teluk Tanah Merah dekat Kotabaru. Dalam gambaran strategi secara keseluruhan, maka sifat pelaksanaan operasi-operasi dalam rangka Pembebasan Irian Barat, merupakan suatu perang laut (Naval campaign). Faktor-faktor yang mempengaruhi agar dapat berhasilnya operasi-operasi ini ialah memperoleh kemenangan meliputi keunggulan di udara lokal di daerah operasi itu sendiri, transport di laut dan fasilitas-fasilitas pangkalan. Infiltrasi-infiltrasi udara yang berhasil menembus pertahanan udara lawan ternyata menentukan jalan bagi direbutnya keunggulan di udara.

## 5. PEMBENTUKAN KESATUAN-KESATUAN TEMPUR UDARA

Untuk menghadapi operasi-operasi dalam rangka pembebasan Irian Barat, maka dari segi pertahanan udara telah dilakukan penambahan kekuatan-kekuatan unsur dirgantara untuk :

- a. Melumpuhkan kekuatan udara lawan guna memperoleh keunggulan udara berupa pesawat-pesawat pemburu strategis dan taktis TU-16 KS, TU-16, IL-28, dan pesawat-pesawat pembom konvensional B-25 dan B-26.
- b. Mempertahankan keunggulan di udara yang telah dicapai dengan pesawat tempur Mig-17 dan Mig-21 dengan perlengkapan peluru kendali dari udara-ke udara untuk menandingi pesawat-pesawat lawan yang menggunakan peluru kendali jenis Side winders.
- c. Keperluan pengangkutan udara dipakai pesawat transport bantuan ialah jenis C-130 Hercules, C-47 Dakota dan Avia-14.<sup>82</sup>

Segera setelah diumumkannya Trikora, maka telah dibentuk kesatuan-kesatuan tempur (KT) yang ditempatkan di pangkalan-pangkalan bagian timur dekat dengan perbatasan Irian Barat ialah :

- a. *KT Senopati* di bawah pimpinan Mayor Udara Ch. Lantang yang dibentuk pada awal Februari 1962 berkedudukan di Pangkalan Udara Morotai, terdiri dari pesawat-pesawat IL-28, Mig-17, B-25/26, C-47 Dakota, Albatros/Catalina dan Helikopter.

<sup>81</sup> Seksi Buku Panitia Sewindu Kodjenkasel, *op.cit.*, hal. 86 (Ibidem).

<sup>82</sup> Lampiran E dari Penelaahan Staf GKS, halaman 2 - 3.

Tugas pokok KT Senopati ialah :

1. Mempersiapkan diri dalam rangka operasi-operasi fisik, sehingga pada 1 Juni 1962 KT Senopati sudah dalam keadaan siap tempur.
  2. Persiapan-persiapan tersebut ditekankan kepada kemampuan pesawat, awak pesawat serta rencana operasi dalam suatu perang terbuka.
  3. Latihan-latihan yang dilakukan meliputi penerbangan-penerbangan pengintaian dan pemotretan terutama di daerah-daerah daratan Irian Barat yang kelak akan ditetapkan jadi daerah-daerah sasaran untuk menerjunkan pasukan-pasukan payung. Maksud latihan-latihan tersebut ialah untuk mempertinggi daya-tempur, mempertahankan udara dalam rangka mempersiapkan pengempuran kekuatan Belanda di daratan Irian Barat, yang selain diikuti oleh unsur-unsur tempur juga oleh unsur-unsur bantuan udara lainnya seperti kesatuan radar, perhubungan, Search & Rescue (SAR) dan kesehatan. Selain itu juga giat dilakukan latihan-latihan pendaratan darurat di laut (ditching) serta penyelidikan-penyelidikan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang mungkin dapat dimakan dalam keadaan darurat, baik untuk keperluan awak pesawat maupun pasukan-pasukan yang akan diterjunkan.
- b. *KT Baladewa*, ialah kesatuan tempur yang terdiri dari 6 buah pesawat angkut C-47 Dakota di bawah pimpinan Mayor Udara Najoa. KT ini berkedudukan di Pangkalan Udara Hasanuddin (Makassar), dimaksudkan untuk melengkapi unsur-unsur Angkatan Udara di daerah-daerah Mandala dengan kemampuan pengangkutan antar pulau yang sebesar-besarnya, baik berupa personel maupun barang-barang logistik. Dengan demikian akan terciptalah daya gerak yang besar dan kenyal dari kesatuan-kesatuan udara kita di daerah Mandala.
- Selain di bidang pengangkutan personel dan logistik, tugas *KT Baladewa* ialah :
1. Mengangkut bala-bantuan ke tempat-tempat yang dianggap terancam bahaya.
  2. Mengangkut korban-korban dengan ambulance ke daerah aman apabila terjadi pertempuran-pertempuran udara.
  3. Melakukan tugas SAR bersama-sama flight Albatros dan helikopter.
  4. Jika diperlukan, juga menyiapkan penerbangan-penerbangan peninjauan dari Pangkalan dan Komando atau Staf Angkatan Udara Mandala.

- c. *KT Bima Sakti*, berkedudukan di Pangkalan Udara Letfuan dengan kekuatan 4 pesawat B-25, 2 pesawat B-26, 6 pesawat P-51 Mustang, 1 pesawat Catalina dengan Komandannya Mayor Udara Sudaman. Maksud pembentukan KT ini ialah untuk mengimbangi kekuatan balabantuan Belanda yang dikirimkan ke Irian Barat setelah terjadinya pertempuran di pulau Gag tanggal 25 Maret 1962. Tugasnya ialah :
1. Melindungi patroli Angkatan Laut di perbatasan.
  2. Menghancurkan sasaran-sasaran di Irian Barat yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Panglima AULA.
  3. Bantuan-bantuan tempur pada Angkatan-angkatan lainnya
  4. Mengadakan pemotretan udara di atas daratan Irian Barat.
- Untuk menghindari jaringan-jaringan radar Belanda, maka diadakan penerbangan-penerbangan rendah. KT ini mula-mula khusus digunakan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan logistik, tetapi kemudian sebagai pesawat-pesawat pelindung digunakan dalam tugas-tugas penerjunan. Juga bertugas sebagai pesawat-pesawat penyergap dan pemotret udara yang dilakukan bersama-sama dengan KT-KT lain.<sup>83</sup>

## 6. OPERASI-OPERASI INFILTRASI DARI UDARA

### a. *Operasi Sikat* :

Yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 1962, terdiri dari unsur-unsur KT Senopati bersama-sama dengan kapal buru selam KRI *Todak*. Operasi ini dimaksud untuk menghancurkan kapal selam musuh yang menurut laporan penduduk di sekitar Morotai telah mendengar suara mesin kapalselam pada tanggal 26 Maret malam. Hal ini diperkuat dengan penyelidikan yang dilakukan oleh kapal KRI *Todak* pada tanggal 27 Maret 1962 dan mendapatkan posisi kapal selam tersebut pada 01 derajat 59 menit lintang utara dan 128 derajat 3 menit bujur timur. Dalam operasi ini KT Senopati menyiapkan pesawat-pesawat terbang B-25, Mig-17, & Helikopter. Pesawat helikopter disiapkan untuk keperluan SAR, sedangkan AL menugaskan kapalburu selam KRI *Todak*. Setelah selesai persiapan-persiapan termasuk prosedur-prosedur penyerangannya, maka berangkatlah pesawat B-25 pada sasaran yang ditentukan pada tanggal 28 Maret 1962 pukul 05.25 waktu setempat, sedangkan KRI *Todak* telah berangkat pada pukul 03.00. Tetapi baik pesawat B-25 maupun kapal KRI *Todak* tidak dapat menemukan kapalselam yang dicari. Rupanya mereka telah meninggalkan lebih dahulu perairan daerah Morotai tersebut.

<sup>83</sup> *Madjalah Angkasa*, Februari/Maret 1963, Tahun XI, halaman 49 - 53.

b. *Operasi Banteng*

Operasi Banteng ini merupakan pelaksanaan dari Perintah Operasi atau PO-01 tertanggal 11 Maret 1962, sebagai pelaksana pertama dari petunjuk operasi/POPS-02 tertanggal 28 Maret 1962.<sup>84</sup> Operasi penerjunan PGT dan RPKAD dari udara yang dilakukan tanggal 26 April 1962 dengan sasaran tujuan daerah-daerah Kaimana dan Fak-Fak. Sesuai dengan tujuan sasaran tersebut, maka operasi ini dibagi menjadi 2, ialah :

- Operasi Banteng I (Banteng Putih) di bawah pimpinan Mayor Udara Najoan dengan daerah sasaran Semenanjung Fak-Fak. Pasukan yang didaratkan sebanyak 40 orang di bawah Lettu Agus Hemoto.
- Operasi Banteng II (Banteng Merah) di bawah pimpinan Kapten Udara Santoso dengan daerah sasaran Kaimana. Pasukan yang didaratkan sebanyak 39 orang, di bawah pimpinan Lettu Heru Sinodo.

Pelaksanaan operasi-operasi penerjunan dari udara dilakukan dengan cara penerbangan penipuan lebih dahulu, sambil mengadakan pengintaian dan pemotretan dengan maksud untuk menarik perhatian lawan. Dengan demikian tugas sebenarnya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Komando keseluruhan dari operasi penerjunan ini dipegang langsung oleh Panglima AULA Komodor Udara Leo Wattimena karena merupakan operasi penerbangan pertamakali yang menerjunkan pasukan payung ke daratan Irian Barat. Seperti halnya dengan operasi-operasi udara lainnya, dilakukan penerbangan rendah (*low level flying*). Hal demikian perlu dilakukan untuk menghindarkan diri dari jaring-jaring radar lawan. Setelah melintasi pantai daratan Irian Barat, mulailah pesawat dinaikkan untuk melalui daerah pegunungan-pegunungan yang banyak tersebar. Agar dapat terhindar dari sergapan-sergapan jaringan radar musuh, maka pesawat-pesawat tersebut terbang tinggi dengan memanfaatkan keadaan medan sebaik-baiknya. Setelah mendekati daerah-daerah sasaran yang dituju, mereka ini mulai mencari daerah penerjunan (*dropping zone*) yang baik. Usaha demikian tidak mudah dilakukan karena hutan yang sangat lebat dan tinggi, menyebabkan daerah sasaran seakan-akan tertutup samasekali oleh pohon-pohon yang rindang, tetapi akhirnya dapat ditemukan juga daerah-daerah penerjunan yang cukup baik, biasanya suatu lembah dengan aliran sungai kecil. Di daerah-daerah sedemikian ini pasukan-pasukan kemudian diterjunkan dengan formasi-formasi penerbangan yang bagus, sehingga semua pasukan, perlengkapan dan perbekalannya dapat diterjunkan. Baik pada Operasi Banteng I maupun Operasi Banteng II digunakan 3 buah pesawat C-47 Dakota pada pagi-pagi sekali menjelang fajar

<sup>84</sup> Case Study, halaman 7 dan 19.

c. *Operasi Kancil*

Operasi Kancil yang menurut rencana dilakukan pada tanggal 15, 16 dan 17 Mei 1962 dibagi dalam 3 flight, ialah :

- Kancil I dengan daerah sasarannya Sorong,
- Kancil II dengan daerah sasarannya Fak-fak,
- Kancil III dengan daerah sasarannya Kaimana.

Sesuai dengan nama operasi ini, maka maksudnya mengadakan pengintaian pemotretan. Berhubung cuaca yang kurang baik, maka Operasi Kancil ini mengalami penundaan beberapa waktu. Operasi ini penting karena merupakan usaha penerbangan tipuan dan sekaligus pengawalan untuk pelaksanaan operasi selanjutnya, ialah Operasi Garuda.<sup>85</sup>

d. *Operasi Garuda*

Operasi Garuda merupakan pelaksanaan dari Perintah Operasi No. PO-02 tanggal 13 Mei 1962. Sesuai dengan sasaran-sasaran Operasi Kancil, maka daerah sasaran penerjunan yang dilakukan oleh Operasi ini ialah di Sorong, Fak-Fak dan Kaimana.

Operasi Garuda dibagi dalam 2 penerbangan, ialah :

- Operasi Garuda Merah dengan pesawat Dakota pada tanggal 15 Mei 1962, menerjunkan pasukan sebanyak 40 orang dan 38 orang pada tanggal 16 Mei 1962 di bawah pimpinan Kapten Atani. Daerah sasarannya ialah Fak-Fak.
- Operasi Garuda Putih di daerah Kaimana menerjunkan sebanyak 27 orang pada tanggal 15 Mei 1962 dan 27 orang lagi pada tanggal 17 Mei 1962, yang seharusnya dilaksanakan tanggal 16 Mei 1962. Karena cuaca jelek terpaksa ditunda.

Dalam Operasi Garuda ini unsur-unsur dari KT Baladewa memegang peranan dengan pemberangkatan pesawat-pesawat dari Pangkalan Udara Pattimura (Ambon). Pada operasi penerjunan pada hari pertama tanggal 15 Mei 1962 telah dikerahkan 3 pesawat C-47, pesawat B-25 dan 1 pesawat Catalina untuk daerah-daerah Sorong, dan Kaimana, serta 3 pesawat P-15 Mustang untuk daerah Fak-Fak.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya menerjunkan pasukan, pesawat-pesawat Dakota tersebut kembali ke pangkalan dengan mendapat pengawalan udara pesawat B-25 dan P-51. Dalam penerbangan pulang, mereka mendapat tembakan-tembakan dari kapalperang dan sergapan dari pesawat terbang musuh. Berkat ketangkasan dan keberanian awak pesawat, serangan itu dapat dielakkan dan semua pesawat beserta awak pesawat kembali

---

<sup>85</sup> *Madjalah Angkasa*, halaman 53.

dengan selamat. Pada operasi penerjunan hari kedua tanggal 16 Mei 1962, telah diberangkatkan kesatuan-kesatuan udara dengan sasaran yang sama dengan hari pertama. Tetapi setelah sampai di daerah sasaran keadaan cuaca sangat buruk, sehingga tidak berhasil ditemukan daerah-daerah penerjunan kemarin, meskipun telah beberapa kali dicoba. Mengingat bahan bakar yang makin menipis sedangkan fajar akan segera menyingsing, maka diperintahkan untuk kembali ke pangkalan tanpa melakukan penerjunan.

Pada tanggal 17 Mei 1962 Operasi Garuda dilanjutkan dengan sasaran Sorong dan Kaimana dengan waktu yang sama seperti halnya operasi penerjunan sebelumnya, maka kali inipun kegiatan itu tidak diketahui lawan, sehingga tempat penerjunan tanggal 15 Mei 1962 segera dapat diketemukan kembali dan pasukan dapat diterjunkan dengan lancar. Pada waktu kembali, sebuah pesawat B-25 dari rombongan Sorong telah diketahui pesawat musuh ialah pesawat jenis Neptune. Seperti pada hari-hari pertama Operasi Garuda ini, pesawat pembom tersebut dapat berhasil menggagalkan serangan Neptune Belanda berkat kecakapan dan keberanian awak pesawatnya. Demikian juga pesawat B-25 rombongan Kaimana telah bertemu dengan Neptune sehingga tembak-menembak tidak dapat dihindarkan. Pesawat pembom kita dapat bertahan dan berhasil menghindari diri. Sementara itu sebuah pesawat Dakota dengan tanda T-440 yang dikemudikan oleh Kapten Udara M. Djalaludin tiba-tiba mendapat serangan sebuah pesawat Belanda jenis Neptune. Pesawat angkut Dakota tersebut tidak dapat memberikan perlawanan karena memang tidak bersenjata. Satu-satunya jalan ialah melakukan manuver untuk dapat menghindari serangan-serangan tembakan pesawat pemburu tersebut. Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk mengelakkan tembakan-tembakan lawan, namun akhirnya salah satu motornya kena tembak, sehingga tidak dapat bekerja lagi disusul hancurnya ekor pesawat tersebut. Pesawat tidak dapat dikendalikan lagi, maka diputuskan untuk mengadakan pendaratan darurat di laut (*ditching*) di sebelah timur kepulauan Batu Belah.<sup>86</sup> Usaha ini ternyata berhasil dan awak pesawat T-440 segera ke luar dari pesawatnya dengan selamat dan naik perahu karet. Sesaat kemudian pesawat Dakota tersebut tenggelam ke dasar laut. Harapan mereka untuk mendapatkan pertolongan dari unsur-unsur bantuan udara ataupun laut sendiri ternyata meleset. Sebuah kapal perusak musuh datang mendekat, maka seluruh awak pesawat T-440 ditawan musuh.

---

<sup>86</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 141.

Selain Dakota T-440 juga pesawat sama jenis T-480 yang terbang dalam satu formasi dengan T-440 telah mendapat serangan tembakan roket, tetapi masih dapat menyelamatkan diri. Pesawat jenis lain ialah Albatros yang bertugas SAR pada saat-saat yang genting tersebut ternyata juga tidak kembali ke pangkalan. Pesawat tersebut ialah PB-514 yang dikemudikan oleh Letnan Udara I Atmadi dengan 6 awak pesawat lain kemudian dianggap hilang. Rupanya pesawat Neptune Belanda tersebut bermaksud menghancurkan pesawat pembom B-25 lebih dahulu, kemudian memaksa agar pesawat-pesawat Dakota T-440 dan T-480 untuk mendarat di lapangan terbang Belanda atau akan dihancurkannya. Ternyata perlawanan diberikan oleh pesawat tersebut, sehingga rencana mereka tidak dapat dilaksanakan. Dengan terjadinya peristiwa penembakan pesawat-pesawat Dakota itu, maka kemudian dirubah penerjunan-penerjunan pasukan, yang tidak lagi menggunakan pesawat Dakota tetapi pesawat angkut lebih besar ialah C-139 B Hercules.<sup>87</sup> Termasuk dalam Operasi Garuda ialah kegiatan-kegiatan penerjunan yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 1962 dengan pasukan Garuda Merah sebanyak 79 orang dan pada tanggal 25 Mei 1962 dengan pasukan Garuda Putih sebanyak 68 orang. Kedua kegiatan tersebut semuanya menggunakan pesawat Hercules dan berlangsung dengan lancar.

e. *Operasi Serigala*

Operasi Serigala sebagai pelaksanaan PO-03 tanggal 13 Mei 1962 dengan sasaran daerah Sorong dan sekitarnya. Pelaksanaannya terbagi dalam 2 tingkatan ialah :

- Tanggal 17 Mei 1962 dengan pesawat Dakota telah diterjunkan sebanyak 39 orang dipimpin oleh Letnan Udara II Manuhua di Teminabuan. Mereka jatuh di atas asrama tentara Belanda. Pertempuran segera berkobar sampai beberapa hari. Setelah melalui saat-saat yang kritis, mereka berhasil mengkonsolidasi pasukan dan mengibarkan bendera Merah Putih. Peristiwa tersebut merupakan lambang terbentuknya sebagian wilayah Republik Indonesia di daerah tersebut pada tanggal 21 Mei 1962.
- Tanggal 19 Mei 1962 dengan pesawat Hercules telah diterjunkan sebanyak 81 orang dipimpin Letnan Muda Udara I Suhadi di Sansapor. Juga di sini terjadi kontak-kontak senjata dengan Belanda. Rupanya disebabkan karena kemerosotan moril pasukan Belanda yang umumnya melihat sukses-sukses penerjunan pasukan Indonesia di daerah-daerah lain Irian Barat maka keadaan segera dapat dikuasai oleh pasukan-pasukan kita.

<sup>87</sup> *Madjalah Angkasa*, Februari/Maret 1963, halaman 55.



f. *Operasi Naga*

Operasi Naga sebagai pelaksanaan dari PO-04 tanggal 4 Juni 1962 dengan daerah sasaran Merauke. Penerjunan dilakukan pada tanggal 23 Juni 1962 yang sekaligus menggunakan 3 buah Hercules. Jumlah pasukan yang diterjunkan 215 orang terdiri dari 55 pasukan khusus dan 160 dari kompi Batalyon 530/Brawijaya di bawah pimpinan Mayor Benny Murdani, yang pernah berusaha mengadakan penyusupan lewat laut dari pos 102/Kapi Jembawan tetapi mengalami kegagalan. Penerjunan berjalan lancar, dan segera mengadakan hubungan dengan Pos Komando Depan dengan hasil yang memuaskan. Berkat kegiatan-kegiatan gerilya pasukan-pasukan ini maka Belanda terpaksa memperbesar kekuatannya di Merauke yang semula hanya 2 kompi menjadi 2 batalyon.

g. *Operasi Lumbang*

Operasi Lumbang sebagai pelaksanaan dari PO-08 tertanggal 26 Juni 1962. Sesuai dengan namanya, operasi ini bermaksud untuk menambah persediaan bagi gerilyawan yang telah diterjunkan selama ini di daerah Irian Barat.<sup>88</sup>

Pada dasarnya operasi-operasi penyusupan melalui laut dan penerjunan dari udara menggunakan pasukan-pasukan Para/ADLA dan pasukan Gerak Cepat/AULA untuk diterjunkan dari udara, sedangkan pasukan-pasukan infanteri dan Korps Komando/ALLA didaratkan melalui laut. Mereka ini menduduki sasaran-antara sebagai batu loncatan untuk kemudian menguasai daerah-daerah sasaran.

Sementara itu hasil-hasil kegiatan militer secara nyata tersebut telah memberikan bantuan besar kepada bidang diplomasi. Kesibukan-kesibukan dialihkan ke meja perundingan dengan timbulnya usul Bunker untuk mengusahakan jalan ke luar melalui perundingan. Sejalan dengan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 untuk menyesuaikan operasi-operasi militer dengan kegiatan-kegiatan di bidang diplomasi, maka dengan perkembangan politik waktu itu oleh Komando Mandala diadakan penelitian hasil-hasil operasi dan pengembangan komponen tiap Angkatan Kemudian dikeluarkan petunjuk-petunjuk operasi :

- a. POPS-03/SR/3/1962 tanggal 26 Maret 1962 yakni untuk menghadapi kemungkinan penyerahan Irian Barat secara damai termasuk :
  1. Rencana pendudukan unsur-unsur Komando Darat, Laut dan Udara.
  2. Rencana Pembentukan Pemerintah Daerah.
  3. Kebutuhan-kebutuhan logistik di bidang sipil dan militer.

<sup>88</sup> Case Study, halaman 19.

- b. POPS-04/SR/3/1962 tanggal 27 Maret 1962 yakni tentang pertahanan daerah Mandala untuk menghadapi serangan balas-musuh. Tugas ini dititikberatkan pada Komando Pertahanan Udara Gabungan.<sup>89</sup>

Dalam uraian tentang bimbingan perencanaan telah diperkirakan bahwa Komando Mandala akan selesai dalam pengembangan kekuatannya untuk siap melaksanakan operasi terbuka pada akhir tahun 1962. Untuk mendukung dan mengamankan strategi politik Pemerintah Republik Indonesia khususnya menghadapi perebutan kekuasaan di Irian Barat dari pihak Belanda maka Komando Mandala telah mengeluarkan Petunjuk Operasi Nomor POPS-05/SR/4/1962 tanggal 7 April 1962, yakni tentang persiapan untuk menguasai sasaran terbatas ialah Sorong.

Pelaksanaan dari POPS-05 ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 01/TUSOP/SR/4/62 tertanggal 30 April 1962, ialah menetapkan:

- a. Bentuk Operasi Nanggala dalam tahap-tahap persiapan, pendaratan dan pendahuluan. Pada masa-masa ini kegiatan operasional banyak dititikberatkan kepada komponen ALLA dan AULA.
- b. Bentuk Operasi Nanggala dalam tahap konsolidasi. Komponen-komponen ALLA dan AULA ditekankan sebagai unsur bantu operasi disamping tugas utamanya.<sup>90</sup>

Tujuan Strategi Panglima Mandala adalah sesuai dengan Instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat untuk mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan diplomasi yang dalam waktu sesingkat-singkatnya menciptakan daerah de-facto dan mendudukkan unsur-unsur kekuasaan Pemerintah RI. Tujuan tersebut direncanakan akan dicapai dengan tahap pertama sedemikian rupa sehingga tidak akan mengundang tindakan-tindakan balasan dari lawan secara terang-terangan. Maka diharapkan bahwa unsur-unsur kekuatan yang diperkembangkan tidak akan sampai dihancurkan secara bagian demi bagian.

Perwujudan dari tujuan Strategi Panglima Mandala ialah mengusahakan tercapainya keunggulan di laut dan di udara. Pengalaman-pengalaman menunjukkan, bahwa selama mengusahakan pengembangan kekuatan dalam komponen-komponen Mandala, unsur-unsur waktu, iklim dan keadaan medan dirasakan sekali pengaruhnya sehingga kemudian timbul persoalan-persoalan di bidang pembentukan pasukan beserta latihan-latihan kesiap-siagaannya, penyediaan logistik dan jaringan-jaringan. Dengan memperhitungkan kemampuan-kemampuan sendiri maka kemudian berhasil direncanakan suatu jadwal perencanaan tugas ialah :

89 Case Study, halaman 7.

90 Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Laporan Komando Terahir (Umum) halaman 2 - 3.

- a. Dalam tahun 1962: Memasukkan secara infiltrasi berangsur-angsur sebanyak 10 kompi.
- b. Dalam tahun 1963 melancarkan suatu serangan yang terbuka dan kemudian menduduki daratan Irian Barat.
- c. Dalam tahun 1964: Konsolidasi pasukan-pasukan di daratan Irian Barat.<sup>91</sup>

Dalam masa-masa pertengahan tahun 1962 keharusan mengembangkan situasi militer di daratan Irian Barat menunjang keperluan-keperluan dan tuntutan-tuntutan yang perlu didesakkan dalam sidang percaturan perjuangan diplomasi, telah merubah keadaan. Jadwal perencanaan tugas di atas dirasakan perlunya untuk diajukan, ialah lebih dari 6 bulan ke depan. Maka Operasi Jayawijaya dalam tahap-tahap pertama tersebut berusaha keras menyelesaikan persiapan-persiapan sebagai permulaan dari pelancaran perang terbuka pada sasaran utama, ialah Biak.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

*BAB IV*  
*OPERASI JAYAWIJAYA*  
*DAN PENYERAHAN PEMERINTAHAN*  
*IRIAN BARAT*

1. KEGIATAN DIPLOMATIK DAN MILITER  
MENJELANG OPERASI JAYAWIJAYA

Infiltrasi laut dan udara telah memberikan hasil yang positif pada bidang fisik dengan pendudukan pasukan di daratan Irian Barat dan telah memberikan pengaruh pada perkembangan di bidang diplomatik. Dunia Internasional telah memberikan perhatian sepenuhnya berhubung dengan terjadinya ketegangan-ketegangan yang makin memuncak akibat sengketa Indonesia dan Belanda. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencoba memprakarsai secara tidak langsung usaha-usaha perdamaian untuk meredakan ketegangan. Pada tanggal 26 Mei 1962 tampilah suatu konsep perdamaian, terkenal dengan usul Ellsworth Bunker yang diumumkan oleh pejabat Sekretaris Jendral PBB, U Thant. Isi pokok Usul Bunker ialah rencana penyerahan administrasi pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu Badan Pemerintahan PBB dan menjamin adanya hak menentukan pendapat bagi rakyat Irian Barat, sebagai usaha pendekatan antara dua pihak yang bersengketa.

Tanggapan Pemerintah Indonesia atas Usul Bunker tersebut pada prinsipnya dapat diterima, karena memuat antara lain fasal tentang penyerahan administrasi pemerintahan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Tetapi pihak Pemerintah Belanda belum juga memberikan tanggapan positif dengan segera. Ketidak-pastian pendirian Pemerintah Belanda rupanya berhubungan erat dengan perkembangan situasi pendaratan dan pertempuran yang terjadi di Irian Barat, meskipun kekuatan pasukan Indonesia ternyata makin menguasai keadaan pada daerah-daerah kantong gerilya. Mereka masih mengharapkan dapat mempertahankan sebagian besar daerah kedudukan yang masih dikuasainya, dengan semua kekuatan yang tersedia akan memukul mundur dan menghancurkan pasukan Indonesia tersebut. Dengan demikian kekuasaan Belanda tetap berlangsung dan mendorongnya untuk menolak saja Usul Bunker.<sup>92</sup>

Pendaratan pasukan Indonesia di daratan Irian Barat ternyata juga menjadi salahsatu pokok pembicaraan pejabat-pejabat tinggi militer Amerika Serikat dan Inggris, kemudian Pemerintah kedua negara tersebut telah mendesak pada Pemerintah Indonesia maupun Belanda untuk mulai membuka lagi perundingan. Sementara itu Pemerintah Belanda tidak menunjukkan kegiatan di bidang diplomasi dan menunggu serta mempelajari reaksi

---

<sup>92</sup> Baharuddin Lopa SH, *op.cit.*, halaman 126.

negara-negara lain khususnya yang tergabung dalam persekutuan militer NATO, mengenai tindakan pendaratan pasukan Indonesia di daratan Irian Barat. Pemerintah Belanda menjalankan politik mengulur waktu terhadap Usul Bunker dan mengharapkan simpati dunia berpihak kepadanya. Sebaliknya Pemerintah Indonesia menganggap bahwa pendaratan pasukan Indonesia merupakan jawaban atas sikap Belanda yang selama 10 tahun terakhir selalu merintang usaha-usaha damai yang telah ditempuhnya. Pendaratan dan penerjunan akan terus dilanjutkan sampai Belanda mau merubah sikap untuk bersedia berunding atas dasar Usul Bunker. Sementara itu Pemerintah Belanda merencanakan untuk memperkuat unsur-unsur tempur marine ke Irian Barat dengan memindahkan satuan-satuan yang diperbantukan pada NATO.

Keadaan yang tidak menentu di bidang perkembangan diplomasi tersebut telah mengharuskan Indonesia untuk lebih menggiatkan operasi-operasi militernya. Demikianlah maka operasi-operasi dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Operasi Gurita pada tanggal 28 hingga 30 Juni 1962, yang bertugas:<sup>93</sup>
  - a. Mengadakan pengintaian di perairan Teluk Kaimana untuk mengetahui kedudukan kapal-kapal musuh, guna pelaksanaan Operasi Badar Lumut ialah operasi pendaratan dengan menggunakan kapal cepat torpedo dari unsur ALLA.
  - b. Memberikan perlindungan udara pada waktu operasi dilaksanakan, baik terhadap serangan udara maupun serangan laut musuh.
  - c. Melakukan bantuan perlengkapan dari udara.

Sasaran yang dituju ialah Teluk Kaimana, daerah sebelah utara Kaimana dan Fak-Fak. Sebagai pengintaian dari udara dapat diketahui adanya sebuah kapal perusak, sebuah fregat dan sebuah kapalselam Belanda di perairan Kaimana. Mereka juga bertemu dengan pesawat patroli Belanda jenis Neptune. Hasil tersebut kemudian dikirim ke pangkalan operasi ALLA di Elat.

Operasi Badar Lumut sendiri merupakan salahsatu rangkaian dari pelaksanaan Perintah Operasi No. PO-05 tertanggal 18 Juni 1962. Operasi ini bertugas untuk melakukan pendaratan di Kaimana dengan menggunakan 5 buah kapal cepat torpedo. Pelaksanaannya diintegrasikan dengan Operasi Gurita dari Komponen AULA. Karena adanya laporan tentang kekuatan armada militer musuh tepat di perairan Teluk Kaimana, maka rencana pendaratan telah ditunda. Setelah sampai 3 kali hari penundaan ternyata rintangan bahaya musuh belum juga menyingkir, maka

<sup>93</sup> *Madjalah Angkasa*, Februari/Maret 1963, halaman 60.

Panglima Mandala telah membatalkan Operasi tersebut. Untuk penyaluran kegiatan-kegiatan yang selama ini dipersiapkan, maka pada tanggal 30 Juni 1962 kesatuan tersebut diperintahkan mengadakan patroli yang apabila keadaan menguntungkan dapat menyerang musuh. Kontak dengan musuh terjadi pada pukul 21.30, maka haluan segera diubah menuju ke posisi penyerangan. Tetapi karena ombak makin besar, serangan tersebut kemudian dibatalkan.

2. Operasi Rajawali dilakukan pada tanggal 31 Juli 1962, yang bertugas :
  - a. Melakukan penambahan kekuatan pasukan dan perlengkapan logistik di daerah dropping Merauke dan Kaimana.
  - b. Pasukan yang diterjunkan sebanyak 71 orang dari Batalyon 328/Para di Kaimana dan perlengkapan logistik sebanyak 9 ton di daerah Merauke.

Tugas penerjunan tersebut telah berhasil dilakukan dengan baik. Operasi Rajawali merupakan pelaksanaan dari PO-14 tetanggal 26 Juli 1962.

3. Operasi Jatayu dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1962, dengan tugas yang sama dengan operasi Rajawali ialah penerjunan penambahan pasukan dan perbekalan di daerah-daerah Sorong, Kaimana dan Merauke. Jumlah pasukan yang diterjunkan merupakan yang terbesar dilakukan, terbagi dalam 3 bagian.
  - a. *Elang* dengan pasukan sebanyak 134 orang dan daerah penerjungan di Sorong.
  - b. *Gagak* dengan pasukan sebanyak 141 orang dan daerah penerjungan di Kaimana
  - c. *Alap-alap*, dengan pasukan sebanyak 132 orang dan daerah penerjungan di Merauke.<sup>94</sup>

Pasukan yang diterjunkan seluruhnya berjumlah 407 orang. Pada saat-saat pemberangkatan pasukan tersebut, Panglima Mandala bersama Panglima AULA telah melakukan inspeksi kesiapan tempurnya. Hasil penerjungan Operasi Jatayu inipun berlangsung dengan lancar. Temyata kegiatan ini merupakan penerjungan pasukan yang terakhir dilakukan di daratan Irian Barat. Sehari setelah penerjungan tersebut berlangsung, pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani Persetujuan New York yang berisikan usul Bunker. Kemudian disusul dengan Perintah Penghentian Permusuhan oleh Presiden/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat.

<sup>94</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit* halaman 232.

## 2. RENCANA DAN PERSIAPAN OPERASI JAYAWIJAYA

Persoalan-persoalan strategis yang dihadapi oleh Komando Mandala menyangkut pengembangan situasi militer di Irian Barat, ialah :

- a. Pengembangan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- b. Pengembangan pangkalan-pangkalan Laut dan Udara.
- c. Penyediaan perbekalan, perlengkapan dan pertahanan daerah belakang.
- d. Menjamin tetap lancarnya kegiatan Pemerintahan dan ekonomi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan tercapainya tujuan politik dan kemampuan yang tersedia, maka Komando Mandala telah menentukan sasaran-sasaran penting yang harus dikuasai ialah :

1. Sasaran pokok ialah Biak, sebagai pusat pertahanan militer musuh.
2. Sasaran-antara ialah Fak-Fak, Sorong, Kaimana, Kotabaru dan Merauke.

Penggolongan sasaran-sasaran pokok dan antara juga dibagi sebagai berikut :

- a. Sasaran politik ialah Kotabaru dan Kaimana
- b. Sasaran militer ialah Biak, Sorong dan Kaimana.
- c. Sasaran psikologis ialah Merauke.<sup>95</sup>

Cara-cara penyusupan melalui laut yang mula-mula dilakukan untuk memasukkan kekuatan pasukan Indonesia ke daratan Irian Barat agar secara berangsur-angsur dalam tahun 1962 dapat dimasukkan 10 kompi, ternyata kurang dapat mencapai sasarannya. Hal ini terjadi karena tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Belanda, juga karena keadaan iklim yang mulai tidak menguntungkan sesudah bulan Maret. Maka cara lain telah ditempuh mulai bulan April 1962 dengan penerjunan-penerjunan lewat udara, tanpa mengurangi usaha yang dapat dilakukan melalui pendaratan dari laut. Ternyata cara penerjunan dari udara lebih berhasil dan karena kemajuan-kemajuan percaturan diplomasi telah menuntut dipercepatnya persiapan-persiapan infiltrasi, sehingga jadwal waktu pemasukan pasukan dapat dipenuhi sebelum tanggal 15 Agustus 1962.

Sukses-sukses kegiatan penerjunan yang semula tidak diperkirakan, menyebabkan Belanda mulai lebih berhati-hati menggunakan pesawat-pesawat tempurnya. Dengan demikian keunggulan udara secara berangsur-angsur terlepas dan pindah ke tangan Indonesia. Kejadian ini telah dicapai tanpa melalui pertempuran-pertempuran udara yang berat, melainkan dengan kegiatan-kegiatan pameran kekuatan (show of force) tentang kemampuan-kemampuan pesawat tempur strategis yang telah dapat dipergunakan secara operasional.

---

<sup>95</sup> Case Study, halaman 4.

Keadaan demikian ini yang mendorong untuk segera menyiapkan pelaksanaan operasi terbuka sebagaimana dimaksudkan dalam Tahap Eksploitasi, yang dinamakan Operasi Jayawijaya. Jadwal pelaksanaan operasi ini ditentukan pada bagian pertama bulan Agustus 1962. Pertimbangan yang dipakai ialah karena sesudah bulan Agustus 1962 umumnya di daerah sasaran pokok Biak sudah tidak memungkinkan lagi mengadakan operasi amfibi secara besar-besaran.

Operasi Jayawijaya sendiri mula-mula direncanakan dengan didahului oleh pelaksanaan suatu operasi dari Petunjuk Operasi No. POPS-05 ialah tentang perebutan sasaran-antara Sorong, Fakfak dan Kaimana dengan tujuan untuk :

- a. Memudahkan gerakan-gerakan militer selanjutnya dan diperkirakan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 1962.
- b. Memanfaatkan situasi yang menguntungkan dengan berhasilnya penerjunan-penerjunan udara, untuk mendukung perjuangan diplomasi.

Tetapi seluruh komponen Mandala menjumpai kesukaran-kesukaran dalam melaksanakan POPS-05, karena masing-masing masih harus mempersiapkan unsur-unsur pertahanan, pembangunan perbekalan dan penggiatan infiltrasi satuan-satuan yang membutuhkan cukup waktu. Khususnya bagi komponen-komponen Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk mencapai keunggulan laut dan udara tidak ada perbedaan antara perebutan sasaran pokok dan sasaran antara, karena yang dihadapi ialah kekuatan musuh secara keseluruhan.<sup>96</sup> Maka kemudian disimpulkan perlu adanya pengunduran waktu yang cukup, hingga seluruh komponen siap untuk merebut sasaran pokok Biak.

Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut di atas lalu dikeluarkan petunjuk operasi No. POPS-6/SR/6/62 tertanggal 22 Juni 1962 ialah POPS Jayawijaya untuk merencanakan perebutan sasaran Biak dengan mengadakan pendaratan amfibi yang didahului oleh penerjunan pasukan Para. Perebutan sasaran-antara kemudian ditetapkan akan merupakan suatu rencana pengganti (alternate plan) apabila Operasi Jayawijaya tidak membawa hasil seperti diharapkan.<sup>97</sup> Perintah Operasinya terwujud dalam PO-13 atau PO Sembrani tertanggal 20 Juli 1962 dengan sasaran Kotabaru apabila sasaran Biak tidak berhasil direbut. Berdasarkan POPS Jayawijaya telah diadakan pentahapan-pentahapan operasi berturut-turut sebagai berikut :

1. Operasi Jayawijaya I No. PO-09 tanggal 19 Juli 1962 ialah operasi untuk merebut keunggulan udara dan laut dengan cara pemboman/penembakan dari udara oleh AULA dan penyerbuan pasukan-pasukan komando serta pemburuan bebas (free hunting) oleh ALLA.

---

<sup>96</sup> Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 153.

<sup>97</sup> Case Study, halaman 20.



2. Operasi Jayawijaya II No. PO-10 tanggal 20 Juli 1962 ialah operasi perebutan sasaran Biak dengan cara serangan vertikal oleh Kesatuan Tugas I dan II dan horizontal oleh Angkatan Tugas Amfibi (Amphibious Task Force), ATA-17.
3. Operasi Jayawijaya III No. PO-11 tanggal 20 Juli 1962 ialah operasi untuk merebut sasaran Kotabaru dengan Kesatuan Tempur Gatotkaca, bila kesatuan ini tidak perlu dikerahkan untuk merebut sasaran Biak.
4. Operasi Jayawijaya IV No. PO-12 tanggal 20 Juli 1962 ialah Operasi dengan sasaran sama dengan Operasi Jayawijaya III ialah Kotabaru dengan Kesatuan Tempur diperkuat dengan Divisi Lesmono untuk menempatkan kekuasaan di Kotabaru. Operasi ini akan dilaksanakan setelah Operasi Jayawijaya II selesai.

Untuk menghadapi operasi-operasi tersebut, telah disusun komposisi pasukan Komando Mandala sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Bagian pertahanan, terdiri dari :
  1. Kodam XIII, XIV, XV, XVI, Kodamar V, VI, dan Korud III, IV dengan masing-masing pasukan organiknya.
  2. 2 Resimen Brigade Mobil dan Batalyon 508/Brawijaya.
  3. 2 Batalyon Artileri medan.
  4. 14 Batterai artileri sasaran udara dengan 5 stasiun radar.
  5. 8 pesawat udara Mig-17 dan 6 pesawat AS-4 Gannet.
- b. Bagian penipuan/pengikat, terdiri dari :
  1. Kurang lebih 2000 pasukan gerilya di daratan Irian Barat.
  2. 1 brigade infanteri, detasemen Pelopor Brimob dan 3 kompi satuan intel.
  3. 2 Kapal MTB dan Kesatuan Kapal Cepat Torpedo KKCT 16.
- c. Bagian Penghubung/Penyelidik, terdiri dari :  
6 pesawat udara Albatros, 6 pesawat udara helikopter, dan 2 pesawat udara Otter.
- d. Bagian Pengangkut terdiri dari 20 pesawat udara Dakota, 6 pesawat udara Hercules, dan 26 kapal LST.
- e. Bagian Perawatan/Logistik terdiri dari: 9 kapal tanker/salvage dan 3 kapal rumah sakit.
- f. Bagian penyerang terdiri dari :
  1. 6 kapal selam dari Kesatuan Kapal Selam KKS-13, dan 6 kapal selam dari Kesatuan Kapal Selam KKS-15.
  2. 20 pesawat pembom strategis TU-16 dan TU-16 KS, 6 pesawat pembom taktis IL-28, 6 pesawat Mustang P-51, dan 6 pesawat B-25 dan B-26.

98 Panitia Buku Kenangan, *op.cit.*, halaman 153-158.

3. 1 kapal Komando, 2 kapal perusak, 4 kapal MTB, 4 kapal fregat/korvet, 13 kapal buruselam dan 4 kapal penyapu ranjau.
4. Komando Divisi 2 dengan unsur bantuan 1 Batalyon.
5. 2 Brigade Para
6. 1 Brigade KKO Pasrat-45 dibantu dengan Batalyon 509/ Brawijaya dan 1 Kompi Tank.
7. 1 brigade Cadangan Umum Angkatan Darat.

Dalam hubungannya dengan kesiapan tempur di bidang pertahanan udara, maka AULA telah membentuk Kesatuan-kesatuan Tempur yang terpecah di pangkalan-pangkalan udara sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. *KT Parikesit* di pangkalan udara Morotai dengan unsur-unsur: 2 pesawat Albatros, 4 pesawat Mig-17, 6 pesawat TU-16 dan 6 pesawat TU-16 KS.
2. *KT Antareja* di pangkalan udara Amahai dengan unsur-unsur: 6 pesawat Mustang P-51, 1 pesawat Albatros, 1 pesawat helikopter, 4 Mig-17, 6 pesawat IL-28, 4 pesawat Hercules.
3. *KT Aswatama* di pangkalan udara Pattimura/Ambon dengan unsur-unsur: 1 pesawat Albatros, 1 pesawat helikopter Mi-4, 2 pesawat Mig-17, 1 pesawat Otter dan 2 pesawat Hercules.
4. *KT Wisanggeni* di pangkalan udara Letfuan dengan unsur-unsur: 4 pesawat B-25/26, 12 pesawat Dakota, pesawat Albatros 2 buah, 1 helikopter Mi-4, 6 pesawat Mig-17 dan 1 pesawat Otter.
5. *KT Wesiaji* di pangkalan udara Iswahyudi Madiun dengan unsur-unsur: 6 pesawat TU-16 dan 6 pesawat TU-16 KS.
6. *KT Anggada* di pangkalan udara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan unsur-unsur: 4 pesawat Avia, 6 pesawat Dakota, 3 pesawat Hercules dan cadangan dari Wing Garuda berupa pesawat-pesawat transport.

Kesatuan-kesatuan yang telah disusun untuk mempersiapkan bidang pertahanan laut meliputi :

1. *Kesatuan Kapal Cepat Torpedo* atau KKCT-16 terdiri dari 8 kapal cepat torpedo kelas Rusia, 2 kapal cepat torpedo kelas Yaguar untuk keperluan pengangkutan bagi pendaratan (silent landing) dan 2 kapal tender.
2. *Kesatuan Kapal Selam* atau KKS-15, terdiri dari 4 kapal selam dan 2 kapal tender.
3. *Angkatan Tugas Amphibi*, atau ATA-17 yang terdiri dari 60 kapal perang berbagai jenis yang dibagi-bagi menjadi: Gugus Tugas Markas, Gugus Tugas Bantuan Tembakan Kapal,

---

<sup>99</sup> *Madjalah Angkasa*, halaman 61.

Gugus Tugas Tabir, Gugus Tugas Angkut, Gugus Tugas Awas dan Gugus Tugas Perawatan.

4. *Pasukan Pendarat* atau PASRAT-45, terdiri dari 8.100 pasukan, termasuk di dalamnya sebanyak 1.400 pasukan dari ADLA.

Dengan seluruh kekuatan yang dapat dikerahkan dan diperkirakan sebesar 3 kali lebih besar dari kekuatan yang dimiliki Belanda, pada tanggal 17 Juli 1962 atau Hari H-26 pasukan-pasukan sudah mulai bergerak dari pangkalan-pangkalan awal ialah Jakarta, Surabaya dan Amahai. Menurut rencana pada tanggal 12 Agustus 1962 kota Biak mulai direbut dengan serangan-serangan dari satuan lintas udara dan penerjunan pasukan Para, kemudian disusul dengan serangan dan pendaratan pasukan amfibi. Terakhir pendaratan 1 divisi pasukan dengan perlengkapan-perengkapan yang akan menyelesaikan seluruh perlawanan musuh. Dengan demikian seluruh pangkalan laut dan udara Belanda di Irian Barat akan dilumpuhkan. Setelah itu menyusul pendaratan dan perebutan Hollandia. Diperkirakan bahwa keseluruhan operasi akan selesai dalam 5 hari, sehingga hari Proklamasi 17 Agustus 1962 dapat juga dirayakan di Irian Barat.

Pada pelaksanaan Operasi Jayawijaya ini peranan unsur armada laut dari ALLA sangat penting, karena sebagian besar perbekalan tempur, perlengkapan pasukan dan Komando Divisi yang disertai 2 Brigade menjadi muatan armada laut Gerakan armada oleh unsur-unsur ATA-17. Pangkalan-pangkalan awal diatur sebagai berikut :

1. Pangkalan awal Jakarta melalui Balikpapan membawa barang-barang perlengkapan.
2. Pangkalan awal Surabaya langsung dengan membawa muatan Brigade KKO.
3. Pangkalan awal Amahai dengan membawa Komando Divisi II dan Brigade Caduad.

Kesemuanya ini menuju ke Daerah Kumpul I di kepulauan Banggai yang berjarak sekitar 900 mil dari sasaran Biak. Mereka mengadakan konsolidasi kekuatan, sambil menunggu perintah untuk mulai menyerang. Diperkirakan kegiatan ini berlangsung sampai dengan Hari H-8 yang diteruskan dengan gerakan selanjutnya. Selama berada di perairan yang dikuasai sendiri, satuan-satuan armada ini dilindungi oleh pesawat udara Mig-17 dan AS-4 Gannet dan apabila sudah masuk di daerah perairan musuh, pengawalan diganti dengan pesawat-pesawat TU-16 dan TU-16 KS. Pada hari H-6 sudah bergerak lagi ke daerah temu ialah 60 derajat sebelah utara Morotai. Kemudian pada hari H-4 mereka mulai meneruskan gerakannya menuju ke daerah sasaran.

Pada hari H-2 maka kesatuan tempur udara mulai membawa pasukan dari Pos Belakang dengan pesawat-pesawat angkut menuju pemusatan-pemusatan pasukan Para di Pos-Pos depan Ambon, Amahai, dan Letfuan. Pada hari itu juga dimulai serangan-serangan terhadap unsur-unsur udara musuh untuk merebut keunggulan udara. Pemboman-pemboman dari udara dilakukan

terhadap semua sasaran militer di wilayah Irian Barat. Kegiatan yang sama besar akan dilakukan agar musuh tidak akan mengerti sasaran pokok yang dikehendaki.

Pada Hari-H akan dilakukan penerjunan-penerjunan oleh Brigade Para Gatotkaca dan Sena di daerah sasaran dan Hari H-2 dilakukan pendaratan oleh ATA-17 sebanyak 8.100 orang dari pasukan pendarat atau PASRAT-45 dan 8.000 orang dari ADLA yang tergabung dalam pasukan-pasukan Wibisana, Lesmana dan Hanoman. Mereka diharapkan dapat mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Para yang telah diterjunkan lebih dahulu untuk kelancaran pendudukan wilayah. Direncanakan paling lambat Hari H + 7 atau 4 hari setelah pendaratan-pendaratan terakhir tersebut, musuh sudah akan dapat dihancurkan dan sasaran utama Biak seluruhnya dapat dikuasai. Sebagai cadangan telah disiapkan 2 Brigade Para lagi untuk penambahan kekuatan dan kelanjutan operasi, ialah penerjunan di Sorong dan Kotabaru.

Rencana kegiatan-kegiatan Operasi Jayawijaya tersebut telah ditetapkan sejak tanggal 18 Mei 1962, dengan ketentuan Hari H ialah tanggal 12 Agustus 1962, dengan ketentuan Hari H ialah Hari H pendaratan pasukan Para yang pertama kali di daerah sasaran. Pada tahap-tahap permulaan Operasi Jayawijaya sudah mulai dilaksanakan sampai dengan pemusatan pasukan unsur-unsur ATA-17 di Daerah Kumpul I. Perkembangan-perkembangan di bidang diplomasi ternyata terlihat adanya kemungkinan kesediaan pihak Belanda untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat secara sungguh-sungguh di meja perundingan. Pada tanggal 5 Agustus 1962 Panglima Mandala tiba di Daerah Kumpul I dan menyampaikan keputusan bahwa Hari H Operasi Jayawijaya diundurkan menjadi Hari H + 14. Pengunduran waktu ini kemudian dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan latihan-latihan bagian operasi yang masih perlu dilengkapkan. Latihan-latihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1962 dengan kekuatan penuh dari unsur-unsur ATA-17 di Tanjung Biak, selatan Peleng di Teluk Banggai yang berjarak sekitar 35 mil dari Daerah Kumpul I. Titikberat latihan operasi ini ditekankan pada gerakan-gerakan konvoi dan tabir.

Persetujuan New York yang secara resmi mengakhiri sengketa Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat akhirnya ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 telah menyebabkan keluarnya Perintah Penghentian Permusuhan oleh Panglima Tertinggi/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat pada tanggal 16 Agustus 1962. Pada tanggal 25 Agustus 1962 Operasi Jayawijaya dengan semua persiapan-persiapannya telah dihentikan, disusul dengan pembentukan suatu Liaison Group untuk meneruskan perintah penghentian permusuhan kepada pasukan-pasukan yang berada di daratan Irian Barat.

### 3. PERCATURAN DIPLOMATIK SAMPAI TERCAPAINYA PERSETUJUAN NEW YORK

Sebagaimana telah diuraikan di muka, dalam masa-masa memuncaknya ketegangan sengketa antara Indonesia dan Belanda telah muncul suatu usul perdamaian, terkenal dengan Usul Bunker. Seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, rupanya telah mendapatkan kepercayaan Pemerintahnya untuk mencarikan jalan ke luar menuju perdamaian. Hal ini sesuai dengan sikap Amerika Serikat yang mula-mula cenderung membantu Belanda, tetapi setelah melihat ketegasan sikap Indonesia ditekankan agar keduanya bertemu lagi di meja perundingan.

Pokok-pokok isi Usul Bunker adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Pemerintah-pemerintah Indonesia dan Belanda masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama akan menandatangani suatu persetujuan yang diajukan kepada Pejabat Sekretaris PBB.
2. Pemerintah Belanda menyetujui penyerahan pemerintahan di Irian Barat kepada suatu Badan Eksekutif Sementara di bawah PBB yang akan mengangkat Kepala Pemerintahan Sementara tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak. Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut akan berlangsung tidak kurang dari 1 tahun, tetapi tidak lebih dari 2 tahun. Tugasnya ialah mengurus berakhirnya Pemerintahan Belanda. Dalam waktu singkat pemerintahan akan digantikan dari pejabat-pejabat Belanda dengan pejabat-pejabat yang bukan Belanda dan bukan Indonesia yang bekerja atas dasar perjanjian pendek 1 tahun.
3. Pada tahun kedua pemerintahan mulai diganti oleh pejabat-pejabat Indonesia, sehingga pada akhir tahun kedua kekuasaan telah berada di tangan Indonesia, kecuali tenaga-tenaga teknik khusus dari PBB akan tetap pada kedudukannya selaku penasehat.
4. Indonesia menyetujui untuk memberikan kesempatan rakyat di Irian Barat menyatakan pilihannya secara bebas, selambat-lambatnya tujuh tahun setelah pemerintahan berada di tangan Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh PBB.
5. Indonesia dan Belanda menyetujui untuk memikul bersama biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan Pemerintahan Sementara PBB.
6. Sesudah persetujuan ditandatangani, kedua pemerintah Indonesia dan Belanda membuka kembali hubungan diplomatiknya.

Penerimaan Indonesia secara prinsip atas Usul Bunker dapat diartikan bahwa meskipun secara terperinci kurang dapat menyetujui usul tersebut;

---

<sup>100</sup> Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 121-123.

tetapi pada isi keseluruhan dapat diterima terutama mengenai prinsip penyerahan pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia secara tidak langsung. Sedangkan mengenai pemerintahan sementara selama 2 tahun tidak dapat disetujui karena dirasakan terlalu lama dan membuang waktu yang tidak berguna. Pada dasarnya sejak semula Indonesia telah siap untuk menggantikan pemerintahan di Irian Barat, bahkan pada tahun 1962 itu juga.

Setelah Belanda juga menyatakan sikap menerima pada prinsipnya Usul Bunker, kesulitan yang dihadapi ialah ketiadasamaan antara penafsiran Belanda dan Indonesia. Penerimaan Belanda pada prinsipnya atas Usul Bunker dengan pengertian menitik-beratkan tentang syarat-syarat pertahanan dan penentuan nasib sendiri. Timbulnya penafsiran-penafsiran yang berbeda tersebut telah mendorong pejabat Sekretaris Jenderal PBB U Thant untuk berusaha menentukan titik-titik pertemuan pendapat agar perundingan selanjutnya dapat segera diselenggarakan.<sup>101</sup>

Pemerintah Indonesia kemudian menjelaskan sikapnya, ialah :

1. Pembebasan Irian Barat tetap akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan lagi.
2. Untuk mencegah salah pengertian dalam melaksanakan Usul Bunker, supaya disertai tahap-tahap pembagian waktu.
3. Hak Rakyat Irian Barat untuk menetapkan hari kemudian, akan dilaksanakan setelah Belanda menyerahkan Irian Barat mutlak kepada Indonesia.

Maka setelah dilakukan perundingan-perundingan pendahuluan secara tertutup (*secret preliminary*) antara wakil-wakil Indonesia, Belanda dan PBB secara terpisah, tercapailah perumusan pada tanggal 18 Juli 1962 yang menyebutkan bahwa Belanda menerima urutan dari pokok-pokok yang tercantum dalam Usul Bunker, dengan syarat Pemerintah Belanda mendapat jaminan bagi hak-hak dan kepentingan rakyat Irian Barat. Karena dalam urutan Usul Bunker tercantum juga penyerahan pemerintah Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia meskipun terlebih dahulu melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB, berarti Belanda bersedia melepaskan kekuasaannya di wilayah tersebut. Dengan demikian Indonesia dapat menerima penafsiran Belanda.

Atas dasar persesuaian pendapat ini maka dilakukan perundingan-perundingan lanjutan antara kedua belah pihak dengan pengawasan PBB. Pembicaraan-pembicaraan tetap bersifat tertutup untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan adanya pihak luar yang akan mengganggu kelancaran usaha mendapatkan penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Sebagai hasil dari perundingan-perundingan tersebut, maka pada tanggal 31 Juli 1962 ter-

---

101 Baharuddin Lopa, *op.cit.*, halaman 129.

capai suatu persetujuan Sementara (Preliminary Understanding) yang berisi pokok-pokok sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, maka selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 penguasa dari Badan Pemerintahan Sementara PBB (United Nation Temporary Executive Authority/UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda. Saat itu juga bendera Belanda diturunkan, yang berarti kekuasaan atas daerah tersebut diserahkan kepada UNTEA.
2. Pemerintahan Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
3. Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah kekuasaan Pemerintahan Sementara PBB.
4. Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang berangkat akan ditempatkan dalam pengawasan PBB dan tidak boleh dipergunakan untuk operasi-operasi militer.
5. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lain berlaku lalulintas bebas.
6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB.
7. Pemulangan anggota-anggota Sipil dan Militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintahan Sementara PBB.

Persetujuan Sementara ini masih harus diajukan ke pemerintahan masing-masing oleh wakil-wakil yang berunding untuk mendapatkan persetujuan. Setelah ternyata pokok-pokok Persetujuan Sementara yang dilandasi Usul Bunker tersebut dapat disetujui kedua Pemerintah, maka tinggal menyelesaikan persoalan-persoalan teknis yang menyangkut bidang finansial dan militer. Sementara perundingan-perundingan tingkat terakhir masih berlangsung, terjadi kesulitan-kesulitan lagi, berhubung adanya protes Belanda karena penerjunan-penerjunan pasukan Indonesia yang terus saja terjadi. Indonesia berpendirian bahwa aksi-aksi pendaratan dan penerjunan di daratan Irian Barat harus tetap berlangsung sebelum Belanda secara resmi membubuhkan tandatangan di atas perjanjian. Protes tersebut tanpa mengurangi tuntutan-tuntutan prinsipial dari Indonesia, ternyata dapat diatasi oleh U Thant sehingga perundingan berjalan terus. Setelah persoalan-persoalan teknis dapat diselesaikan,

---

102 Baharuddin Lopa SH., *op.cit.*, halaman 135-138.

kemudian meningkat memasuki taraf perundingan formil secara terbuka. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 persetujuan tersebut ditandatangani di Markas Besar PBB New York dan mendapat pengesahan dari Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September 1962.

#### 4. KEGIATAN-KEGIATAN OPERASI SESUDAH PERSETUJUAN NEW YORK

Segera setelah persetujuan New York ditandatangani kemudian disusul dengan Perintah Penghentian Permusuhan oleh Panglima Tertinggi/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat pada tanggal 16 Agustus 1962 dan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 25 Agustus 1962 oleh Panglima. Tetapi kenyataannya Belanda masih tetap mengadakan patroli-patroli laut dan udara, terutama di siang hari. Juga belum diketahui secara pasti kapan Belanda mau segera menarik kekuatan militernya dari daerah Irian Barat.

Maka Komando Mandala sementara menganggap perlu tetap dilakukan kesiap-siagaan untuk mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai, baik di bidang militer maupun diplomasi. Untuk memberikan penilaian keadaan yang sudah berubah, telah dikeluarkan suatu Gagasan Strategi Komando No. 002/GSR/SR/8/62 tertanggal 28 Agustus 1962 yang berisi kebijaksanaan pelaksanaan sesuai tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pelaksanaan Strategis sampai 1 Oktober 1962.
  - a. Menghentikan semua infiltrasi ke daratan Irian Barat.
  - b. Merencanakan dan mempersiapkan perebutan sasaran terbatas.
  - c. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan penambahan (resupply) untuk pasukan-pasukan yang telah didaratkan/diterjunkan.
  - d. Mengkonsolidasi dan mempersiapkan pasukan yang telah berada di daratan Irian Barat untuk tugas penguasaan wilayah.
2. Kebijakan Pelaksanaan Strategis setelah 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963.
  - a. Mengkonsolidasikan keamanan dalam negeri untuk menghadapi ofensif Belanda dengan dalih lalulintas bebas.
  - b. Merencanakan dan melaksanakan operasi penguasaan wilayah daratan Irian Barat.
  - c. Mempersiapkan unsur-unsur Kodam, Kodamar, Korud, Komisariat Kepolisian dan Pemerintahan Sipil serta alat-alat kekuasaan RI lain untuk mengawasi penyerahan administrasi Pemerintahan dari Badan Pemerintahan Sementara PBB kepada Indonesia.
3. Kebijakan Pelaksanaan Strategis setelah 1 Mei 1963:
  - a. Menegakkan kekuasaan RI.



- b. Memajukan kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Irian Barat.
- c. Mengamankan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri sebagai hasil persetujuan resmi, yang menguntungkan perjuangan bangsa Indonesia.

Atas dasar Gagasan Strategis tersebut, maka dikeluarkan Petunjuk Operasi Brajamusti No. POPS-70/SR/9/62 tertanggal 3 September 1962, yaitu :

1. Menyiapkan suatu kesatuan tempur untuk menghadapi kemungkinan Belanda tidak mentaati perjanjian.
2. Merebut dan menduduki sasaran-terbatas atau sasaran-antara Sorong, untuk dijadikan pangkalan lebih depan.

Seterusnya sebagai pelaksanaan POPS tersebut telah dikeluarkan Perintah Operasi Brajamusti No. 16 tanggal 18 September 1962 dengan sasaran terbatas Sorong dan Hari - H tanggal 28 September 1962. Sementara kekuatan dari ATA-17 ditarik ke belakang untuk konsolidasi, telah dibentuk kesatuan baru ATA-19 sebagai unsur pemukul dalam operasi tersebut.

Akhirnya Pemerintah Belanda mengumumkan rencana pengembalian pasukan-pasukan militernya dari Irian Barat, yang diperkirakan akan berakhir dalam bulan Nopember 1962. Maka Perintah Operasi inipun kemudian dicabut, ialah pada tanggal 27 September 1962. Tahap pertama dari pelaksanaan Perjanjian New York telah dipenuhi oleh Belanda ketika pada tanggal 1 Oktober 1962 mereka betul-betul menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Badan Pemerintahan Sementara PBB/UNTEA.

Menyusul usaha pengamanan keadaan pada tahap selanjutnya ialah dengan dikeluarkannya Petunjuk Operasi Sadar No. Pops-08/SR/10/62 tertanggal 31 Oktober 1962 yaitu :

1. Untuk pengamanan pelaksanaan persetujuan pada tanggal 31 Desember 1962 dengan penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera Indonesia di daratan Irian Barat. Ini berarti berakhirnya secara resmi kekuasaan Belanda di wilayah tersebut.
2. Pengamanan unsur-unsur Pemerintah dalam melakukan tugas pengawasan di wilayah Irian Barat.

Sebagai pelaksanaan petunjuk operasi ini telah dikeluarkan Perintah Operasi Wisnumurti No. PO-17 tertanggal 5 Januari 1963, yaitu untuk persiapan menghadapi penyerahan administrasi pemerintahan Irian Barat dari Badan Pemerintahan Sementara PBB kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963. Dengan perhitungan kekuatan finansial-ekonomi Indonesia sendiri, maka kesatuan-kesatuan yang bergabung dalam Operasi Wisnumurti juga dipersiapkan untuk ikut aktif melaksanakan operasi-operasi bakti dengan menanamkan kesadaran mental terutama kepada penduduk setempat. Juga telah dibekali dengan perlengkapan-perengkapan untuk usaha swa-sembada

pangan. Operasi ini juga diiringi oleh pameran armada ALLA di muka pelabuhan Hollandia, dengan unsur-unsur AT-11 dipimpin oleh KRI *Multatuli* dan AT-14 dipimpin oleh KRI *Irian*.

Berdasarkan laporan-laporan dari Liaison Group/Perwira Penghubung di Irian Barat maka sesudah penghentian permusuhan menunjukkan kenyataan-kenyataan bahwa:<sup>103</sup>

1. Kekuatan Belanda di pusat pertahanannya baik yang semula diperkirakan berkekuatan 2 Brigade, ternyata tinggal 1 batalyon.
2. Pasukan cadangan Belanda telah dikerahkan ke front-front depan di sekitar tempat-tempat pemusatan para gerilyawan.
3. Angkatan Udara Belanda lemah karena alat radar belum sempat dipasang, sedangkan front yang harus dihadapi terlalu luas.
4. Angkatan Laut Belanda terpencar-pencar karena mengangkut pasukan-pasukannya untuk tambahan kekuatan (reinforcement) ke tempat-tempat di bagian selatan dan barat Irian Barat, karenanya tidak lagi merupakan suatu yang masih utuh dan kokoh lagi.

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan rencana strategi Panglima Mandala untuk mematahkan pemusatan kekuatan musuh di Biak dengan operasi-operasi infiltrasi dapat berhasil baik.
2. Perlindungan udara (Air cover) yang dibutuhkan ALLA dengan demikian terjamin.
3. Perebutan keunggulan udara pasti akan berhasil.
4. Dengan keunggulan udara dan penggunaan kekuatan pasukan yang jauh lebih besar dari musuh, maka pasti perebutan sasaran Biak dapat berhasil.

Pada tanggal 31 Desember 1962 kekuasaan Belanda di Irian Barat telah berakhir dengan lambang penurunan benderanya, yang digantikan dengan penaikan bendera Indonesia, sebagai lambang mulainya kekuasaan de jure RI di Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintahan Sementara PBB berakhir, sejak itu kekuasaan de facto RI di Irian Barat mulai berlaku.

## 5. PERANAN-PERANAN UNSUR-UNSUR MILITER DAN DIPLOMASI PADA PEMEBBASAN IRIAN BARAT.

Pelaksanaan Pembebasan Irian Barat yang berwujud lewat Tri Komando Rakyat dengan Operasi Jayawijaya sebagai puncaknya, telah menunjukkan tentang seluk-beluk hubungan dan kerjasama antara kegiatan-kegiatan di

---

103 Case Study, halaman 26.

bidang militer dan di bidang diplomasi. Karena pada hakekatnya kedua kegiatan tersebut mempunyai satu tujuan yang saling membantu. Dalam pertengahan abad ke-20 rupanya diplomasi tidaklah semata-mata kepandaian dan keuletan berunding saja. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diplomasi harus didukung oleh kekuatan-kekuatan fisik secara nyata. Sebaliknya kekuatan militer saja tanpa dukungan diplomasi akan meminta biaya terlalu mahal untuk memenangkan tujuan perang. Dalam hal ini aspirasi yang mendukung semua kegiatan tersebut ialah terwujudnya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Lawan yang dihadapi ialah Belanda, karena sikapnya yang tidak juga mau melepaskan kekuasaannya atas wilayah Irian Barat.

Dalam rangka aksi-aksi Tri Komando Rakyat inilah Indonesia mendapat kesempatan untuk mempraktekkan kerjasama di bidang militer dan di bidang diplomasi. Perjuangan pembebasan Irian Barat merupakan konfrontasi di segala bidang terhadap kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Konfrontasi di bidang militer dilakukan seiring dengan perjuangan di bidang diplomasi. Kekuatan Nasional telah dikerahkan sampai sebesar 70 persen untuk mencapai tujuan.<sup>104</sup> Strategi dasar yang dipakai ialah bahwa pada tahun 1962 itu juga Irian Barat sudah harus masuk ke dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut selain dengan jalan pengerahan kekuatan Nasional, juga memanfaatkan pertarungan-pertarungan kekuatan dunia melalui saluran-saluran diplomasi.

Suatu Komando tunggal yang dapat meliputi semua pengerahan daya dan tenaga (*funds and forces*) agar dapat dibina suatu dayaguna (*efficiency*) yang tinggi, keputusan-keputusan lekas dapat diambil dan tindakan-tindakan yang perlu dapat segera dilaksanakan. Dengan terbentuknya Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, maka kerjasama antara bidang-bidang militer dan diplomasi dapat dilakukan. Pelaksanaannya berpedoman kepada penyelesaian yang maksimal di bidang diplomasi dengan menarik manfaat sebesar-besarnya dari situasi militer baik yang telah dilancarkan maupun yang sedang dipersiapkan. Persiapan-persiapan operasi dengan secara nyata disertai dengan penempatan-penempatan pasukan yang secara strategis memberikan banyak kemungkinan-kemungkinan terhadap musuh, ternyata merupakan alat bantu diplomasi yang sangat besar artinya.

Meskipun Operasi Jayawijaya telah ditunda kemudian dihentikan di tengah jalan karena tercapainya jalan penyelesaian secara berunding, tetapi persiapan-persiapan operasi itu sendiri telah merupakan unsur yang menentukan. Sementara itu sebagian pendapat di kalangan militer menganggap bahwa penyelesaian terakhir di bidang diplomasi dirasakan kurang memuaskan. Khususnya mengenai saat-saat terakhir sebelum tercapainya Persetujuan New

---

104 Laporan Komando Terakhir, halaman 2.

York situasi militer yang menguntungkan Indonesia dianggap kurang pemanfaatannya sebagai alat bantuan untuk mendesak tuntutan-tuntutan diplomasi. Semula diharapkan bahwa sebelum 1 Januari 1963 Irian Barat baik de facto maupun de jure sudah harus berada dalam lingkungan Republik Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi waktu itu hanya dapat menghasilkan status de jure Irian Barat yang bisa dicapai oleh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1962, dengan penaikan bendera Indonesia disamping bendera PBB. Tetapi di atas pendapat tersebut ada pertimbangan lain yang berpedoman bahwa strategi yang baik ialah apabila dapat memenangkan perang tanpa melakukan pertempuran.

Mengenai segi operasionil, maka secara strategis kegiatan-kegiatan infiltrasi yang semula didaratkan lewat laut kemudian diintensifkan lewat penerjunan-penerjunan dari udara, sebagai cara mendapatkan inisiatif dan mengikat perhatian musuh, nampak berhasil.

Meskipun demikian secara taktis, operasi ini kurang menguntungkan karena kesukaran-kesukaran medan yang dijumpai pasukan di daratan Irian Barat dan terjadinya kekeliruan-kekeliruan navigasi selama penerjunan-penerjunan berlangsung. Selain itu juga besarnya radius penyebaran-penyebaran pasukan pada suatu daerah penerjunan (dropping zone) yang telah ditentukan dan hancurnya alat-alat perhubungan yang dijatuhkan, telah menghambat kelancaran operasi. Kerugian lain dialami karena kesalahan taktik tempur setelah berhasil dengan selamat diterjunkan.

Prestasi yang berarti dalam kegiatan-kegiatan ini bahwa pertahanan udara musuh ternyata dapat ditembus, bahkan mula-mula hanya dengan pesawat-pesawat jenis transport Dakota. Keadaan ini rupanya menjadi bibit-bibit ketidakpercayaan, terutama dirasakan oleh pihak yang semula membantu pendirian Belanda, atas kemampuannya untuk mempertahankan wilayah Irian Barat. Maka situasi yang demikian ini menempatkan kedudukan yang baik-bagi perjuangan diplomasi Indonesia selanjutnya.

Secara keseluruhannya Pembebasan Irian Barat merupakan suatu sukses. Belanda telah berusaha untuk memperkecil arti dari unsur-unsur militer dan politik yang sebetulnya memang menguntungkan Indonesia. Kesadaran yang mendalam tentang strategi militer dan kemampuan dalam percaturan diplomasi telah dapat dicapai dengan cukup baik. Hanya cara untuk mencapai tujuan perlu perbaikan untuk mendapatkan koordinasi yang sempurna. Koordinasi antara bidang-bidang diplomasi, militer dan aksi massa yang saling menunjang, perlu disempurnakan untuk mencapai kebulatan usaha mencapai sasaran Nasional.

## 6. P E N U T U P

Sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat yang berlangsung selama 12 tahun akhirnya memperoleh pemecahan secara

damai pada tanggal 15 Agustus 1962, dengan ditandatanganinya persetujuan New York dengan pengawasan langsung dari PBB. Tuntutan Indonesia untuk menyatukan wilayah tersebut ke dalam kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia ternyata dapat dipenuhi oleh Belanda melalui suatu masa peralihan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, ialah Badan Pemerintahan Sementara PBB atau UNTEA. Di lain pihak Indonesia mengakui dan melaksanakan tuntutan Belanda tentang pemberian hak menentukan pendapat bagi rakyat Irian Barat untuk mengatur status wilayahnya sendiri. Referendum ini dilakukan selambat-lambatnya setelah 7 tahun penyerahan kekuasaan penuh kepada Indonesia ialah pada tahun 1969 dan semata-mata merupakan persoalan dalam negeri RI. Pelaksanaannya kemudian terkenal dengan Pernyataan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tanggal 5 Juli 1969, yang menghasilkan suara Irian Barat secara bulat untuk tetap bergabung dalam wilayah Kesatuan RI.

Masa peralihan kekuasaan pemerintahan dari tangan Belanda kepada Indonesia melalui Badan Pemerintahan Sementara PBB tersebut berlangsung selama 6 bulan, ialah :

- a. Antara 1 Oktober 1962 sampai 31 Desember 1962 masa peralihan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintahan Badan Pemerintahan Sementara PBB.
- b. Antara 1 Januari 1963 sampai 1 Mei 1963, masa peralihan antara Badan Pemerintahan Sementara PBB dengan Pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian maka mulai 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat secara de-facto maupun de-jure masuk ke dalam wilayah kekuasaan RI. Untuk menjaga ketertiban selama Pemerintahan Peralihan berlaku, maka ditempatkan pasukan-pasukan dari Pakistan yang bestatus sebagai pasukan keamanan PBB. Sebagai Kepala Pemerintahan Sementara semula ditunjuk Ellsworth Bunker, tetapi karena tidak bersedia, maka ditetapkan Dr. Djalal Abdoh dari Iran.<sup>105</sup>

Dengan selesainya tugas Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963, maka pada tanggal 30 April 1963 Komando Mandala telah dibubarkan di Markas Besar Komando Mandala ialah Makassar. Pengalaman-pengalaman yang didapat pada Komando Pembebasan Irian Barat ialah kebutuhan adanya suatu Kekuatan Strategis Nasional. Karena sering terjadi keadaan politis yang menguntungkan yang membutuhkan dukungan kekuatan militer berlangsung lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk pengembangan kekuatan militer. Komando Mandala sendiri dalam bentuknya lebih merupakan suatu Satuan Tugas yang meliputi semua Angkatan dan Kepolisian untuk tugas tertentu.

Dirasakan juga adanya kekurangan-kekurangan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dengan Komando Mandala serta hubungannya dengan

<sup>105</sup> Baharuddin Lopa SH, *op.cit.*, halaman 147.

Angkatan-Angkatan dan Kepolisian, sehingga dapatlah ditentukan secara nyata kedudukan-kedudukan tiap Angkatan dan Kepolisian dalam memberikan bantuannya terhadap komponen masing-masing yang tergabung dalam Komando Mandala. Ketentuan-ketentuan ini sangat perlu untuk mencegah adanya salah penilaian kemampuan. Setidak-tidaknya akan segera dapat diketahui jika kesatuan yang dibutuhkan dalam waktu tertentu, tidak dapat didukung oleh sesuatu Angkatan.

Pada bidang-bidang kegiatan Komando Mandala sendiri berupa pembuatan-pembuatan perkiraan-perkiraan dan konsep-konsep operasi terasa sekali kurangnya tersedia keterangan-keterangan intelijen strategis dan taktis. Sebagian besar keterangan-keterangan yang diterima sudah bersifat tua dan kurang terperinci atau perlu dilakukan pemeriksaan kebenarannya. Peta operasi sangat terbatas sehingga kurang dapat membantu. Usaha-usaha pengumpulan keterangan-keterangan dengan cara yang sederhana, kebanyakan bersifat pengumpulan intelijen tempur. Karena kurang lancarnya komunikasi antara petugas-petugas dengan Markas Besar Komando yang akan mengolah bahan-bahan tersebut, maka keterangan-keterangan datangnya sudah terlambat atau sudah basi (out of date).<sup>106</sup>

Kelemahan yang menonjol pada pihak Indonesia ialah belum adanya perencanaan strategis secara nasional. Sesuai dengan bentuk geostrategi Indonesia, harus diperhatikan tentang penempatan-penempatan pangkalan-pangkalan laut dan udara yang diperlukan untuk pelaksanaan pertahanan Negara, yang harus tersebar dan mempunyai cukup fasilitas sebagai pangkalan. Disamping itu harus tersedia pasukan-pasukan amfibi, lintas udara, para komando dan infanteri yang terlatih baik. Pangkalan-pangkalan laut dan udara tersebut merupakan unsur yang menentukan dalam kecepatan (mobilitas) dan kekenyalan (fleksibilitas) baik sebagai unsur pertahanan maupun sebagai unsur pendudukan.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan ialah unsur mempertinggi kecepatan (mobilitas) pasukan, baik lewat laut maupun udara. Fasilitas-fasilitas mengenai angkutan laut dan angkutan udara militer terasa kurang sekali tersedia. Tahap pertahanan strategis yang mulai dimasuki semenjak aksi-aksi pembebasan Irian Barat, sudah mulai dirasakan tidak terbatas pada komponen-komponen darat saja, tetapi harus mampu mengintegrasikan seluruh unsur-unsur Angkatan Bersenjata secara lebih berdaya guna (effisien). Laut dan udara bukan merupakan unsur-unsur pemisah, sebaliknya harus merupakan media penghubung, dengan demikian harus dikuasai sepenuhnya. Juga merupakan keharusan adanya keseimbangan dan koordinasi yang baik antara unsur-unsur Angkatan Bersenjata dalam melaksanakan tugas di bidang masing-masing, ataupun secara bersama. Tiap gangguan yang berarti ataupun

---

106 Laporan Komando Terachir, halaman 5.

serangan-serangan dari luar meminta usaha gabungan dari semua unsur Angkatan Bersenjata. Apabila hal ini diabaikan, maka Negara Indonesia ini akan merupakan keping-keping pulau saja yang berdiri sendiri-sendiri, dengan demikian akan mudah sekali dikuasai lawan.

Pengalaman-pengalaman tugas-tugas Komando Mandala menunjukkan bahwa unsur-unsur tempur laut dan udara Indonesia sudah cukup kuat. Keadaan ini bisa disempurnakan dengan pemeliharaan unsur-unsur tersebut yang dilengkapi dengan unsur angkut militer menurut kebutuhan strategis dan didukung oleh pangkalan-pangkalan laut dan udara yang tersebar baik. Apabila hal ini bisa dilakukan maka kekuatan pertahanan Indonesia akan dapat menggantikan kedudukan Inggris di Asia Tenggara.<sup>107</sup>

107 Laporan Komando Terachit, halaman 5.

## DAFTAR BIBLIOGRAFI

- Bone Jr, Robert C, *The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, Ithaca, New York, 1952.
- Departemen Angkatan Darat, *Tinjauan Situasi Irian Barat*, Djakarta, 1960.
- Departemen Penerangan, *Pembebasan Irian Barat. Kumpulan Pidato dan Keterangan-keterangan mengenai perjuangannya Pembebasan Irian Barat*, Djakarta, 1962.
- Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, djilid III Djakarta, 1965.
- Information Office Republic of Indonesia, *Report on Indonesia*, New York, 1950.
- Kahin, George Mc Turnan, *Indonesian Politics and Nationalism*, New York, 1953.
- Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Case Study mengenai Kegiatan-kegiatan Komando Mandala (stensilan) Makassar, 1963.
- Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Laporan-laporan Komando Mandala Bidang G-2 (Operasi) dan G-5 (Teritorial dan Perlawanan Rakyat) (stensilan) Makassar, 1963.
- Komisi Gabungan Irian Bagian Komisi Indonesia, *Penjelasan Persengketaan Irian Barat*, Scheveningen, 1950.
- Lopa, Baharuddin SH, *Djalannya Revolusi Indonesia Membebaskan Irian Barat*, Daya Upaya, Djakarta, 1962.
- Nasution, Djendral A.H. *Menuju Tentara Rakjat*, Djakarta, 1963.
- ”————— *Mengamankan Pandji-pandji Revolusi, Deligasi*, Djakarta, 1964.
- ”————— *Sedjarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersendjata*, Djakarta, 1966.



Panitia Buku Kenangan, *Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*, Makassar, 1963.

Panitia HUT Sewindu Kodjenkassel, *Sewindu Komando Djenis Kapal Selam*, Djakarta, 1967.

Penguasa Perang Tertinggi, Himpunan Lembaran Penguasa Perang Tertinggi (tanpa tahun).

Simatupang, Major Djendral TB, *Laporan dari Banaran*, tjetakan II, Djakarta, 1961.

Seksi Penerangan KOTI PEMIRBAR, Berita-berita penting Sepekan, djilid I s/d V, Djakarta, 1962.

Soekarno, Dr.Ir, *Dibawah Bendera Revolusi*, djilid II, Djakarta, 1964.

Soebagyo, Moch, *Mengenal sebagian dari Tanah Air Kita Irian Barat*, Djakarta, 1962.

Yamin SH, Moch, *Kedaulatan Indonesia atas Irian Barat*, Bukittinggi, 1956.

—————”————— *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, djilid II, Djakarta, 1969.

Madjalah *Angkasa*, 1963.

*Karya Wira Yati*, 1963.

*Mimbar Penerangan*, 1961, 1962.

*Vidya Yudha*, 1962.